



# Kajian Fiskal Regional

Provinsi Sumatera Selatan

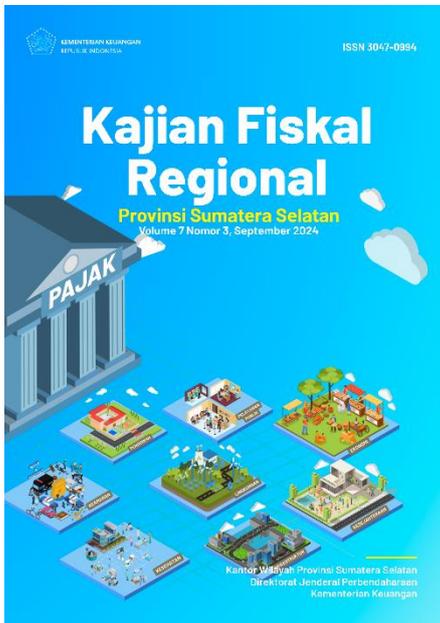
Volume 7 Nomor 3, September 2024



Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kementerian Keuangan

**Kajian Fiskal Regional  
Provinsi Sumatera Selatan**

Volume 7 Nomor 3, September 2024



Kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan

**Diterbitkan oleh:**

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

**Pengarah:**

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel

**Penanggung Jawab:**

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

**Reviewer:**

Prof. Bernadette Robiani, M. Sc.

Yessi Marseilli

**Kontributor:**

**Analisis Ekonomi Regional:** Riedho Hizwar

**Analisis Fiskal Regional:** Yudho Bintoro Sandi, M. Telly Anggra

**Pengembangan Ekonomi Daerah:** Suntari, Desy Handayani

**Analisis Tematik:** Riedho Hizwar, Yudho Bintoro Sandi

**Desain dan Layout:** Nur Rahma Kartika, Yudho Bintoro Sandi

**Alamat Redaksi:** Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II

Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

**Situs Web:** <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan III Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 29 November 2024

**Kepala Kantor Wilayah DJPb  
Provinsi Sumatera Selatan**



Ditandatangani secara elektronik  
Rahmadi Murwanto



## DAFTAR ISI

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7 Nomor 3, September 2024

TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DASHBOARD.....	vii
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI .....	2
B. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN .....	4
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL .....	6
A. PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI SUMSEL.....	7
B. PELAKSANAAN APBD DI PROVINSI SUMSEL.....	20
C. PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN.....	24
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH .....	27
A. PEMBERDAYAAN UMKM .....	28
BAB IV ANALISIS TEMATIK .....	36
A. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER .....	37
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	47

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan substansi penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyusun KFR Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan analisis atas efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi pada konteks regional. Dengan mempertajam analisis dampak dari peran fiskal pada tingkat regional, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Untuk mengukur kinerja dalam melihat capaian dari prioritas pembangunan tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan target sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional.

Salah satu prioritas nasional tahun 2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 1). Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada PN ini dilaksanakan melalui major project pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan pemberdayaan UMKM di antaranya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja Transfer ke Daerah (TKD), melalui APBN, dan dukungan kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya.

Selain itu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang merupakan prioritas nasional 2024 (PN 2) erat kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang pada KFR kali ini mengangkat salah satu pilarnya sebagai analisis tematik yaitu implementasi strategi penguatan local taxing power.

### Perekonomian dan Kesejahteraan Regional

Sampai dengan triwulan III 2024, dari beberapa target indikator makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Selatan yang harus dicapai di tahun 2024 sudah terdapat beberapa indikator yang tercapai seperti Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2024 mencapai 122,44 yang didorong oleh subsektor perkebunan. Demikian juga dengan TPT yang per Agustus 2024 tercatat 3,86%. Perekonomian Sumsel mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,04% (yoy), merupakan yang tertinggi ketiga di regional Sumatera, dan juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,95% (yoy). Tiga sektor yang menjadi kontributor terbesar PDRB Sumsel adalah

sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, serta Industri Pengolahan, dengan total kontribusi mencapai 47,42%. Laju inflasi Sumsel pada triwulan III 2024 tetap terkendali dan dalam tren yang menurun, yaitu tercatat sebesar 1,40% (yoy), dengan komoditas penyumbang yang dominan dari emas perhiasan. Bila dilihat secara bulanan, akumulasi inflasi Sumsel di triwulan III 2024 mengalami deflasi sebesar -0,6% yang utamanya dipengaruhi adanya panen serentak pada beberapa komoditas sehingga mengakibatkan harganya turun seperti cabai, tomat, dan bawang merah. Yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga tingkat inflasi berada pada rentang target  $2,5 \pm 1\%$ .

### Pelaksanaan APBN dan APBD

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara pada triwulan III tahun 2024 tercapai 63,73% dari target atau sebesar Rp14,66 triliun, tumbuh 4% (yoy), sementara realisasi Belanja Negara tercatat 68,70% senilai Rp36,34 triliun, tumbuh 22,26% (yoy). Kinerja APBD juga mencatatkan tren positif pada triwulan III dan diproyeksi tetap positif sampai dengan akhir tahun 2024 yang utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berdampak pada penerimaan pajak daerah. Selain itu percepatan penyelesaian PSN di Sumsel juga turut mendorong kinerja fiskal Sumsel.

### Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM walaupun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai tantangan. Kontribusi UMKM di Sumsel terhadap PDRB masih belum signifikan walaupun sebaran jumlahnya cukup mendominasi. Beberapa tantangan pada UMKM di Sumsel adalah pendidikan pelaku UMUM masih rendah / pekerja berkeahlian rendah, mayoritas bergerak di sektor yang bernilai tambah rendah dan Sebagian besar belum memanfaatkan teknologi sehingga masih mengandalkan metode penjualan langsung.

### Analisis Tematik Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power

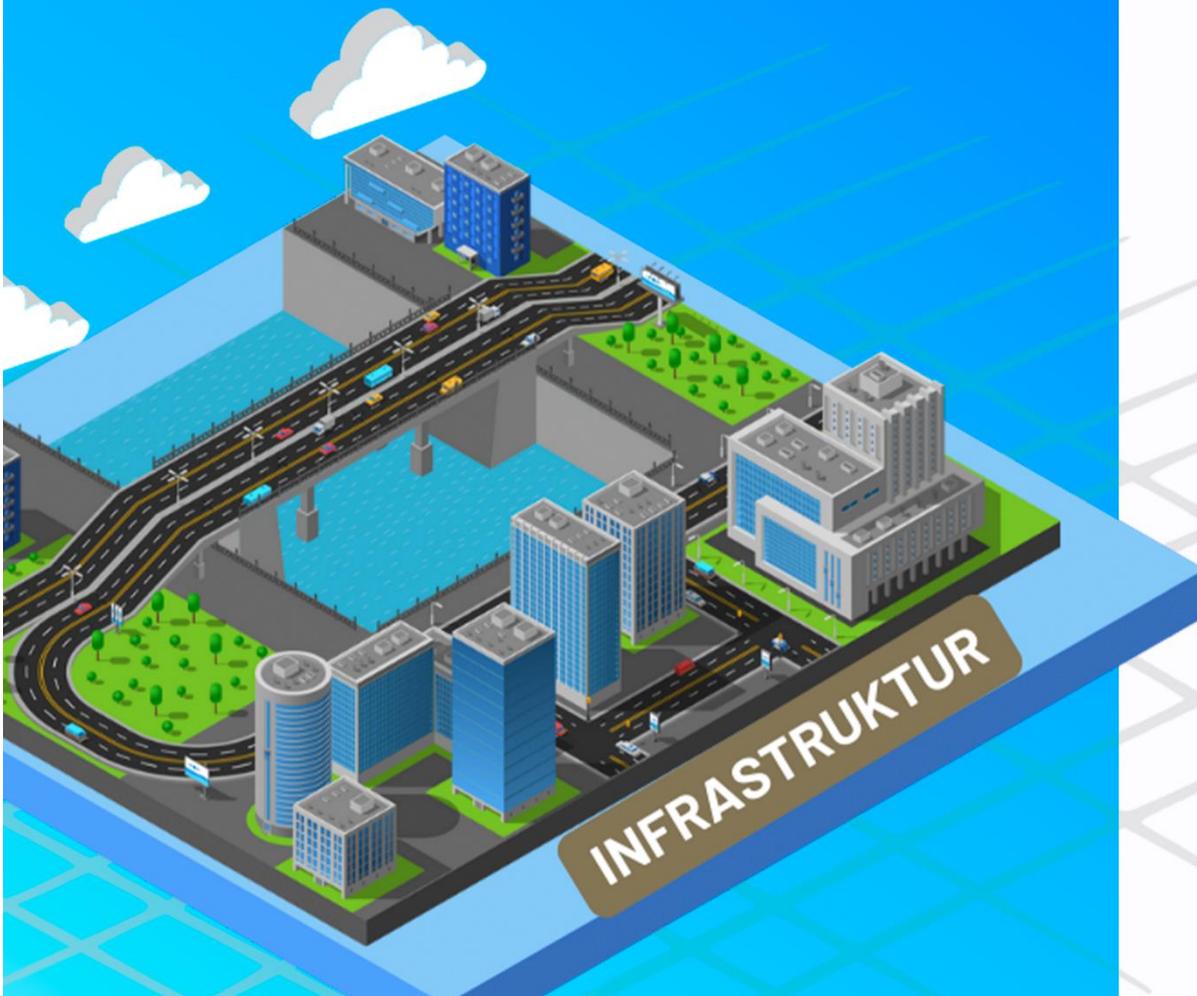
Analisis tematik KFR triwulan ini mengangkat topik implementasi strategi penguatan Local Taxing Power sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP no. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Seluruh pemda di Sumsel telah menetapkan Perda PDRD secara tepat waktu sesuai ketentuan namun dari 18 pemda, terdapat 1 pemda yang belum menyampaikan Perda PDRD secara formal kepada Kementerian Keuangan yaitu Pemkab Lahat. Atas perda PDRD lingkup Sumsel telah dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJP) Kemenkeu untuk menguji kesesuaian dengan UU HKPD dan PP PDRD. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perda PDRD pada 17 pemda di Sumsel, terdapat 10 kategori permasalahan utama yang memerlukan tindak lanjut. Persiapan implementasi opsen pajak sebagai bagian dari penguatan local taxing power di Sumsel telah menunjukkan progress yang cukup signifikan dalam beberapa aspek utama namun masih terdapat tantangan terutama dalam hal kesiapan administrasi dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota. Dari hasil diskusi dan telaah

dengan pihak-pihak terkait optimalisasi pajak daerah, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memang masih menjadi tantangan utama.

#### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Secara keseluruhan kinerja ekonomi dan fiskal Sumsel tetap dalam tren yang positif, meskipun dari sisi kesejahteraan dibutuhkan intervensi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.



INFRASTRUKTUR

# D A S H B O A R D



# Dashboard Ekonomi Regional

## Indikator Makro Ekonomi

### Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang terjaga positif dan lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Lebih baiknya kinerja ekonomi Sumsel tersebut utamanya dipengaruhi oleh tumbuhnya aktivitas perekonomian di triwulan III 2024, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun investasi.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

### Inflasi

y-on-y  
**1,40%**

Laju Inflasi Sumsel pada periode triwulan III 2024 terkendali dan masih dalam tren yang menurun.

### Perkembangan Harga Pangan Sumsel

y-to-d



Beras Medium  
**-9,22%**



Bawang Putih  
**0,13%**



Bawang Merah  
**-10,08%**



Cabai Merah  
**20,72%**



Daging Ayam  
**-14,23%**



Telur Ayam  
**-1,19%**

Sumber: Badan Pangan Nasional

## Indikator Kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan III 2024 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

### Kemiskinan



Tingkat Kemiskinan Sumsel per Maret 2024 sebesar:

**10,97%**



### Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel s.d. Agustus 2024 sebesar:

**3,86%**



### Gini Ratio



Tingkat Ketimpangan di Sumsel s.d. Maret 2024 sebesar:

**0,333**



### Nilai Tukar Petani



Nilai Tukar Petani di Sumsel per September 2024 sebesar:

**124,44**



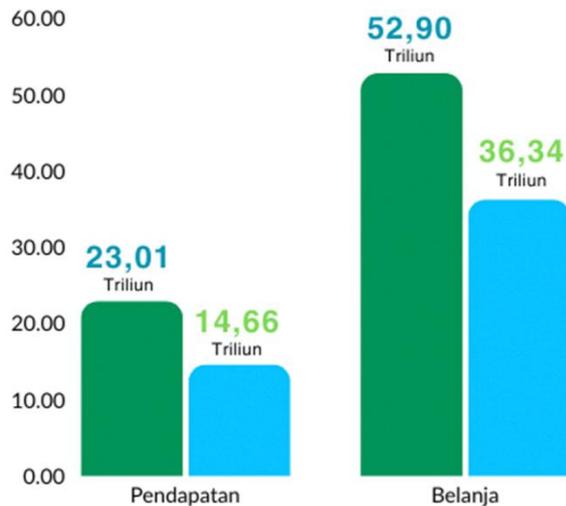
Sumber: BPS Provinsi Sumsel

# Kinerja Fiskal Regional

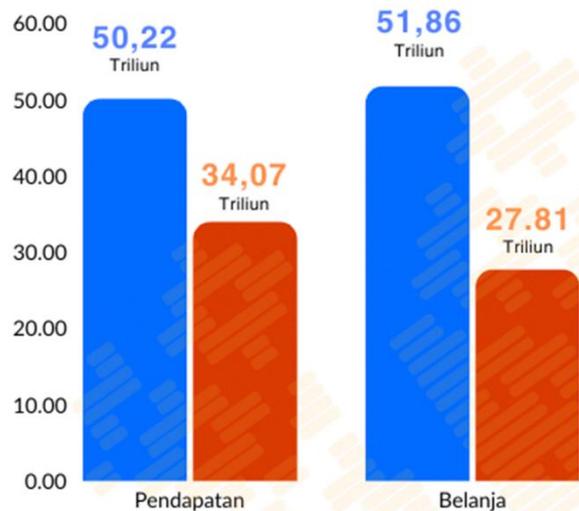
## Triwulan 3 Tahun 2024



Pagu  
Realisasi



Pagu  
Realisasi

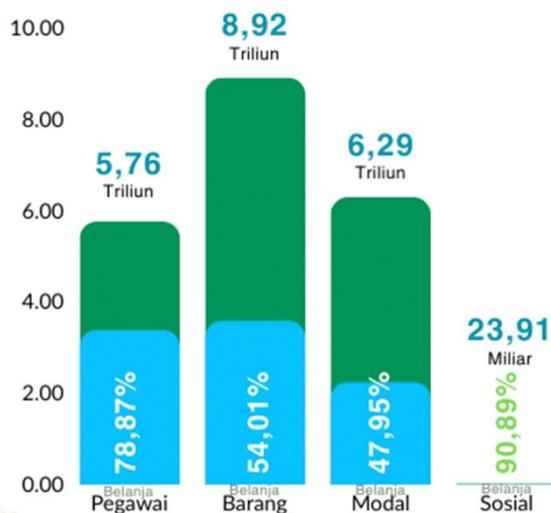


### APBN

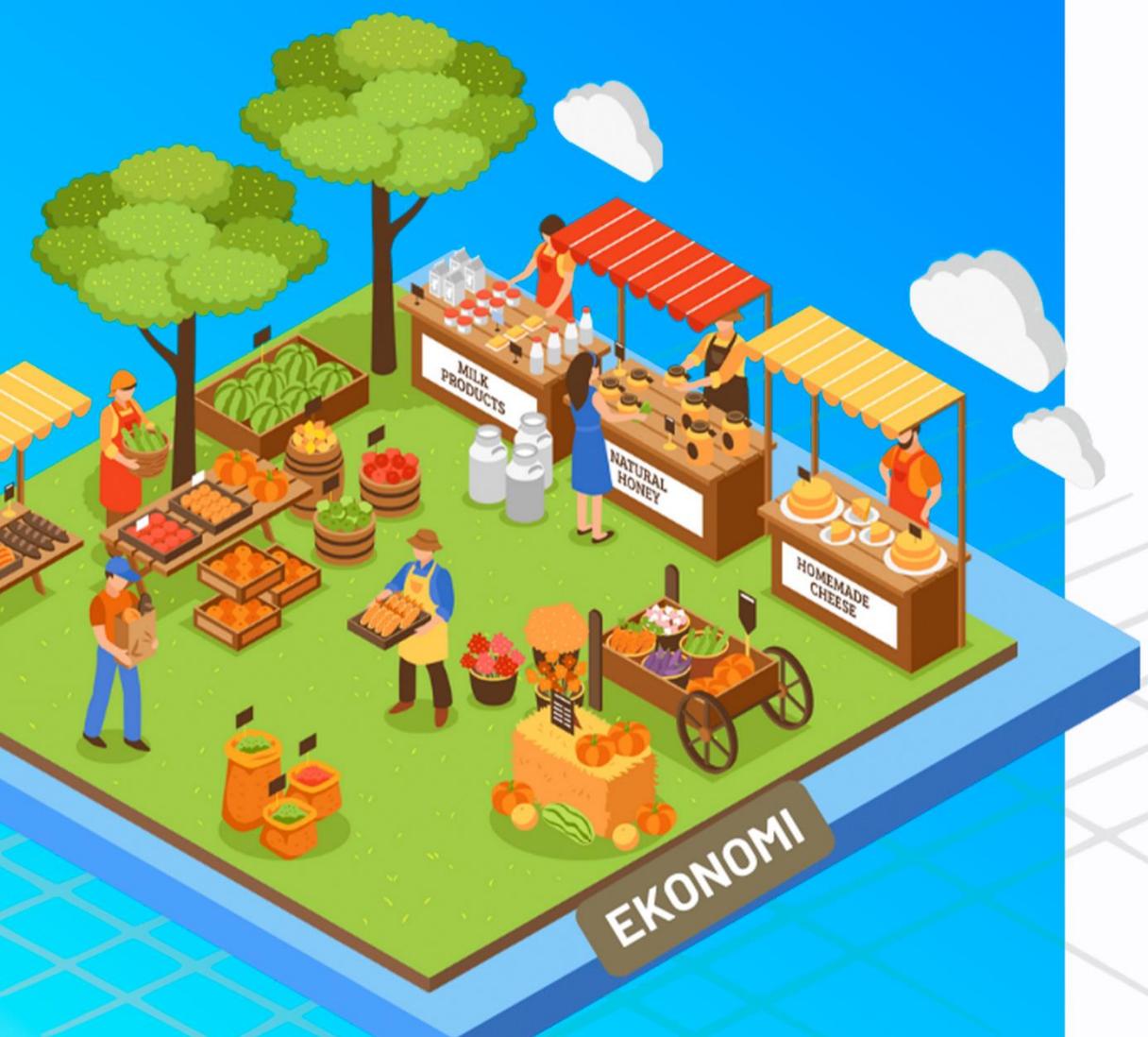
Sumber: Online Monitoring SPAN

### APBD

Sumber: Dit. APK, DJPb



# BAB I: ANALISIS EKONOMI REGIONAL



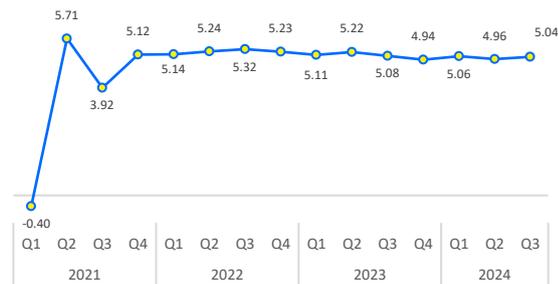
EKONOMI

## A. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

### A.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang terjaga positif dan lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,95% (yoy) dan merupakan yang terbesar ketiga di regional Sumatera. Lebih baiknya kinerja ekonomi Sumsel tersebut utamanya dipengaruhi oleh tumbuhnya aktivitas perekonomian di triwulan III 2024, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun investasi.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Year on Year Sumsel (%)

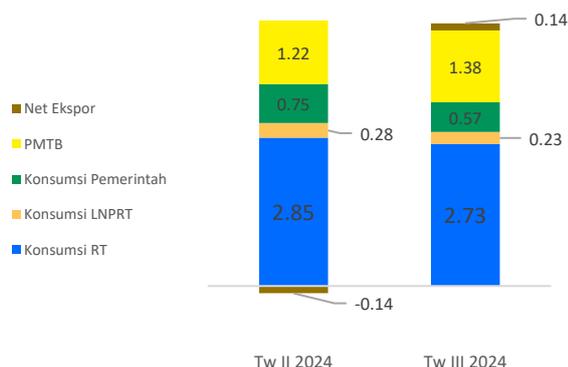


sumber: BPS Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di triwulan III 2024 dengan andil sebesar 2,73% dari total pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua dengan andil sebesar 1,38%. Ekspor luar negeri yang pada periode-periode sebelumnya menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi Sumsel, pada triwulan III 2024 kembali memberikan andil positif sebesar 0,47%.

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Sumsel. Sektor pertambangan dan penggalian kembali menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari yang periode sebelumnya mengalami perlambatan. Andil sektor pertambangan dan penggalian di triwulan III 2024 sebesar 0,84% dari total pertumbuhan ekonomi Sumsel. Sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi kedua dengan andil sebesar 0,83%, diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 0,72%.

Grafik 1.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Sisi Pengeluaran (yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

### A.1.1. PDRB Menurut Pengeluaran

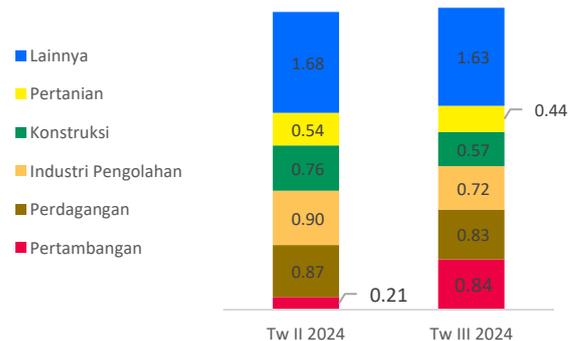
Struktur ekonomi Sumsel masih dalam kondisi yang sama dengan komponen konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama. Kontribusi konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 mencapai 59,67% dari total PDRB Sumsel. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 30,06%, ekspor luar negeri berkontribusi sebesar 23,58%, konsumsi LNPR sebesar 1,49%, dan konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 5,73% terhadap total PDRB.

Konsumsi rumah tangga Sumsel pada triwulan III 2024 tumbuh positif meskipun lebih lambat dari periode sebelumnya. Aktivitas konsumsi rumah tangga Sumsel tercatat tumbuh sebesar 4,77% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,79% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat karena adanya penyelenggaraan event-event berskala lokal maupun nasional. Selain itu, adanya pencairan bantuan sosial pemerintah juga menjadi faktor pendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan III 2024, konsumsi pemerintah di Sumsel tumbuh sebesar 16,10% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,41% (yoy). Pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tumbuh positif, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja bantuan sosial. Peningkatan belanja pegawai disebabkan oleh tren realisasi belanja pemerintah yang cenderung mengalami peningkatan pada Semester II 2024.

Kegiatan investasi atau PMTB wilayah Sumsel tumbuh positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB Sumsel pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,05% (yoy). Pertumbuhan PMTB tersebut didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, dan Irigasi Lematang. Selain itu, aliran modal terus mengalir ke Sumsel yang pada triwulan III 2024 mencapai Rp8,45 triliun dengan 5.196 proyek (PMDN) dan US\$318 juta (PMA) dengan 424 proyek.

Grafik 1.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Lapangan Usaha (yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Tabel 1.1. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Lapangan Usaha (yoy)

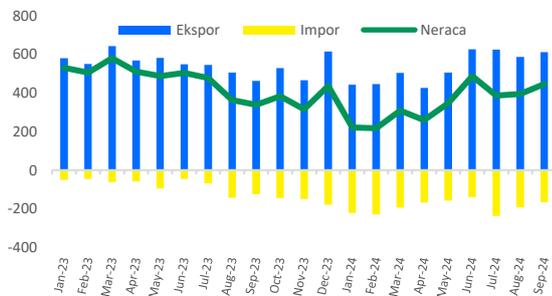
Komponen	Share (%)	YoY (%)	
		Tw. II	Tw. III
Konsumsi RT	59,67	4.82	4.82
Konsumsi LNPRT	1,49	18.24	18.24
Konsumsi Pemerintah	5,73	12.41	12.41
PMTB	30,06	4.05	4.05
Ekspor	17,61	-10.52	-10.52
Impor	5,38	92.03	92.03
PDRB	100	4.96	4.96

Sumber: BPS Sumsel, 2024

**Konsumsi LNPRT masih dalam tren pertumbuhan yang tinggi di tahun politik.** Pada triwulan III 2024, konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 16,32% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,24% (yoy). Meskipun lebih lambat, konsumsi LNPRT pada triwulan III 2024 tersebut masih tinggi disebabkan oleh kegiatan partai politik dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

**Ekspor Sumsel terus menunjukkan perbaikan, dan kembali tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan negatif dalam 4 triwulan terakhir.** Ekspor Sumsel pada triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 16,11% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -10,52% (yoy). Dibandingkan tahun lalu, nilai dan volume ekspor Sumsel pada triwulan III 2024 mengalami penurunan pada beberapa komoditas seperti bahan bakar mineral, pulp, dan migas. Penurunan tersebut diantaranya dipengaruhi penurunan permintaan dari mitra dagang utama Sumsel dan harga komoditas.

Grafik 1.4. Neraca Perdagangan Sumsel (US\$ Juta)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

**Impor Sumsel tetap dalam tren pertumbuhan yang tinggi.** Pada triwulan III 2024, impor Sumsel tumbuh sebesar 42,83% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 92,03% (yoy). Kegiatan impor Sumsel pada tahun 2024 didorong oleh aktivitas investasi yang dilakukan PT. OKI Pulp & Paper Mills yang melakukan impor barang modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.

### A.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

**Struktur PDRB Sumsel menurut Lapangan Usaha ditopang oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi.** Pada triwulan III 2024, kelima sektor tersebut tumbuh positif, baik tahunan maupun triwulanan. Dan 12 sektor lainnya juga mencatatkan pertumbuhan yang positif.

**Sektor Pertambangan dan Penggalian kembali tumbuh baik setelah sebelumnya melambat di triwulan sebelumnya.**

Kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian di triwulan III 2024 tumbuh sebesar 3,51% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,94% (yoy). Tumbuhnya sektor pertambangan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi batubara.

**Industri Pengolahan Sumsel tumbuh positif.** Industri Pengolahan Sumsel pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,04% (yoy), lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Pertumbuhan sektor industri pengolahan Sumsel tersebut didukung oleh positifnya kinerja subsektor utama yaitu industri pengolahan makan minum, kimia, karet, dan kertas.

**Kinerja sektor Pertanian Sumsel tumbuh positif.** Pada triwulan III 2024, sektor pertanian Sumsel tumbuh sebesar 2,66% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,66% (yoy). Berdasarkan data survei BPS, produksi karet Sumsel pada triwulan III 2024 tercatat naik 0,32% (yoy).

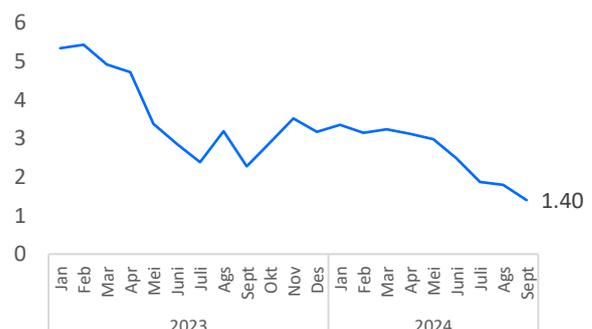
**Sektor Perdagangan Sumsel tetap dalam tren pertumbuhan yang positif.** Aktivitas perdagangan Sumsel pada triwulan III 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,33% (yoy), lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 7,69% (yoy). Meningkatnya mobilitas penduduk dan adanya penyelenggaraan event-event skala lokal dan nasional menjadi pendorong sektor perdagangan Sumsel di triwulan III 2024.

**Sektor Konstruksi menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat.** Sektor konstruksi pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,49% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,28% (yoy). Percepatan penyelesaian PSN menjadi faktor yang mendorong tingginya kinerja sektor konstruksi di triwulan III 2024. Saat ini terdapat 15 PSN yang sedang dilaksanakan di Sumsel pada tahun 2024.

## A.2. Inflasi

**Laju inflasi Sumsel pada periode triwulan III 2024 terkendali dan masih dalam tren yang menurun.** Per September 2024, Inflasi Sumsel tercatat sebesar 1,40% (yoy), turun dibandingkan posisi Juni 2024 yang sebesar 2,48% (yoy). Dan jika dilihat secara bulanan, akumulasi inflasi Sumsel di triwulan III 2024 mengalami deflasi sebesar -0,6 %, turun jika dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar 0,46%. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi Sumsel di triwulan III 2024 adalah adanya panen serentak pada beberapa komoditas seperti cabai, tomat, dan bawang merah yang mengakibatkan turunnya harga komoditas tersebut, serta penyesuaian harga BBM non subsidi yang turun di September 2024, dan faktor tahun ajaran baru.

Grafik 1.5. Inflasi Sumsel (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Secara tahunan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Pada September 2024, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 7,35% (yoy) dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,52% (yoy). Komoditas dominan yang menyumbang inflasi tahunan Sumsel yaitu emas perhiasan, tarif air PDAM, gula pasir, kopi bubuk, dan sigaret kretek mesin.

Berdasarkan data inflasi bulanan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan akumulasi Juli-September 2024, inflasi kelompok makanan, minuman, tembakau mengalami deflasi sebesar -0,51%, dengan andil sebesar -0,15%. Komoditas dominan yang menyumbang inflasi bulanan pada triwulan III 2024 tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, dan bensin.

Tabel 1.2. Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (yoy)

Kelompok Pengeluaran	YoY	Andil Inflasi
Makanan Jadi, Minuman....	0,47	0,14
Pakaian dan Alas Kaki	-1,42	-0,08
Perumahan, Air, Listrik....	2,17	0,30
Perlengkapan, Peralatan....	-0,61	-0,04
Kesehatan	1,73	0,04
Transportasi	1,81	0,24
Informasi, Komunikasi....	-0,42	-0,02
Rekreasi, Olahraga....	2,67	0,06
Pendidikan	1,82	0,10
Penyediaan Makanan....	1,53	0,14
Perawatan Pribadi....	7,35	0,52

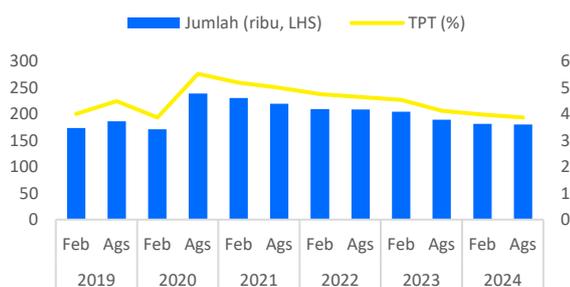
Sumber: BPS Sumsel, 2024

## B. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

### B.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Sumsel mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus positif. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumsel per Agustus 2024 berada di angka 3,86% (yoy), turun dari kondisi Agustus 2023 yang sebesar 4,11% (yoy). Berdasarkan jumlah, aktivitas perekonomian Sumsel dalam satu tahun tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 80,44 ribu orang dan pengangguran berkurang sebanyak 8,8 ribu orang.

Grafik 1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (% ,yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Sektor Pertanian dan perdagangan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Selama periode Agustus 2023 s.d. Agustus 2024, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 62 ribu orang, terutama peningkatan pada pekerja keluarga yang didominasi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah. Sektor perdagangan menyerap sebanyak 37 ribu orang, dengan peningkatan pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMA sederajat.

Sektor Pengangkutan dan Pergudangan dan sektor Jasa Profesional dan Perusahaan menjadi sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja terbesar. Kedua sektor tersebut secara total mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 32,10 ribu orang. Penurunan pada sektor Pengangkutan dan Pergudangan didominasi pekerja berstatus buruh dengan mayoritas pekerja berpendidikan SMA derajat.

### B.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel secara umum mengalami tren perbaikan dari periode ke periode. Per Maret 2024, kemiskinan Sumsel berada di angka 10,97%, turun dari Maret 2023 yang sebesar 11,78%. Namun demikian, perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel tidak diiringi oleh perbaikan pada kondisi tingkat kedalaman (P1) maupun keparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per Maret 2024 di angka 1,888, meningkat dari Maret 2023 yang diangka 1,724. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran

Grafik 1.7. Tingkat Kemiskinan Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel, 2024

penduduk miskin Sumsel cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per Maret 2024 di angka 0,457, meningkat dari Maret 2023 yang tercatat 0,393, yang mengindikasikan bahwa terdapat pelebaran ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 11,53% dan perkotaan 10,04%.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per Maret 2024, komoditas makanan berkontribusi sebesar 74,57% dari total garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

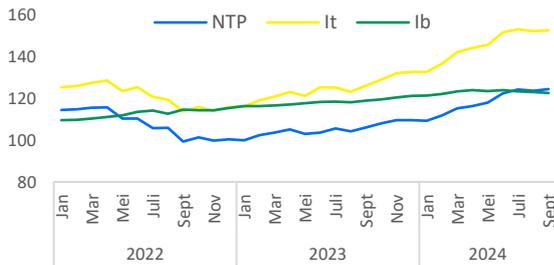
Kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi per Maret 2023. Gini Ratio Sumsel tercatat di angka 0,333, turun dari periode sebelumnya yang tercatat 0,338. Membaiknya tingkat

ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

### B.3. Nilai Tukar Petani

**Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel secara umum menunjukkan tren peningkatan.** Per September 2024, NTP Sumsel tercatat di angka 124,44, meningkat 17,43% (yoy) atau 1,67% (qtq). Peningkatan NTP tersebut didorong oleh subsektor perkebunan yang mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi, karet, dan kakao. Dari 5 (lima) subsektor, 2 sektor mengalami surplus yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan.

Grifik 1.8. Nilai Tukar Petani Sumsel (Indeks)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

**Peningkatan Indeks Terima (It) Petani Sumsel lebih tinggi dari peningkatan Indeks Bayar (Ib).** Per September 2024, It Sumsel di angka 152,59, naik 21,06% (yoy) atau 0,59% (qtq). Peningkatan It tersebut ditopang oleh kinerja sektor perkebunan yang per September 2024 mencatatkan It di angka 165,24. Sementara itu, Ib Sumsel per September berada di angka 123,62, meningkat 3,09% (yoy)

**Indeks Bayar (Ib) Petani Sumsel pada triwulan III 2024 didorong oleh konsumsi rumah tangga.** Per September 2024,

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Petani Sumsel tercatat di angka 122,77, lebih rendah dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPM) yang sebesar 121,68. Adapun komoditas yang menyumbang IKRT Sumsel pada triwulan III 2024 adalah cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, tomat sayur, dan bensin. Dan komoditas yang menyumbang BPPM Sumsel adalah cuka getah, vaksin, herbisida gulma, pupuk kandang, dan urea.

### B.4. Indeks Pembangunan Manusia

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel.** IPM Sumsel tahun 2023 berada diangka 73,18, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,29.

Grifik 1.9. Indeks Pembangunan Manusia Sumsel (Indeks)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

**Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi.** Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

## Box 1

### Risiko Penurunan Konsumsi Rumah Tangga Akibat Turunnya Kelas Menengah di Provinsi Sumsel

**Distribusi PDRB Sumsel berdasarkan jenis pengeluaran (%) 2014-2023**

Sumber data: BPS Sumsel (diolah)

**Populasi Sumatera Selatan Berdasarkan Kelas Masyarakat 2014-2023**

Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS (diolah)

Berdasarkan komponen pengeluaran, perekonomian Sumsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memiliki kontribusi >50% dari total PDRB Sumsel. Dalam 10 tahun terakhir, terlihat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Sumsel menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan kelas masyarakat, populasi Sumsel didominasi oleh kelas Aspiring Middle Class (AMC)/ Calon kelas menengah yang memiliki porsi >40% dari total populasi Sumsel. Dilihat dari tren di Sumsel, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah calon kelas menengah Sumsel mengalami peningkatan, sementara kelas menengah menunjukkan penurunan. Jumlah kelas menengah Sumsel di tahun 2023 berjumlah 1,33 juta jiwa, turun 10,34% dari tahun 2022. Sementara, jumlah calon kelas menengah sebanyak 4,12 juta jiwa, meningkat 0,44% dari tahun 2022. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pergeseran pada struktur konsumsi dan komposisi kelas masyarakat di Sumsel, yang perlu diperhatikan untuk perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.

# BAB II: ANALISIS FISKAL REGIONAL



## A. Pelaksanaan APBN Sumsel

APBN merupakan instrumen fiskal pemerintah pusat yang menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan mengoptimalkan fungsi distribusi dan stabilisasi, APBN di Sumsel difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilisasi harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting. Melalui pengoptimalan fungsi alokasi, APBN juga difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan.

Kebijakan fiskal 2024 juga difokuskan untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Target pendapatan negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 18,49% (yoy) dibandingkan target tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp23,00 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp20,27 triliun, PNBP Rp2,35 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp378,84 miliar. Penerimaan pajak sebagai kontributor utama, ditargetkan meningkat 15,50% (yoy) di tahun 2024 dengan asumsi semakin baiknya kondisi perekonomian di Sumsel pasca pemulihan ekonomi dan semakin meningkatnya konsumsi domestik di Sumsel, efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan peningkatan kepatuhan dan integrasi teknologi (implementasi *core tax system*).

Selain itu, untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik maka peningkatan kualitas belanja (*spending better*) perlu ditempuh guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global maupun domestik. Alokasi belanja negara pada tahun 2024 di Sumsel meningkat 2,81% (yoy) dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp52,90 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp21,00 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp31,90 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat meningkat 23,71% (yoy) yang diarahkan semakin berkualitas (*spending better*) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, transparan, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan akuntabel. Sementara itu, alokasi TKD diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumsel.

Alokasi belanja pemerintah pusat di Sumsel utamanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, penuntasan proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peruntukan kenaikan gaji pokok ASN serta pembayaran Gaji 13 dan THR. Hal ini terlihat dari pagu belanja barang yang meningkat 32,49% (yoy) yang digunakan utamanya untuk dukungan pelaksanaan pemilu seperti pembentukan badan *ad hoc* (pembayaran honor), pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik pemilu, dan pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu, serta persiapan Pilkada Serentak di November 2024. Pagu belanja modal juga meningkat 26,44% (yoy) utamanya digunakan untuk penyelesaian PSN di Sumsel seperti pembangunan jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Daerah Irigasi Lematang, dan Daerah Irigasi Lempuing. Selain itu, pagu belanja pegawai meningkat 9,89% (yoy) yang utamanya digunakan untuk pembayaran kenaikan gaji pokok ASN sesuai Perpres 10/2024 dan pembayaran Gaji

13 dan THR sesuai PP 14/2024 dimana komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100% di 2024, sementara di 2023 dibayarkan 50%. Pagu belanja bantuan sosial juga meningkat 13,45% (yoy) sebagai respon untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di Sumsel dalam program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Alokasi TKD 2024 di Sumsel tetap dominan dalam mendukung APBD di wilayah Sumsel untuk mendorong pencapaian program prioritas nasional dan kegiatan produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi, meskipun alokasinya sedikit mengalami penurunan. Alokasi TKD menurun 7,48% (yoy) dipengaruhi alokasi DBH, DAK Fisik, Hibah ke daerah, dan insentif fiskal yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi DBH menurun karena penerimaan negara tahun 2023 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2024, lebih rendah dibandingkan penerimaan negara di 2022 yang dibagikan menjadi alokasi DBH 2023. Hal tersebut utamanya didorong oleh mulai ternormalisasinya harga komoditas utama Sumsel (Batubara) di tahun 2023, dimana di tahun 2022 mengalami *windfall* komoditas. Di sisi lain, alokasi DAK Fisik lebih rendah dan cenderung berfluktuasi bergantung dengan arah kebijakan, prioritas nasional, sasaran DAK Fisik, serta rencana kegiatan pemda yang disetujui. Pagu insentif fiskal cenderung lebih rendah karena belum mencakup keseluruhan pagu insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan 2024 untuk kategori pengendalian inflasi (periode II dan III) yang baru akan teridentifikasi pada triwulan IV 2024. Sementara itu, hibah ke daerah 2024 lebih rendah karena *nationwide water* hibah program telah selesai di tahun 2023 untuk proyek air minum perkotaan (AMK) dan air minum pedesaan (AMD) sehingga tidak dialokasikan lagi pada tahun 2024. Pagu Hibah ke daerah tahun 2024 digunakan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ *Palembang City Sewerage Project* (PCSP) yang dibiayai dari hibah luar negeri dari pemerintah Australia dan hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni).

Dengan mencermati alokasi dan arah kebijakan fiskal 2024, kinerja realisasi belanja negara di Sumsel tumbuh positif ditopang oleh telah terlaksananya agenda pemilu, persiapan pilkada serentak, *progress* penuntasan PSN, dan pembayaran kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR, serta penyaluran TKD. Hingga triwulan III 2024, realisasi belanja negara di Sumsel telah mencapai Rp36,34 triliun atau tumbuh positif 22,26% (yoy) dan mencapai 68,70% dari pagu belanja di 2024. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 55,77%. Baik dari sisi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, semuanya menunjukkan kinerja realisasi yang positif. Hal ini terlihat dari Belanja pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) yang terealisasi sebesar Rp12,40 triliun atau tumbuh positif 25,21% (yoy), dan belanja transfer ke daerah di wilayah Sumsel yang terealisasi sebesar Rp23,93 triliun atau tumbuh positif 20,79% (yoy). Secara keseluruhan, peningkatan realisasi belanja ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sumsel melalui akselerasi belanja yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu tetap waspada dalam mengantisipasi berbagai risiko global dan domestik, seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, serta ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu, belanja negara harus terus diarahkan pada program-program prioritas yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi Sumsel secara berkelanjutan.

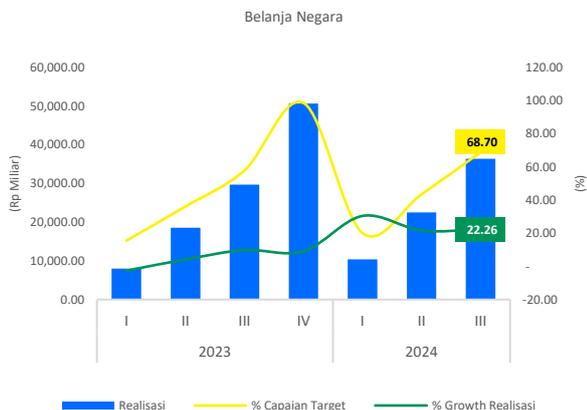
Tabel 2.1. Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Negara	19.418,43	14.101,15	72,62	23.009,32	14.664,69	63,73	4,00
Perpajakan	17.827,38	12.751,31	71,53	20.652,81	12.292,91	59,52	-3,59
Penerimaan Pajak	17.552,61	12.493,19	71,18	20.273,97	12.093,86	59,65	-3,20
Kepabeanan dan Cukai	274,76	258,12	93,94	378,84	199,05	52,54	-22,88
PNBP	1.591,05	1.349,84	84,84	2.356,52	2.371,78	100,65	75,71
Belanja Negara	51.457,06	29.725,06	57,77	52.903,74	36.342,28	68,70	22,26
Belanja Pemerintah Pusat	16.976,88	9.905,37	58,35	21.001,62	12.402,99	59,06	25,21
Belanja Pegawai	5.245,76	3.873,33	73,84	5.764,57	4.546,27	78,87	17,37
Belanja Barang	6.728,89	3.962,04	58,88	8.915,43	4.815,66	54,01	21,54
Belanja Modal	4.976,91	2.057,48	41,34	6.292,90	3.017,15	47,95	46,64
Belanja Bantuan Sosial	25,32	12,52	49,46	28,73	23,91	83,21	90,89
Transfer ke Daerah	34.480,18	19.819,68	57,48	31.902,12	23.939,29	75,04	20,79
Dana Bagi Hasil	13.544,47	4.834,94	35,70	9.969,62	6.890,06	69,11	42,51
Dana Alokasi Umum	12.254,41	9.029,78	73,69	13.400,40	10.652,31	79,49	17,97
DAK Fisik	1.568,36	804,11	51,27	1.430,07	615,43	43,03	-23,46
DAK Non Fisik	4.171,97	3.175,42	76,11	4.251,07	3.164,20	74,43	-0,35
Insentif Fiskal	254,87	42,25	16,58	246,51	145,20	58,90	243,67
Dana Desa	2.572,42	1.854,82	72,10	2.594,87	2.467,28	95,08	33,02
Hibah ke Daerah	113,69	78,37	68,93	9,57	4,79	50,03	-93,89
Surplus / Defisit	-32.038,63	-15.623,91	48,77	-29.894,42	-21.677,59	72,51	38,75

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Tumbuh positifnya belanja negara, mempengaruhi kondisi perekonomian Sumsel hingga triwulan III yang dalam tren positif. Optimalnya realisasi belanja negara di Sumsel khususnya untuk persiapan pilkada serentak, penyelesaian PSN, dan penyaluran TKD berdampak pada ekonomi Sumsel yang tumbuh 5,02% (ctc), terutama atas andil pertumbuhan signifikan pada sektor administrasi pemerintahan yang mencapai 9,53% (ctc). Peningkatan aktivitas partai politik dalam rangka persiapan pilkada dan peningkatan realisasi anggaran belanja pemerintah menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian Sumsel dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan pada komponen PK-LNPRT dan PKP menjadi yang tertinggi dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,20% (ctc) dan 10,48% (ctc).

Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



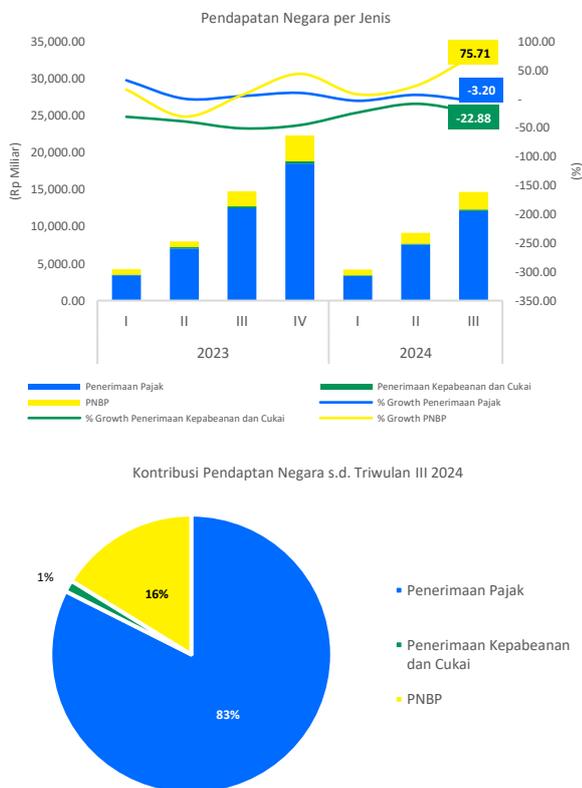
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Dengan melihat kondisi perekonomian Sumsel yang dalam tren positif, kinerja realisasi pendapatan negara juga terpantau tumbuh positif meskipun pada penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai sedikit menurun. Hingga triwulan III 2024, realisasi pendapatan negara di Sumsel telah mencapai Rp14,66 triliun atau tumbuh positif 4,00% dan mencapai 63,73% dari target. Capaian tersebut menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 72,62% dari target. Hal ini dipengaruhi karena penerimaan pajak sedikit menurun 3,20% (yoy), begitu juga dengan penerimaan kepabeanan dan cukai yang turun-22,88% (yoy). Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh signifikan mencapai 75,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## A.1 Pendapatan Negara

**Pendapatan negara di Sumsel meningkat dan utamanya masih dikontribusi oleh penerimaan pajak.** Hingga triwulan III 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp12,09 triliun dan menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan negara di Sumsel dengan share 83%, meskipun realisasinya sedikit menurun 3,20% (yoy). Secara substansi penurunan penerimaan pajak hanya berkaitan dengan perbedaan pencairan realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Migas di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, jika dikeluarkan komponen PBB, maka kondisi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 6,5% (yoy) didorong peningkatan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH), yang mencerminkan kesesuaian dengan kondisi ekonomi Sumsel yang dalam tren positif. Selanjutnya, realisasi PNBP mencatatkan penerimaan sebesar Rp2,37 triliun atau tumbuh positif 77,51% (yoy) didorong oleh peningkatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya dari Kementerian/Lembaga. PNBP menjadi kontributor kedua terbesar dengan share 16%.

**Grafik 2.2. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

**Penerimaan kepabeanaan dan cukai tren perkembangannya masih menunjukkan pertumbuhan negatif hingga triwulan III 2024.** Secara kontribusi, penerimaan kepabeanaan dan cukai hanya menyumbangkan 1% dari total pendapatan negara di Sumsel. Penerimaan kepabeanaan dan cukai terealisasi sebesar Rp199,05 miliar atau tumbuh negatif 22,88% (yoy) utamanya dipengaruhi penurunan bea keluar karena telah ternormalisasinya harga komoditas ekspor yang dikenakan bea keluar khususnya *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya di Sumsel sejak 2023 hingga saat ini dibandingkan pada tahun 2022 yang mengalami *windfall*. Selain itu, penurunan bea masuk juga dipengaruhi oleh meningkatnya impor barang

modal yang memperoleh insentif pembebasan bea masuk karena mendukung investasi di Sumsel. Di saat yang sama, meningkatnya penggunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) khususnya terkait komoditas karet, juga berpengaruh pada penurunan bea masuk di Sumsel karena dibebaskan atas bea masuknya dalam mendukung untuk meningkatkan aktivitas ekspor luar negeri yang berasal dari Sumsel.

### A.1.1 Penerimaan Pajak

**Penerimaan pajak Sumsel tetap mencerminkan kondisi ekonomi Sumsel yang dalam tren positif.** Hingga triwulan III 2024, penerimaan pajak mencapai Rp12,09 triliun (59,65% dari target). Kontributor utamanya berasal dari PPh dan PPN yang masing-masing menyumbangkan 52,52% dan 39,88% dari total penerimaan pajak Sumsel. Keduanya tumbuh positif masing-masing 5,62% (yoy) dan 0,56% (yoy) yang mengindikasikan peningkatan tersebut didorong oleh baiknya aktivitas konsumsi dan kondisi ekonomi Sumsel yang tumbuh positif. Secara agregat, memang penerimaan pajak tumbuh negatif 3,20% (yoy), namun ini hanya berkaitan dengan perbedaan waktu pencairan PBB Migas di tahun ini. Sehingga, jika dikeluarkan komponen PBB, maka kondisi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 6,5% (yoy). Sebagaimana ketentuan perpajakan, jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB disampaikan. Pada tahun 2024, SPPT PBB disampaikan pada Mei 2024 sehingga batas pembayarannya dapat dilakukan hingga November 2024. Hingga triwulan III 2024, pembayaran PBB Migas belum terealisasi sementara di tahun 2023 sudah terealisasi di Bulan September. Oleh karena itu, puncak realisasi PBB tahun ini baru akan terjadi pada bulan Oktober s.d. November mendatang.

**Kelompok pajak penghasilan (PPh) menjadi kontributor utama total penerimaan pajak di Sumatera Selatan.** Kelompok PPh mencatatkan penerimaan sebesar Rp6,35 triliun (61,87% dari target). Hal ini dipengaruhi oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang utamanya ditopang dari aktivitas konsumsi rumah tangga. Pada triwulan III, konsumsi rumah tangga menyumbangkan 59,67% dari total PDRB Pengeluaran Sumsel dan tumbuh 4,77% (yoy). Pembayaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR mempengaruhi peningkatan level penghasilan pegawai dan berimplikasi pada peningkatan pembayaran PPh pasal 21. Selain itu, peningkatan pengeluaran belanja untuk pelaksanaan konstruksi pada PSN juga berdampak pada peningkatan PPh final. Sehingga, secara keseluruhan berdampak pada tumbuh positifnya kelompok pajak penghasilan hingga triwulan III.

**Aktivitas konsumsi pemerintah yang berlangsung baik, menjadi pendorong meningkatnya realisasi kelompok PPN & PPNBM.** Pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan III tumbuh positif 10,48% (ctc), dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja modal dari APBN dan APBD. Realisasi belanja modal untuk penuntasan proyek strategis nasional (PSN) di Sumsel utamanya yang mendorong capaian PPN & PPNBM yang mencapai Rp4,82 triliun (63,12 % dari target) dan tumbuh positif 0,56% (yoy). Sementara itu, kelompok PBB mencatatkan Rp789,20 miliar (37% dari target) dan tumbuh negatif 48,59% (yoy) dipengaruhi oleh pencairan pembayaran PBB oleh wajib pajak yang diproyeksi baru akan dilakukan pada triwulan IV 2024 dengan batas waktu maksimal di bulan November. Sementara itu, pajak lainnya 130,59 miliar (55,92% dari target).

Tabel 2.2 Penerimaan Per Kelompok Pajak s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2023			2024			Growth (%)	Share Kelompok Pajak s.d. TW III (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.058,11	6.013,09	74,62	10.266,04	6.351,20	61,87	5,62	52,52
PPN & PPNBM	7.216,26	4.795,93	66,46	7.641,11	4.822,86	63,12	0,56	39,88
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.073,62	1.535,21	74,04	2.133,27	789,21	37,00	-48,59	6,53
Pendapatan Pajak Lainnya	204,62	148,96	72,80	233,54	130,59	55,92	-12,33	1,08
Total Penerimaan Pajak	17.552,61	12.493,19	71,18	20.273,97	12.093,86	59,65	-3,20	100,00

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, mayoritas jenis penerimaan pajak berkontraksi dipengaruhi peningkatan restitusi dan penurunan harga komoditas utama Sumsel. PPN dalam negeri menjadi kontributor utama yang berkontribusi 38,14% dari penerimaan negara di Sumsel dan tercatat Rp4,61 triliun atau turun 0,9% (yoy). Hal ini dipengaruhi peningkatan restitusi tahun 2024 pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar. Selanjutnya PPh Badan mencapai Rp1,31 triliun yang berkontribusi 10,91%, mengalami penurunan 11,41% (yoy) dipengaruhi penurunan signifikan harga komoditas tahun 2023, yang mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan. PPh pasal 23 mencapai Rp649,68 miliar yang berkontribusi 5,37%, mengalami penurunan 5,4% (yoy) dipengaruhi adanya penurunan atau stagnansi aktivitas sewa peralatan, terutama WP sektor pertambangan. PBB Pertambangan mencapai Rp552,92 miliar dan turun 58,8% (yoy) karena perbedaan waktu realisasi pencairan dari PBB Migas Tahun 2023 bulan September. Begitu juga dengan PPh pasal 22 yang tercatat Rp326,41 miliar, yang mengalami penurunan 5,5% (yoy) karena pembayaran ketetapan pajak yang tidak berulang tahun 2023 dan penurunan aktivitas ekspor komoditas tambang batubara.

Tabel 2.3. Penerimaan Per Jenis Pajak s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

Jenis Pajak (Rp Miliar)	Realisasi		Growth (%)	Share Jenis Pajak s.d. TW III (%)
	2023	2024		
PPN Dalam Negeri	4.655,19	4.612,35	-0,9%	38,14
PPh Pasal 21	2.497,73	2.915,06	16,7%	24,10
PPh Pasal 25/29 Badan	1.488,82	1.319,13	-11,4%	10,91
PPh Final & FLN	694,67	808,34	16,4%	6,68
PPh Pasal 23	687,08	649,68	-5,4%	5,37
PBB Pertambangan	1.340,59	552,92	-58,8%	4,57
PPh Pasal 22	345,36	326,41	-5,5%	2,70
PPN Impor	138,47	203,02	46,6%	1,68
Pajak Lainnya	645,29	706,94	9,6%	5,85
Total	12.493,19	12.093,86	-3,2%	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

Meski secara mayoritas jenis penerimaan pajak mengalami kontraksi, beberapa jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Hingga triwulan III 2024, PPh 21 mencapai Rp2,91 miliar yang berkontribusi 24,10% dari total penerimaan pajak, dan tumbuh 16,7% (yoy) karena terjaganya utilitas tenaga kerja dan peningkatan level penghasilan karyawan dipengaruhi kenaikan gaji ASN, pembayaran gaji 13 dan THR. PPh final juga tumbuh 16,4% (yoy) karena peningkatan pembayaran dari pelaksanaan jasa konstruksi pada Proyek Strategis Nasional dan penghasilan berupa dividen. Selain itu, PPN Impor juga tumbuh 46,6% (yoy) karena tingginya aktivitas impor barang modal dan bahan baku pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar.

Berdasarkan sektornya, pertumbuhan positif penerimaan pajak suatu sektor selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sektor yang sama. Tumbuh kuatnya PDRB sektor administrasi pemerintah 9,53% (ctc) mempengaruhi penerimaan pajak pada sektor administrasi pemerintah 27,18% (ctc). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN dalam negeri atas belanja modal APBN dan APBD serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai. PDRB pada sektor penyediaan akomodasi makan minum tumbuh positif 9,52% (ctc) yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan pajak sektor penyediaan akomodasi makan minum sebesar 1,09% (ctc). Hal yang serupa terjadi pada PDRB sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,29% (ctc), yang mempengaruhi pertumbuhan positif penerimaan pajak sektor yang sama sebesar 1,89%.

Kontribusi sektor penerimaan pajak memiliki keterkaitan dengan bagaimana struktur ekonomi di Sumsel. Secara kontribusinya, penerimaan pajak hingga triwulan III 2024 utamanya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (22,65%) yang memiliki *share* PDRB 13,65%. Hal yang sama juga dapat terlihat dari sektor industri pengolahan yang menyumbangkan 13,98% memiliki *share* PDRB 17,64%. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 14,29%, memiliki *share* pada PDRB sebesar 25,94%.

Tabel 2.4 Perbandingan PDRB dan Penerimaan Pajak Per Sektor s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

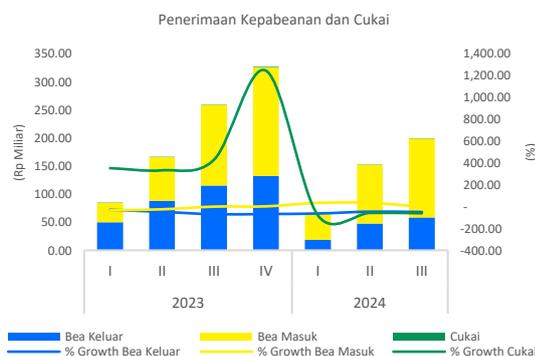
Sektor / Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (c-to-c, %)			Share PDRB TW III (%)	Pertumbuhan Pajak (c-to-c, %)			Share Pajak s.d. TW III (%)
	TW I	TW II	TW III		TW I	TW II	TW III	
Pertanian, kehutanan, Perikanan	2,11	2,69	2,7	13,92	-19,73	-6,65	-11,99	7,42
Pertambangan dan Penggalian	4,14	2,43	2,85	25,94	-9,28	-1,09	-35,54	14,29
Industri Pengolahan	4,65	4,84	4,5	17,64	-20,36	-0,63	-8,64	13,98
Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,49	8,67	0,13	73,84	75,81	44,46	3,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,52	2,19	2,45	0,09	265,07	60,09	56,69	0,40
Konstruksi	6,89	7,09	6,55	10,43	-39,86	-24,27	-9,24	3,02
Perdagangan Besar dan Eceran	6,81	7,26	7,29	13,65	-18,32	-4,70	1,89	22,65
Transportasi dan Pergudangan	2,72	3,24	3,44	2,44	25,80	4,64	7,87	5,49
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	9,65	9,61	9,52	1,96	21,08	12,24	1,09	0,35
Informasi dan Komunikasi	6,12	8,00	8,73	2,90	28,73	32,12	25,57	0,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,12	9,5	2,17	17,58	25,77	19,51	6,85
Real Estate	6,51	7,46	7,91	2,85	-18,99	-8,71	-4,67	0,62
Jasa Perusahaan	3,96	4,52	4,82	0,11	4,42	8,41	12,61	2,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,98	9,53	2,42	70,16	50,03	27,18	15,78
Jasa Pendidikan	4,94	5,47	5,79	2,07	7,11	15,33	14,51	0,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	5,66	5,19	0,60	8,42	9,98	6,81	0,92
Jasa lainnya	4,92	5,70	5,63	0,69	20,54	27,79	18,29	1,87
PDRB	5,06	5,01	5,02	100	-3,05	7,23	-3,20	100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel dan BPS Sumsel (diolah)

### A.1.2 Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Meskipun aktivitas ekspor luar negeri Sumsel mulai memberikan andil positif pada triwulan III, penerimaan kepabeanaan dan cukai di Sumsel menurun dipengaruhi penerimaan bea keluar yang berkontraksi. Hingga triwulan III, penerimaan bea keluar mencatatkan realisasi Rp58,21 miliar atau turun 49,53% (yoy) dengan share 29,24%, penerimaan bea masuk terealisasi Rp140,71 miliar atau sedikit turun 1,23% (yoy) dan menjadi kontributor utama dengan share 70,69%, sementara penerimaan cukai mencapai Rp123,41 juta atau turun 61,11% (yoy) dengan share 0,06%.

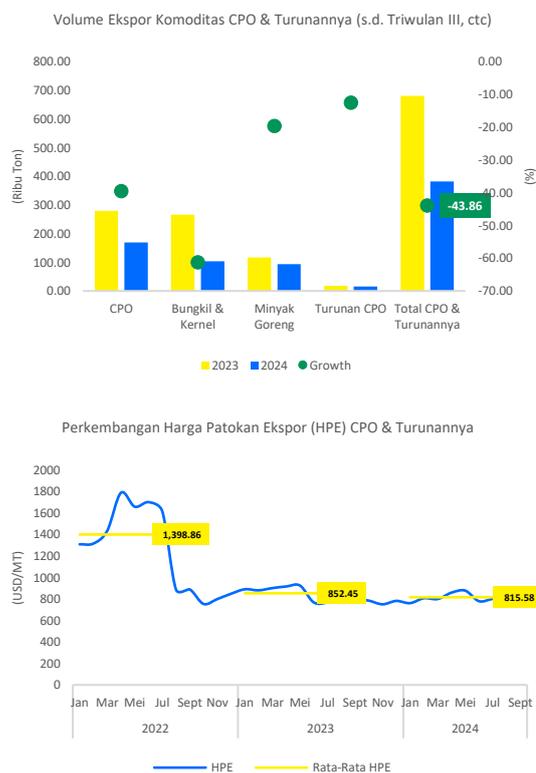
Grafik 2.3. Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea keluar selain mengalami kontraksi, capaiannya pun rendah dan diproyeksi tidak mencapai target. Capaian bea keluar hingga triwulan III baru mencapai 33% dipengaruhi oleh kontraksi aktivitas ekspor di Sumsel khususnya pada komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Hal ini disebabkan hanya komoditas tersebut yang menjadi sumber penerimaan bea keluar Sumsel, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 38/2024. Menurut Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, kinerja penerimaan bea keluar diproyeksi tidak mencapai target hingga akhir tahun, dan telah diusulkan ke kantor pusat DJBC terkait redistribusi target penerimaan bea keluar Sumsel sebagai upaya mitigasi.

Grafik 2.4. Perkembangan Volume dan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Meskipun dari sisi produksi komoditas CPO meningkat, aktivitas ekspornya masih berkontraksi. Berdasarkan rilis BPS Sumsel, produksi CPO dan Palm Kernel Sumsel naik 6,27% (yoy) pada triwulan III, namun volume ekspor produk CPO dan turunannya berkontraksi 43,86% (yoy), dari semula 681,30 ribu ton menjadi 382,50 ribu ton menurut Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur. Berdasarkan temuan BPS Sumsel di lapangan, hal tersebut terjadi karena beberapa perusahaan penghasil komoditas CPO di Sumsel merupakan anak perusahaan dari induk yang berasal dari daerah di luar Sumsel. Sehingga, produk CPO yang dihasilkan tidak diekspor

melalui Sumsel, namun dikirimkan ke daerah asal induk perusahaan. Selain itu, penurunan rata-rata Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk CPO sebesar 4,32% (yoy) dari USD852,44/MT menjadi USD815,58/MT juga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan volume ekspor CPO dan turunannya. Hal ini berujung pada penurunan penerimaan bea keluar di Sumsel hingga triwulan III 2024 dan menekan potensi penerimaan negara yang berasal dari komoditas CPO dan turunannya yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan ekspor wilayah Sumsel.

**Aktivitas impor Sumsel yang terus dalam tren pertumbuhan yang tinggi berdampak pada penerimaan bea masuk di Sumsel.** Pada triwulan III 2024, impor Sumsel tumbuh 42,83% (yoy) yang berimplikasi pada penerimaan bea masuk yang secara bruto tumbuh 2,63% (yoy). Namun demikian, meningkatnya restitusi dipengaruhi kebijakan fasilitas KITE khususnya terkait komoditas karet dan berdampak pada kinerja bea masuk yang secara netto mengalami sedikit penurunan sebesar 1,23% (yoy). Penerimaan bea masuk mencapai 69,52% dari target dan menjadi kontributor utama dengan *share* 70,69% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Sumsel hingga triwulan III 2024. Impor Sumsel utamanya didorong oleh aktivitas investasi yang dilakukan PT. OKI *Pulp & Paper Mills* yang melakukan impor barang modal berupa mesin untuk peningkatan kapasitas produksi. Hal ini tergambar dari komoditas mesin yang menjadi kontributor utama impor di Sumsel mencapai USD466,28 juta. Meskipun menjadi kontributor utama, impor komoditas mesin di Sumsel mayoritas tidak dikenakan bea masuk. Hal ini terjadi karena sesuai ketentuan pada PMK 188/2015 bahwa impor mesin untuk pengembangan industri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor.

Tabel 2.5. Realisasi Impor dan Bea Keluar Per Komoditas s.d. Triwulan III 2024

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	466.28	Serealialia	38.18
Reaktor, Turbin, Generator	326.60	Bahan Baku Karet	18.78
Mesin Perkakas	272.28	Mesin	14.72
Pupuk	62.62	Barang Dari Keramik	5.09
Bahan Baku Karet	54.53	Parts Alat Berat	3.54
Serealialia	53.70	Parts Mesin	3.43
Mcb, Stop Kontak, Tusuk Kontak	41.59	Alat Elektronik Lainnya	3.12
Kayu Kasar	36.49	Baja Lembaran Lapis	2.88
Generator	34.74	Produk Olahan Kimia	2.39
Tungku Dan Oven	29.03	Barang Lainnya Dari Besi Atau Baja	1.82

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

**Penerimaan bea masuk di Sumsel meningkat dikontribusikan dari peningkatan importasi komoditas serealialia dan bahan baku karet.** Pada tahun 2024, kuota impor beras di Sumsel adalah 105.000 ribu ton (Perum BULOG Sumsel-Babel), sementara hingga triwulan III 2024 sebanyak 84.856 ribu ton kuota telah direalisasikan oleh Perum BULOG Sumsel-Babel yang berkontribusi pada penerimaan bea masuk mencapai

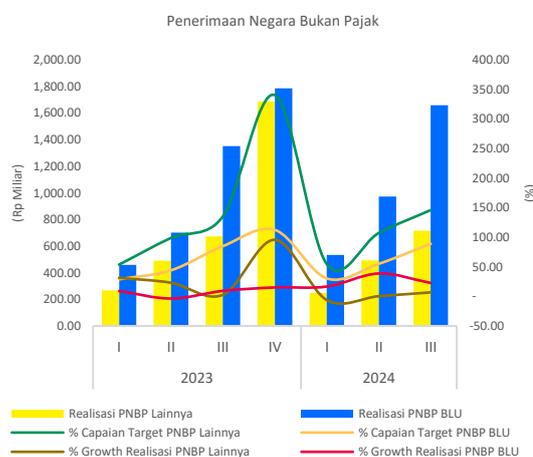
Rp38,18 miliar. Selain itu, peningkatan impor bahan baku karet juga turut bersumbangsih pada penerimaan bea masuk mencapai Rp18,78 miliar. Peningkatan impor bahan baku karet disebabkan penurunan produksi karet akibat wabah jamur putih dan kurangnya bahan baku karet dari lokal yang berkualitas sesuai kebutuhan produksi. Impor bahan baku karet di Sumsel utamanya untuk diolah dan diekspor kembali, sehingga sebagian besar mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

**Penerimaan cukai di Sumsel tidak ditargetkan dan utamanya berasal dari sanksi administrasi cukai (*ultimum remedium*).** Hingga triwulan III, penerimaan cukai mencapai Rp123,41 juta yang berasal dari sanksi administratif penindakan rokok (hasil tembakau) ilegal sebanyak 28.340 batang dan denda Minuman Mengandung Etil Alcohol (MMEA). Jumlah penerimaan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp317,37 juta yang mengindikasikan penurunan dalam peredaran rokok (hasil tembakau) dan MMEA ilegal di wilayah Sumsel.

### A.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh positif dipengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Badan Layanan Umum (BLU) maupun Kementerian/Lembaga (K/L).** Hingga triwulan III, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp2,37 triliun (100,65% dari target) atau tumbuh positif 75,71% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp1,65 triliun (88,78% dari target) dan tumbuh positif 22,67% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan *share* 69,28% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 30,18% dari total PNBP Sumsel. PNBP Lainnya mencatatkan penerimaan mencapai Rp715,89 miliar (107,04% dari target) dan tumbuh positif 0,27% (yoy).

Grafik 2.5. Realisasi Per Jenis PNBP Sumsel (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan menjadi faktor utama pendorong tumbuh positifnya PNBP BLU di Sumsel.** Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit yang bersumber dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang menjadi kontributor utama peningkatan PNBP BLU di Sumsel. Peningkatan pendapatan jasa layanan RSMH Palembang didorong oleh peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatannya. Secara kuantitas, hal ini terlihat dari peningkatan sebesar 87,11% (yoy) jumlah pasien RSMH Palembang yang terlayani semula 36.589 pasien menjadi 68.460 pasien. Peningkatan jumlah pasien terjadi hampir di seluruh kelas rawat, kecuali pada non-kelas yang mengalami

penurunan. Peningkatan kuantitas terjadi didorong oleh faktor peningkatan kualitas layanan.

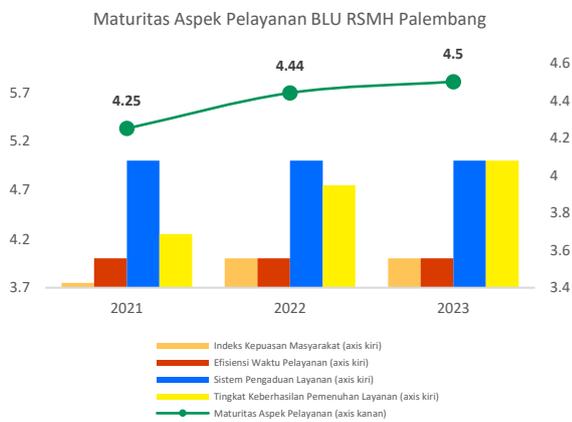
**Tabel 2.6. Jumlah Pasien Terlayani RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang s.d. Triwulan II (c-to-c)**

Kelas	2023	2024	Growth (%)
Di atas kelas I	3.114	3.086	-0,90
Kelas I	7.494	14.589	94,68
Kelas II	5.037	8.731	73,34
Kelas III	18.449	36.367	97,12
Non Kelas	2.495	5.687	127,94
Total	36.589	68.460	87,11

Sumber: Direktorat PPKBLU (diolah)

Secara kualitas, hal ini dapat tergambar dari nilai aspek pelayanan pada BLU *Maturity Rating* RSMH Palembang yang terus mengalami peningkatan. Setiap tahunnya dilakukan penilaian BLU *Maturity Rating* atas kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BLU *Integrated Online System* (BIOS), nilai maturitas aspek pelayanan pada RSMH Palembang yang mencapai nilai 4,5 untuk kinerja tahun 2023 (bobot tertinggi 5), lebih baik dari nilai maturitas di tahun 2022 (4,44) dan 2021 (4,25).

**Grafik 2.6. Penilaian BLU *Maturity Rating* Aspek Pelayanan RSMH Palembang**



Sumber: Direktorat PPKBLU (diolah)

Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jasa dari Kementerian Lembaga menjadi faktor utama pendorong tumbuh positifnya PNPB Lainnya di Sumsel. Pendapatan Jasa Kepelabuhanan yang bersumber dari Satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang menjadi kontributor utama peningkatan PNPB Lainnya. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi meningkatnya aktivitas bongkar muat dan bongkar muat *ship-to-ship* yang dikelola KSOP Kelas I Palembang. Selain itu, peningkatan PNPB pelayanan pertanahan bersumber dari kenaikan volume permintaan layanan pertanahan yang didorong adanya digitalisasi layanan melalui platform online (Sentuh Tanahku) yang mempercepat proses pengurusan.

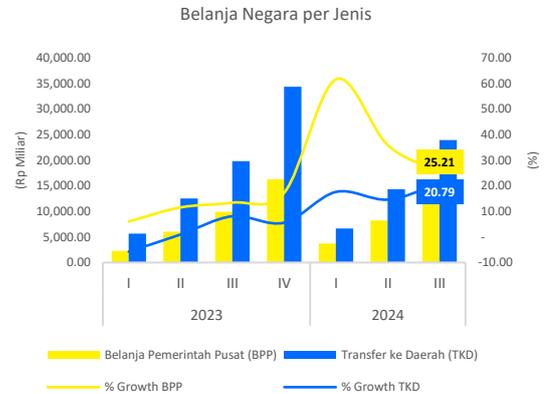
## A.2 Belanja Negara

Belanja negara yang tumbuh positif, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang juga menunjukkan tren peningkatan di Sumsel. Hingga triwulan III, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp36,34 triliun dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp12,40 triliun dan TKD Rp23,93 triliun. Baik dari BPP dan TKD menunjukkan kinerja yang positif dimana tumbuh 25,21% (yoy) dan 21,02% (yoy). Mencermati kondisi belanja negara

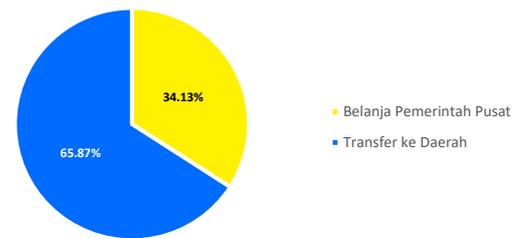
yang tumbuh positif, BPS mencatatkan bahwa konsumsi pemerintah di wilayah Sumsel tumbuh sebesar 10,48% (ctc) s.d triwulan III 2024. Berdasarkan catatan peristiwa yang dirilis

oleh BPS, bahwa terjadi peningkatan realisasi anggaran yang menjadi kontributor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) secara total sebesar 8,11% (yoy) pada triwulan III. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja BPP dan TKD di Sumsel. Selain itu, mengingat utamanya belanja daerah dibiayai dari TKD, maka belanja negara melalui BPP dan TKD berperan krusial dalam menggerakkan ekonomi Sumsel melalui PKP.

**Grafik 2.7. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Wilayah Sumatera Selatan (c-to-c)**



**Kontribusi Belanja Negara s.d. Triwulan III 2024**



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

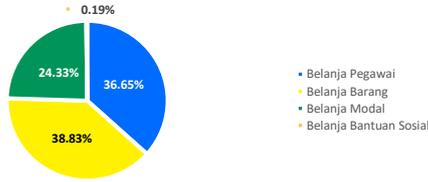
Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD hingga triwulan III di Sumsel yang memiliki *share* 65,87% dari total belanja negara atau mencapai Rp23,93 triliun. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 34,13% dari total belanja negara. Baik BPP maupun TKD, keduanya mencatatkan capaian belanja yang lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan BPP mencapai 59,06% dari pagu dimana tahun sebelumnya 58,35% dan TKD mencapai 75,04% dari pagu dimana tahun sebelumnya 57,48%. Baiknya capaian dan pertumbuhan belanja TKD diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk membiayai belanjanya dan melaksanakan program dan kegiatan di daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

### A.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Mencermati bahwa sebagian besar agenda dari alokasi utama BPP di Sumsel telah terlaksana hingga triwulan III, kinerja seluruh jenis BPP tumbuh positif. Agenda pemilu presiden dan legislatif, pembayaran kenaikan gaji ASN, Gaji 13, dan THR telah terlaksana hingga berakhirnya triwulan II 2024, diikuti dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak dan *progress* penyelesaian PSN hingga triwulan III. Hal ini menjadi pendorong utama dari tumbuh positifnya realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal di Sumsel. Sementara,

belanja bantuan sosial tumbuh positif dipengaruhi kenaikan penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah Sumsel. Melalui peningkatan belanja pegawai, barang, bantuan sosial, pemerintah pusat di Sumsel berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembentukan PKP. Sementara itu, peningkatan belanja modal berdampak terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumsel.

Grafik 2.8. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP dikontribusi dari belanja pegawai dan barang. Realisasi belanja pegawai berkontribusi 36,65% dari total BPP Sumsel. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang juga berkontribusi besar bagi total BPP Sumsel dengan *share* 38,83%. Sementara itu, belanja modal yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* tinggi cenderung masih relatif rendah yang berkontribusi 24,33% dari total BPP. Meskipun realisasi belanja modal tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi *progress* penyelesaian PSN namun capaiannya tergolong rendah dimana baru mencapai 44,70% dari pagu. Di sisi lain, belanja bantuan sosial berkontribusi 0,19% dari total BPP yang dipergunakan dalam rangka perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan di Sumsel.

Belanja pegawai Sumsel tumbuh positif dan berperan krusial mendukung peningkatan produktivitas ASN serta melanjutkan proses reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas maka kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan

tetap menjaga daya beli dan konsumsi ASN melalui pemberian kenaikan gaji pokok, gaji 13, dan THR. Realisasi belanja pegawai di Sumsel mencapai Rp4,55 triliun dan tumbuh positif 17,37% (yoy). Capaian dari belanja pegawai tersebut *on track* hingga triwulan III karena sudah mencapai 79,99% dari pagu, dimana lebih dari 75%. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai utamanya dipengaruhi pembayaran kenaikan gaji pokok ASN di tahun 2024 sebesar 8% sesuai Perpres 10/2024, pembayaran gaji 13 dan THR ASN sesuai PP 14/2024 (Komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100% di tahun 2024, dimana di 2023 dibayarkan 50%), serta meningkatnya pembayaran belanja pegawai PPPK yang dipengaruhi signifikansi pengangkatan PPPK pada kantor vertikal Kementerian/Lembaga di Sumsel.

Tabel 2.7. Kontributor Peningkatan Realisasi Belanja Pegawai s.d. Triwulan III (c-to-c)

Komponen (Rp Miliar)	2023	2024	Growth (%)
1. Kenaikan Gaji Pokok	1.600,11	1.746,29	9,14
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	866,47	952,14	9,89
- Belanja Gaji Pokok PNS	733,65	794,15	8,25
2. Pembayaran Gaji 13 dan THR	260,51	645,22	147,68
- THR	260,51	332,03	27,45
- Gaji 13	243,37	313,19	28,69
3. Pembayaran Belanja Pegawai PPPK	28,22	269,84	856,04
- Belanja Gaji Pokok PPPK	14,59	135,35	828,00
- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,82	79,13	1.060,57
- Belanja Uang Makan PPPK	2,73	21,07	671,60
- Lainnya (Tunj. Fungsional, Beras, Suami/istri, dll)	4,09	34,28	738,23

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Grafik 2.9. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat per Jenis (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Belanja barang Sumsel tumbuh positif dan berperan strategis mendukung kegiatan operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung program prioritas.** Realisasi belanja barang di Sumsel meningkat 21,54% (yoy) yang utamanya digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, pembayaran dukungan layanan kesehatan untuk penguatan SDM, dan pembayaran pelaksanaan program infrastruktur konektivitas. Hingga triwulan III, realisasi belanja barang mencapai Rp4,81 triliun atau 54,01% dari pagu. Pemanfaatan dari belanja barang utamanya digunakan untuk dukungan operasional kantor kementerian/lembaga yang ada di Sumsel, dan juga beberapa program prioritas yang antara lain untuk:

- a. KPU dan Bawaslu sebesar Rp944,06 Miliar (19,60% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk pembayaran pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan legislative mulai dari pemungutan dan penghitungan suara, pembayaran honorarium badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, dan PANTARLIH), pengadaan barang/jasa/logistik pemilu, pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu, serta persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di November 2024.
- b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp719,43 Miliar (17,18% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk mendukung layanan umum kesehatan dan layanan sarana internal, pembelian obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), fasilitasi pengelolaan manajemen proyek dan rekomendasi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pelayanan kanker terpadu (IsDB) pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- c. Kementerian PUPR sebesar Rp263,38 Miliar (6,29% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk preservasi pemeliharaan rutin/rehabilitasi/rekonstruksi jalan dan jembatan, pembiayaan *availability payment* (AP) KPBU Jalintim Sumsel.
- d. Kementerian Perhubungan sebesar Rp176,15 Miliar (4,20% dari realisasi belanja barang), utamanya untuk layanan angkutan jalan perintis (DAMRI), penyelenggaraan layanan perintis LRT Sumsel (subsidi ongkos/angkutan LRT), serta operasi prasarana perkeretaapian.

**Capaian realisasi belanja barang Sumsel relatif masih rendah hingga triwulan III.** Realisasi belanja barang baru mencapai 54,01% dari pagu, masih jauh dibawah target penyerapan 70% hingga triwulan III jika mengacu pada aspek penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 58,88% dari pagu. Capaian rendah tersebut dipengaruhi oleh terkendalanya pekerjaan IMO (*Infrastructure, Maintenance, and Operation*) di Satker Balai Teknis Perkeretaapian senilai Rp400 miliar yang masih dalam proses kontrak dengan PT. Kereta Api Indonesia karena menunggu terbitnya dasar hukum untuk penandatanganan kontrak. Selain itu, masih rendahnya realisasi pada satker-satker yang mendapatkan alokasi DIPA Tugas Pembantuan (TP) juga menjadi faktor penahan capaian realisasi belanja barang di Sumsel. Hal ini disebabkan alokasi DIPA baru tersedia di pertengahan tahun anggaran karena proses pembukaan blokir pagu anggaran dan adanya proses penyesuaian Pejabat Pembendaharaan.

**Belanja modal Sumsel tumbuh positif dan dipertajam pemanfaatannya untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.** Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung

transformasi ekonomi tersebut, realisasi belanja modal Sumsel meningkat 46,64% (yoy) untuk mendorong peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan) dan konektivitas di Sumsel. Hingga triwulan III, realisasi belanja modal mencapai Rp3,01 triliun atau 47,95% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja modal di Sumsel utamanya dipengaruhi meningkatnya belanja pada program infrastruktur konektivitas, meningkatnya belanja pada program ketahanan sumber daya air, serta meningkatnya belanja pada program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pendidikan tinggi. Pemanfaatan dari belanja modal hingga triwulan III antara lain untuk:

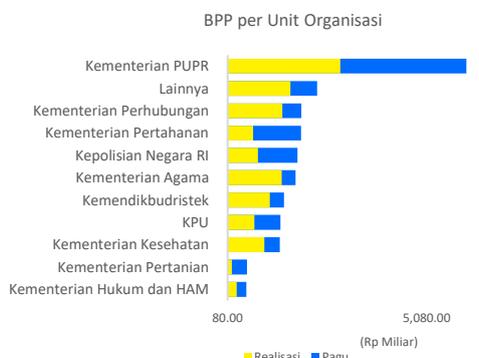
- a. Kementerian PUPR sebesar Rp2,26 triliun (75,08% dari realisasi belanja modal), utamanya dikontribusikan dari *progress* penyelesaian PSN di Sumsel yaitu pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino yang mencapai Rp1,10 triliun dan pembangunan/ operasional/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, juga dikontribusikan dari pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Rp472,73 miliar, serta pembangunan Irigasi Lematang Rp158,68 miliar, dan pembangunan Irigasi Lempuing sebesar Rp54,66 miliar.
- b. Kementerian Perhubungan sebesar Rp301,40 miliar (10,01% dari realisasi belanja modal), utamanya dikontribusikan dari Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan- Tanjung Enim dan penanganan daerah rawan dan jembatan lintas Prabumulih-Tarahan, pengembangan Bandar Udara Silampari (Lubuk Linggau), Pekonserai, dan Atung Bungsu (Pagar Alam).
- c. Kememparekraf sebesar Rp98,66 miliar (3,27% dari realisasi belanja modal), untuk prasarana bidang pendidikan tinggi pada Politeknik Pariwisata Palembang.
- d. Kemendikbudristek sebesar Rp48,79 miliar (1,62% dari realisasi belanja modal), untuk realisasi penerimaan pendaanaan BOPTN Vokasi pada Politeknik Sriwijaya
- e. Kementerian Agama sebesar Rp41,67 miliar (1,38% dari realisasi belanja modal), untuk pembangunan gedung pendidikan tinggi yang dibiayai SBSN pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta pengadaan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada UIN Raden Fatah Palembang.

**Capaian realisasi belanja modal Sumsel masih rendah hingga triwulan III.** Realisasi belanja modal baru mencapai 47,95% dari pagu, masih jauh dibawah target penyerapan 70% hingga triwulan III jika mengacu pada aspek penilaian IKPA yang baik. Capaian rendah tersebut dipengaruhi oleh realisasi pada satker-satker dengan alokasi terbesar pada belanja modal seperti pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemendikbudristek, dan Kementerian Kesehatan yang baru akan dibayarkan pada triwulan IV karena terkait dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan penyelesaian kontraknya. Selain itu, faktor lainnya berkaitan dengan beberapa alokasi belanja modal yang terkendala dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga harus dilakukan lelang ulang atau anggarannya akan dialihkan yang hingga triwulan III masih dalam proses revisi.

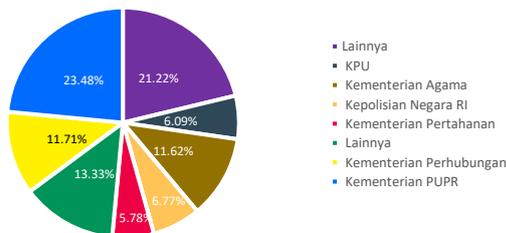
**Belanja bantuan sosial Sumsel tumbuh positif dan terus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.** Hingga triwulan II, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp14,06 miliar (83,21% dari pagu) dan tumbuh positif 90,89% (yoy). Capaian realisasi belanja bantuan sosial telah optimal dan *on track* karena telah berada diatas target penyerapan 75% dari pagu, sesuai aspek penilaian IKPA. Pertumbuhan belanja bantuan sosial terjadi

dipengaruhi penyaluran bantuan pendidikan KIP Kuliah semester genap di 2024 yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, KIP Kuliah semester genap baru tersalur di bulan Oktober dan November, sementara di tahun 2024 sudah tersalur di September 2024 karena percepatan proses verifikasi kelayakan lanjutan penerima KIP Kuliah di UIN Raden Fatah Palembang. Hingga triwulan III 2024, KIP Kuliah telah tersalur kepada 1.729 mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin pada Universitas Islam Raden Fatah Palembang dengan *unit cost* Rp6,6 juta/semester per mahasiswa atau mencapai Rp11,41 miliar. Selain itu pertumbuhan belanja bantuan sosial juga didorong penyaluran asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan bantuan peralatan/sarana oleh Sentra Budi Perkasa Palembang untuk penyandang disabilitas yang telah tersalur mencapai Rp3,76 miliar. Utamanya dikontribusi dari penyaluran atensi untuk penyandang disabilitas yang meningkat 32,67% (yoy) dalam bentuk bansos uang/barang mencapai dan bantuan peralatan/sarana untuk penyandang disabilitas berupa motor roda tiga, alat bantu dengar, kruk/tongkat, walker, dan kursi roda.

Grafik 2.10. Realisasi dan Kontribusi BPP per Unit Organisasi



Kontribusi BPP Per Unit Organisasi



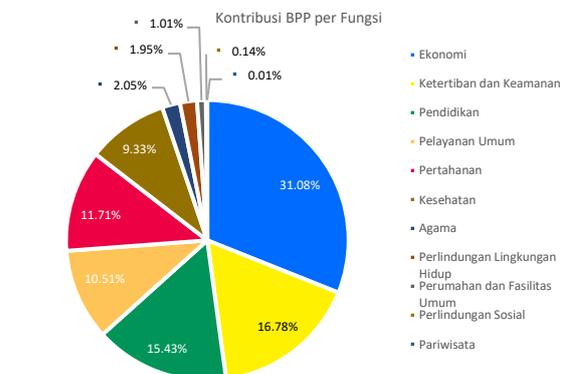
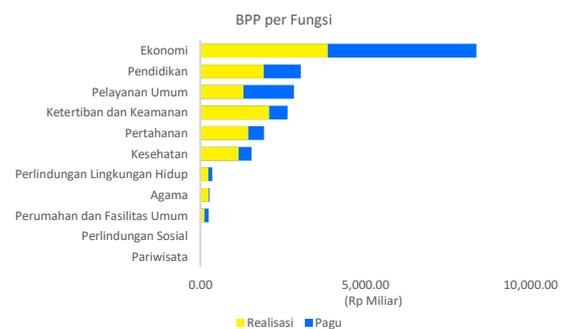
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel utamanya dikontribusi oleh aktivitas belanja pada Kementerian PUPR. Realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai Rp1,91 triliun atau menyumbang 23,48% dari total BPP Sumsel hingga triwulan III. Meskipun menjadi kontributor utama, capaian belanja Kementerian PUPR relatif rendah dengan persentase 47,94% dari pagu dipengaruhi oleh utamanya realisasi belanja pada Kementerian PUPR adalah berupa pekerjaan konstruksi dengan penyelesaian kontrak hingga akhir tahun, sehingga baru akan signifikan terealisasi di triwulan IV 2024. Ditinjau dari capaiannya, aktivitas belanja pada Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan kinerja yang menurun disebabkan peningkatan pagu atas hibah daerah dalam rangka pilkada 2024 di Sumsel. Belanja pada tiga unit organisasi tersebut utamanya akan meningkat signifikan di triwulan IV 2024 dimana digunakan untuk dukungan penyelenggaraan pilkada yang

diselenggarakan pada 27 November 2024 dalam proses konsolidasi demokrasi di Sumsel.

Berdasarkan fungsi, BPP di Sumsel utamanya dikontribusi dari belanja fungsi ekonomi. Realisasi belanja fungsi ekonomi mencapai Rp3,85 triliun atau menyumbang 31,08% dari total BPP Sumsel hingga triwulan III. Meskipun menjadi kontributor utama, capaian belanja fungsi ekonomi relatif rendah dengan persentase capaian 46,13% dari pagu dipengaruhi serapan pada belanja subfungsi pengairan dan transportasi yang belum optimal. Hal ini disebabkan belanja subfungsi pengairan berkaitan dengan beberapa PSN seperti Bendungan Tiga Dihaji yang masih dalam proses pembangunan, serta Daerah Irigasi Lempuing yang baru terdapat realisasi belanja 28,30% dari pagu hingga triwulan III 2024. Ditinjau dari capaiannya, realisasi belanja hingga triwulan III pada fungsi agama, kesehatan, ketertiban dan keamanan, pelayanan umum, perlindungan sosial, serta pertahanan menunjukkan kinerja yang *on track* karena telah mencapai lebih dari 70% pagu. Belanja pada fungsi agama mencapai Rp254,07 miliar utamanya dilaksanakan untuk dukungan manajemen dalam rangka peningkatan kehidupan beragama, pelayanan keagamaan lainnya, dan litbang. Selanjutnya belanja pada fungsi kesehatan mencapai Rp1,15 triliun utamanya digunakan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, pelayanan kesehatan dan JKN, pengawasan obat dan makanan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dari sisi belanja pada fungsi pelayanan umum, realisasinya mencapai Rp1,30 triliun utamanya digunakan untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, penyediaan informasi statistik, pemeriksaan keuangan negara, pengawasan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, perencanaan pembangunan nasional, kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN, penyiaran publik, pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara dan risiko, serta pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.

Grafik 2.11. Realisasi dan Kontribusi BPP per Fungsi

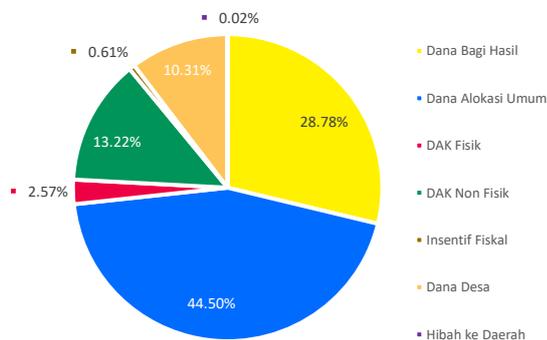


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

## A.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumsel tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hingga triwulan III, realisasi TKD mencapai Rp23,93 triliun dan tumbuh positif 14,59% (yoy). Dari sisi capaiannya pun mencatatkan kinerja yang lebih baik dimana hingga triwulan III 2024 telah mencapai 75,04% dari pagu sementara di periode tahun lalu mencapai 57,48% dari pagu. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemda, pemdes, maupun unit terkait pada penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik. Selain itu, meningkatnya jumlah penerima insentif fiskal tahun 2024 di Sumsel untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dibandingkan tahun 2023 menjadi pendorong lebih tingginya realisasi insentif fiskal hingga triwulan III.

Grafik 2.12. Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran DAU. Realisasi DAU mencapai 44,50% dari total realisasi TKD Sumsel hingga triwulan III. Hal ini lumrah terjadi sebab alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak akan berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran DAU *block grant* yang dilakukan setiap bulan sesuai rekomendasi salur sebesar 1/12 dari pagu tahunan, menjadi pendorong realisasi DAU lebih cepat dari jenis TKD lainnya yang lebih dipengaruhi oleh kecepatan pemda/pemdes dalam memenuhi syarat salur sesuai batas waktu.

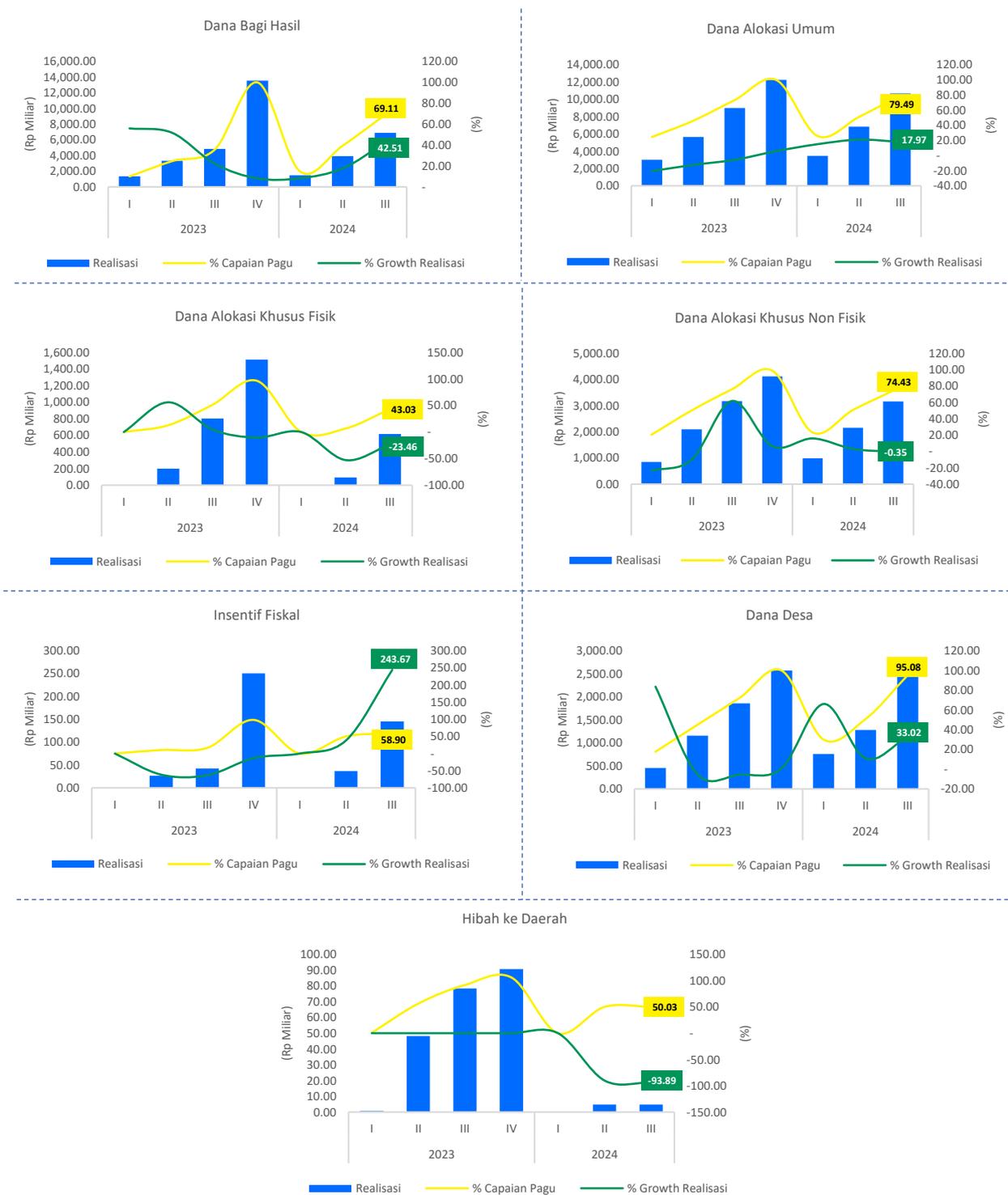
Penyaluran DBH Sumsel tumbuh positif dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance*, menanggulangi eksternalitas negatif, serta meningkatkan pemerataan di Sumsel. Hingga triwulan III, realisasi DBH mencapai Rp6,89 triliun (69,11% dari pagu) dan meningkat 42,51% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 35,70%. Sebagai wilayah dengan SDA melimpah dan beberapa kabupaten/kota merupakan daerah penghasil, peningkatan realisasi DBH Sumsel dikontibusi oleh lebih tingginya penyaluran DBH SDA Minerba – royalti yang mencapai Rp3,39 triliun atau tumbuh positif 118,43% (yoy). Selain itu, peningkatan DBH juga dipengaruhi meningkatnya DBH PBB migas, DBH PBB Panas Bumi, DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, DBH Sawit, serta DBH SDA Panas Bumi. Dilihat dari strukturnya, kontribusi realisasi DBH Sumsel hingga triwulan III 2024 utamanya berasal dari DBH SDA Minerba-royalti (50,77%), DBH PBB Migas bagian daerah kabupaten/kota (21,65%), dan DBH SDA Gas Bumi (12,43%).

Meskipun penyaluran DBH dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, terdapat isu pelaksanaan penyaluran DBH yang terjadi di Sumsel. Pertama, permasalahan keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat antara pemda dan kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak di wilayahnya berakibat pada penundaan salur DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 OP, Panas Bumi dan PBB Migas). Beberapa penyebab permasalahan ini yaitu belum optimalnya implementasi kanal 7020 bagi setoran pajak pemda, kurang kooperatifnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses rekonsiliasi, maupun kebijakan kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayahnya yang mengharuskan penyelesaian rekonsiliasi pajak secara berurutan. Beberapa pemda yang mengalami permasalahan keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, serta Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) rendah bahkan tidak tersalur di beberapa pemda. Hal ini disebabkan alokasinya yang tidak terlalu besar, namun DBH ini termasuk DBH *Earmark* sehingga apabila pemda akan melaksanakan kegiatan peruntukan yang dibiayai dari CHT untuk kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan, maka pemda perlu mengalokasikan dana pendamping tambahan dari APBD. Ketiga, kendala teknis pada fitur aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI karena kesalahan input data pajak sehingga berakibat selisih saat rekonsiliasi dengan KPP. Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh pada efektivitas penyaluran DBH di Provinsi Sumsel yang digunakan untuk mendukung pendanaan APBD.

Penyaluran DAU Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk menjaga pemerataan keuangan daerah dan memperkuat kebijakan penggunaan yang telah ditentukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan mendukung penggalangan PPPK di Sumsel. Hingga triwulan III, realisasi DAU mencapai Rp10,65 triliun dan meningkat 17,97% (yoy). Capaian realisasinya pun mencatatkan kinerja yang lebih baik dimana tercapai 79,49% dari pagu, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 73,69% dari pagu. Pertumbuhan positif realisasi DAU utamanya didorong lebih tingginya penyaluran DAU *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) mencapai Rp8,57 triliun atau naik 25,84% (yoy) sebagai dampak dari kebijakan *hold harmless* dimana alokasi DAU terus meningkat. Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh lebih cepatnya tersalur DAU *specific grant* (ditentukan penggunaannya) terkhusus untuk penggalangan formasi PPPK di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran DAU Penggalangan formasi PPPK hingga triwulan III 2024 mencapai Rp245,19 miliar.

Meskipun penyaluran DAU dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, terdapat isu pelaksanaan penyaluran DAU yang terjadi di Sumsel. Kendala koneksi aplikasi SIPD menjadi faktor penahan dalam perekaman realisasi penyerapan, sehingga menghambat proses kelengkapan syarat salur DAU. Selain itu, terjadi gagal salur DAU pendanaan kelurahan karena kesulitan kantor kelurahan dalam merealisasikan dana tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena masih terbatasnya kapasitas SDM di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, adanya ketakutan kantor kelurahan terhadap kemungkinan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi faktor penahan kesulitan merealisasikan dana tersebut, sehingga pada akhirnya terjadi gagal salur DAU Pendanaan Kelurahan di salah satu pemda yaitu Kota Palembang.

Grafik 2.13. Perkembangan Transfer ke Daerah per Jenis (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Penyaluran DAK Fisik Sumsel terkontraksi dipengaruhi keterlambatan terbitnya aturan teknis pengelolaan DAK Fisik.** Hingga triwulan III, realisasi DAK Fisik mencapai Rp615,43 miliar (43,03% dari pagu) dan turun 23,46% (yoy). Terlambatnya terbit peraturan pengelolaan DAK Fisik yang baru berlaku akhir April 2024 menjadi faktor penyebab capaian realisasi DAK Fisik masih rendah dan juga mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, faktor-faktor penahan lainnya seperti penyelesaian perekaman dan persetujuan data kontrak yang mendekati batas akhir, penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan KB yang sebagian besar menggunakan mekanisme sekaligus

rekomendasi, penyampaian syarat salur mendekati syarat salur, belum adanya norma waktu reviu dokumen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta koordinasi internal pemda dan peran BPKAD yang kurang optimal menjadi penghambat realisasi penyaluran DAK Fisik hingga triwulan III 2024. Untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, DAK Fisik tematik untuk Kawasan sentra produksi pangan telah tersalur untuk bidang pertanian sebesar Rp10,81 miliar, bidang jalan sebesar Rp28,93 miliar, bidang irigasi sebesar Rp1,19 miliar, serta bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp12,78 miliar. Selain itu, untuk mendukung penguatan daya saing usaha, realisasi

DAK Fisik tematik pengembangan *food estate* telah tersalur untuk bidang irigasi sebesar Rp8,06 miliar, bidang jalan sebesar Rp77,23 miliar, bidang pertanian sebesar Rp9,81 miliar, dan bidang kehutanan sebesar Rp85,35 juta. Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, DAK Fisik Sumsel telah tersalur ke bidang pendidikan sebesar Rp210,50 miliar untuk pengembangan PAUD, SD, SMP dan perpustakaan, serta pada bidang kesehatan dan KB sebesar Rp113,79 miliar. Sementara itu, sisanya digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas serta elektrifikasi di perdesaan.

**Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif dan digunakan untuk bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru, serta peningkatan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer.** Hingga triwulan III, realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp3,16 triliun (74,43% dari pagu) dan sedikit menurun 0,35% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi sebagian kecil satuan pendidikan belum salur BOSP tahap II dikarenakan permasalahan administrasi (penyampaian laporan penyerapan dari satuan pendidikan ke Kemendikbudristek). Selain itu, masih terdapat retur dana BOSP dikarenakan rekening inaktif/dormant, khususnya rekening satuan pendidikan pada BPD Sumsel Babel juga menjadi permasalahan. Adanya penyalahgunaan dana BOSP juga menjadi faktor penahan, dimana terdapat beberapa satuan pendidikan yang terindikasi penyalahgunaan dana BOSP dan direkomendasikan APIP untuk menyetorkan kembali ke kas negara. Hingga triwulan III 2024, DAK Non Fisik Sumsel telah tersalur untuk BOSP sebesar Rp1,85 triliun, DAK Non Fisik lainnya diantaranya untuk tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan ASN daerah, BOK Dinas, BOKB, dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil, dan dana fasilitasi penanaman modal yang mencapai Rp1,66 triliun. Selain itu, DAK Non Fisik Sumsel juga telah tersalur untuk BOK Puskesmas sebesar Rp210,72 miliar.

**Penyaluran Insentif Fiskal tumbuh positif dipengaruhi meningkatnya jumlah pemda penerima insentif fiskal di Sumsel untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.** Hingga triwulan III, realisasi insentif fiskal mencapai Rp145,20 miliar (58,90% dari pagu) dan tumbuh positif 243,67%. Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah pemda di Sumsel yang mendapatkan penghargaan kinerja tahun sebelumnya dimana di tahun 2023 berjumlah 2, kemudian menjadi 8 pemda di tahun 2024. Adapun pemda yang mendapatkan insentif fiskal atas baiknya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, kinerja pelayanan dasar, kinerja dukungan fokus kebijakan nasional, kinerja sinergi kebijakan pemerintah adalah Kab. Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Banyuasin, dan Kota Prabumulih, serta Lubuk Linggau. Selain itu, atas kinerja tahun anggaran berjalan, terdapat 3 pemda di Sumsel yang memperoleh insentif fiskal atas kinerja dalam pengendalian inflasi tahap I yaitu Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Banyuasin. Total sebesar Rp18,20 miliar adalah pagu insentif fiskal atas kinerja pengendalian fiskal, dan sebesar Rp9,1 miliar (50%) telah salur pada triwulan III 2024. Selain kinerja atas pengendalian inflasi, terdapat juga insentif fiskal atas kinerja kesejahteraan masyarakat yang diberikan kepada 14 pemda di Sumsel dengan total sebesar Rp154,83 miliar dan sebesar Rp77,41 miliar (50%) sudah tersalur pada triwulan III 2024.

**Penyaluran Dana Desa Sumsel tumbuh positif dan terakselerasi sejak awal tahun 2024.** Hingga triwulan III, realisasi dana desa telah mencapai Rp2,46 triliun (95,08% dari pagu) dan tumbuh positif 33,02% (yoy). Hal ini didorong oleh perubahan kebijakan penyaluran dana desa di 2024 yang disalurkan dalam 2 tahap, dimana di tahun sebelumnya disalurkan dalam 3 tahap. Selain itu, faktor utamanya juga didorong oleh desa-desa di Sumsel lebih cepat menyampaikan syarat salur sejak awal tahun 2024. Penyaluran dana desa berjalan secara optimal di setiap tahapan mulai dari tahap I, II, hingga tambahan dana desa di Sumsel. Dari 2.855 desa yang mendapatkan dana desa, sebanyak 566 desa berkinerja baik dan memperoleh insentif/ tambahan dana desa dengan total mencapai Rp73,49 miliar.

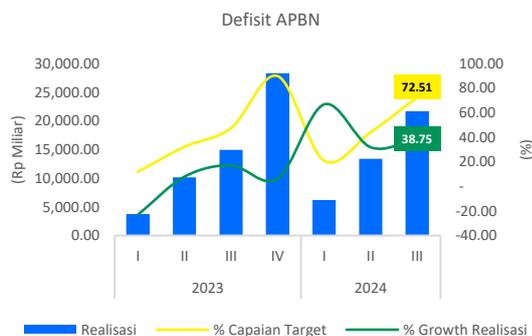
**Meskipun penyaluran dana desa dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren positif, terdapat isu pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi di Sumsel.** Keterjadian gagal salur dana desa terjadi di Sumsel dalam 5 tahun terakhir dengan faktor yang didominasi oleh kasus hukum penyalahgunaan dana desa. Pada tahun 2024, terdapat satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dipastikan gagal salur dana desa karena kasus hukum (penyalahgunaan dana desa). Selain itu, beberapa desa lainnya juga berpotensi gagal salur karena permasalahan sengketa dengan Badan Permusyawaratan Desa, sedang dalam pemeriksaan audit inspektorat daerah, maupun kepala desa yang menghilang sehingga tidak dapat memenuhi syarat salur tahap II. Keterlambatan penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa juga ditemui kendala disebabkan desa menunggu alokasi definitif dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD ditetapkan kepala daerah. Keraguan desa menggunakan pagu ADD proyeksi, mengakibatkan penyusunan APBDesa terlambat dan menjadi penghambat akselerasi penyaluran dana desa pada desa-desa tersebut.

**Hibah ke Daerah Sumsel menurun dipengaruhi oleh alokasinya yang menurun dalam mendukung pembangunan fisik dan layanan publik untuk peningkatan layanan infrastruktur dasar.** Hingga triwulan III, realisasi hibah ke daerah mencapai Rp4,79 miliar (50,03% dari pagu) dan turun 90,07% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pagu hibah ke daerah di Sumsel karena *nationwide water hibah program* telah selesai di tahun 2023 untuk proyek air minum perkotaan (AMK) dan air minum pedesaan (AMD) sehingga tidak dialokasikan lagi pada tahun 2024. Pagu Hibah ke daerah tahun 2024 di Sumsel digunakan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ *Palembang City Sewerage Project* (PCSP) yang dibiayai dari hibah luar negeri dari pemerintah Australia dan hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni). Hingga triwulan III, hibah ke daerah di Sumsel telah terselesaikan untuk membiayai program instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang yang mencatatkan realisasi Rp4,79 miliar. Namun demikian, sisanya terkait hibah sanitasi untuk air limbah setempat dan terpusat yang berasal dari penerimaan dalam negeri (Rupiah Murni) s.d. triwulan III 2024 belum terdapat realisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan sanitasi untuk air limbah tersebut belum selesai dilaksanakan. Secara prosedur, hibah ke daerah bersifat *reimbursement* sehingga pemerintah daerah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (*prefinancing*), kemudian setelah kegiatan selesai dan diverifikasi teknis oleh K/L barulah dapat diajukan *reimbursement* oleh daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

### A.2.3 Surplus/Defisit

Defisit APBN Sumsel tumbuh positif dan diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Hingga triwulan III, defisit APBN Sumsel tercatat mencapai Rp21,67 triliun (72,51% dari target) atau tumbuh 38,75% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif dimana kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dan TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan terus diakselerasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan akselerasi transformasi ekonomi di Sumsel.

Grafik 2.14. Perkembangan Defisit APBN Sumsel (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### A.2.4 Proyeksi Realisasi APBN

Proyeksi pendapatan negara di Sumatera Selatan akan melewati target di akhir tahun 2024. Berdasarkan hasil proyeksi realisasi pendapatan negara *ontrack* tercapai di setiap triwulannya. Dari masing-masing jenis pendapatan negara, pendapatan pajak yang di proyeksi melampaui target yaitu 101,66%. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang menunjukkan tren positif dan kecenderungan setoran pajak yang akan menumpuk di akhir tahun. Untuk penerimaan Pajak dan Bea Cukai diproyeksikan tercapai target 100% s.d akhir tahun 2024. Pendapatan bea masuk di dorong oleh meningkatnya aktivitas impor di Sumsel sampai dengan akhir tahun. Untuk PNBP diproyeksikan mengalami peningkatan karena perbaikan tata kelola pada BLU Rumah Sakit dan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan untuk dapat menaikkan UKT (Uang Kuliah Tunggal).

Kinerja Belanja Negara diproyeksikan *ontrack* sampai dengan akhir tahun 2024. Belanja Pemerintah Pusat diproyeksi akan mencapai 96,45%, didorong oleh realisasi belanja untuk kelanjutan proses penuntasan PSN Jalan Tol Simpang Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Daerah Irigasi Lematang dan Jaringan Daerah Irigasi Lempuing di Sumsel serta pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024. Untuk penyaluran Transfer ke Daerah diproyeksi akan mencapai 96,91% di akhir tahun 2024. Hal tersebut didorong oleh kebijakan penyaluran TKD yang dilakukan melalui KPPN sehingga proses koordinasi dan kerja sama antara pemda sudah semakin baik dan mengurangi potensi adanya gagal salur TKD.

Tabel 2.8. Proyeksi Realisasi APBN Sumsel 2024

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	Pagu	s.d. Triwulan III		s.d. Triwulan IV	
		Realisasi	%	Proyeksi	%
<b>Pendapatan Negara</b>	23.009.32	14.664.69	63.73	23.345.26	101.46
Penerimaan Pajak	20.273.97	12.093.86	59.65	20.610.52	101.66
Kepabeanan dan Cukai	378.84	199.05	52.54	378.84	100
PNBP	2.356.52	2.371.78	100.65	2.356.52	100
<b>Belanja Negara</b>	52.903.74	36.342.28	68.70	51.025.66	96.44
Belanja Pemerintah Pusat	21.001.62	12.402.99	59.06	20.102.75	95.72
Transfer Ke Daerah	31.902.12	23.939.29	75.04	30.916.35	96.91
<b>Surplus/Defisit</b>	-29.894.42	-21.677.59	72.51	-27.718.10	92.57

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

## B. Pelaksanaan APBD Sumsel

Alokasi APBD Sumsel 2024 mengalami perubahan di triwulan III. Terjadi peningkatan alokasi pagu dari sisi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2024. Pendapatan daerah terjadi kenaikan target sebesar 12,90 % dari target awal, kenaikan tertinggi dikarenakan adanya peningkatan target penerimaan retribusi sebesar 28,91% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 29,40% jika dibandingkan dengan target awal. Di sisi belanja daerah terjadi peningkatan alokasi sebesar 13,92% dibandingkan dengan pagu awal, peningkatan alokasi pagu terbesar terdapat pada pagu belanja modal sebesar 48,76%. Perubahan alokasi pagu APBD ini lebih mendekati amanah UU HKPD bahwa alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah.

Kinerja APBD di Sumsel tetap tumbuh positif hingga triwulan III 2024, utamanya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur di wilayah Sumsel dan pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Pendapatan dan belanja daerah sampai dengan bulan September 2024 menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi APBD Sumsel mencatatkan surplus dimana pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, sedangkan pada sisi belanja daerah terjadi pertumbuhan pada hampir seluruh jenis belanja. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa realisasi belanja daerah secara agregat masih berada di posisi 53,62%, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 54,94%.

Tabel 2.9. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

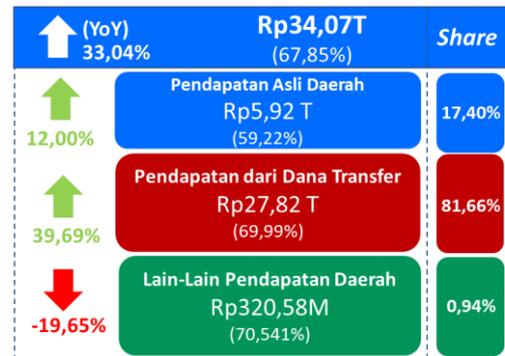
I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	40,968.55	25,612.03	62.52%	50,220.88	34,075.16	67.85%	33.04%
Pendapatan Asli Daerah	9,701.62	5,293.17	54.56%	10,011.25	5,928.18	59.22%	12.00%
Pajak daerah	6,527.93	3,939.02	60.34%	6,805.05	4,294.22	63.10%	9.02%
Retribusi daerah	227.56	75.77	33.29%	311.80	107.29	34.41%	41.61%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	370.40	394.72	106.57%	428.37	335.71	78.37%	-14.95%
Lain-lain PAD yang sah	2,575.73	883.65	34.31%	2,466.03	1,190.96	48.29%	34.78%
Pendapatan Transfer	30,522.34	19,919.89	65.26%	39,755.16	27,826.40	69.99%	39.69%
Transfer Pemerintah Pusat	28,631.67	18,317.84	63.98%	35,240.07	25,530.61	72.45%	39.38%
Transfer Antar Daerah	1,890.67	1,602.06	84.73%	4,515.09	2,295.80	50.85%	43.30%
Lain-lain Pendapatan yang sah	744.58	398.97	53.58%	454.47	320.58	70.54%	-19.65%
Pendapatan Hibah	84.74	51.42	60.68%	53.21	7.60	14.28%	-85.22%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	659.85	347.55	52.67%	401.26	312.98	78.00%	-9.95%
Belanja Daerah	41,491.35	22,796.48	54.94%	51,864.99	27,809.39	53.62%	21.99%
Belanja Operasi	26,824.06	14,937.19	55.69%	31,430.91	18,014.49	57.31%	20.60%
Belanja Pegawai	14,401.81	8,798.20	61.09%	15,841.45	10,099.45	63.75%	14.79%
Belanja Barang dan Jasa	11,272.76	5,658.39	50.20%	13,331.62	6,380.48	47.86%	12.76%
Belanja Bunga	80.33	41.21	51.30%	33.99	22.50	66.19%	-45.40%
Belanja Subsidi	14.58	9.33	63.97%	19.46	11.50	59.07%	23.28%
Belanja Hibah	1,019.58	414.16	40.62%	2,130.55	1,468.98	68.95%	254.69%
Belanja Bantuan sosial	35.01	15.91	45.44%	73.84	31.59	42.78%	98.55%
Belanja Modal	6,863.53	3,608.81	52.58%	11,234.71	4,058.09	36.12%	12.45%
Belanja Tidak Terduga	123.08	3.00	2.44%	320.21	10.27	3.21%	242.44%
Belanja Transfer	7,680.67	4,247.49	55.30%	8,879.16	5,726.54	64.49%	34.82%
Belanja Bagi Hasil	2,034.24	1,677.48	82.46%	2,095.71	1,752.14	83.61%	4.45%
Belanja Bantuan Keuangan	5,646.43	2,570.00	45.52%	6,783.45	3,974.40	58.59%	54.65%
Surplus/Defisit	-522.79	2,815.54	-538.56%	-1,644.11	6,265.77	-381.10%	122.54%
Pembiayaan	522.79	2,664.91	509.74%	1,643.75	1,852.24	112.68%	-30.50%
Penerimaan Pembiayaan	1,412.68	3,103.57	219.69%	1,999.39	2,054.42	102.75%	-33.80%
Pengeluaran Pembiayaan	889.88	438.66	49.29%	355.64	202.18	56.85%	-53.91%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		5,480.45			8,118.01		48.13%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### B.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif didorong realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan III 2024, realisasi pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp34,07 triliun atau telah mencapai 67,85% dari target APBD 2024. Capaian tersebut lebih tinggi Rp8,46 triliun dari periode yang sama tahun lalu dengan kontributor utamanya adalah pendapatan transfer pemerintah pusat (81,66%) dan Pendapatan Asli Daerah (17,40%).

Grafik 2.15. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah

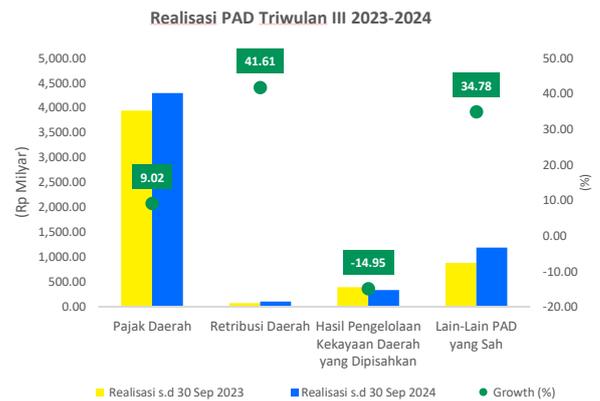


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah tumbuh sebesar 33,40% (yoy), dimana dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

sejak awal tahun, selain itu pertumbuhan ekonomi di Sumsel turut mempunyai andil dalam hal ini.

Grafik 2.16. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan Asli Daerah tumbuh positif dampak dari pergerakan ekonomi masyarakat yang tumbuh. Realisasi PAD tercatat Rp5,92 triliun atau 59,22% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 17,40% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan III 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi PAD tumbuh 12,00% (yoy) yang dipengaruhi pajak daerah sebagai kontributor utama PAD. Pertumbuhan pajak daerah didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 81,9%, hal tersebut dikarenakan batas pembayaran PBB paling lambat pada tanggal 30

September 2024. Meningkatnya penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan ini menunjukkan adanya pembangunan yang meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan dorongan kepada peningkatan PAD di wilayah Sumatera Selatan karena kebijakan pemutihan pajak yang diberlakukan oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan mulai tanggal 14 Agustus 2024 lalu. Namun, secara pencatatan menunjukkan kontraksi pada realisasi Pajak Kendaraan Bermotor s.d triwulan III 2024 sebesar (-1,29%) (yoy). Hal tersebut dikarenakan perbedaan pengakuan realisasi dengan menggunakan aplikasi SIPD RI. Pada SIPD RI, penerimaan dicatat setelah uang masuk di Kas Daerah, sedangkan aplikasi yang digunakan sebelumnya mengakui langsung pencatatan penerimaan yang dipungut oleh Samsat.

**Event Kepariwisata di Sumsel mendorong pertumbuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di triwulan III 2024.** Pelaksanaan event kepariwisataan di Sumsel sejak bulan April 2024 mendorong pertumbuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 18,46% (yoy). Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah turut menyumbang peningkatan pajak hotel sebesar 22,18% (yoy) dan pajak restaurant sebesar 19,00% (yoy). Kegiatan kampanye Pilkada, turut menyumbang peningkatan Pajak Reklame sebesar 19,68% (yoy).

**Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kontraksi.** Realisasi retribusi daerah sebesar Rp107,29miliar atau tumbuh 41,61% (yoy) yang utamanya dipengaruhi pertumbuhan pada retribusi jasa umum yaitu retribusi layanan kesehatan dan retribusi layanan pendidikan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tercatat Rp1.190,96 miliar atau tumbuh 34,78% (yoy) yang dipengaruhi pertumbuhan pada penerimaan komisi, potongan dan selisih tukar rupiah dan penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp335,71 miliar atau terkontraksi (-14,95%) (yoy) dipengaruhi oleh menurunnya Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda atas Penyertaan Modal kepada BUMD.

**Pendapatan dari dana transfer tetap terakselerasi dan bekerja optimal sejak awal tahun hingga triwulan III 2024.** Realisasi pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp27,82 triliun atau 69,99% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 81,66% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan III 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan dari dana transfer tumbuh positif 39,69% (yoy) yang utamanya dipengaruhi peningkatan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan juga pendapatan transfer antar daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2.17. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Pendapatan transfer pemerintah pusat tumbuh signifikan mengindikasikan terjadi percepatan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah di wilayah Sumsel.** Pendapatan transfer pemerintah pusat realisasi sebesar Rp25,53 triliun atau tumbuh positif 39,38% (yoy). Hal tersebut didorong oleh percepatan penyaluran TKD s.d triwulan III 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan transfer antar daerah yang telah terealisasi sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh 43,30% (yoy). Pertumbuhan positif juga terjadi pada pendapatan bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 2.10. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Triwulan II 2024

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Prov. Sumatera Selatan	0.43	Menuju Kemandirian
Kab. Musi Banyuasin	0.09	Belum Mandiri
Kab. OKU	0.09	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0.07	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0.07	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0.06	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ilir	0.08	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0.10	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0.05	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0.02	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0.05	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0.05	Belum Mandiri
Kab. PALI	0.03	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0.04	Belum Mandiri
Kota Palembang	0.34	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0.10	Belum Mandiri
Kota Pagar Alam	0.11	Belum Mandiri
Kota Lubuk Linggau	0.08	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

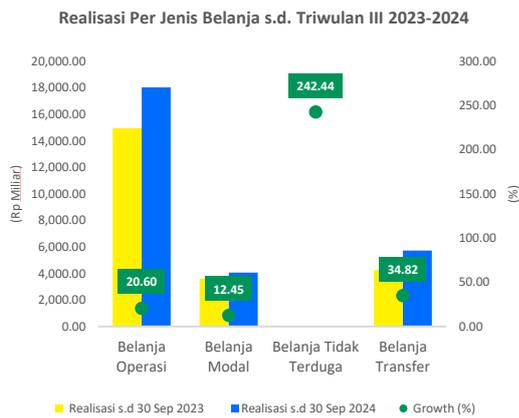
**Seluruh pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah di Sumsel masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer, yang menunjukkan kemandirian yang masih rendah.** Sampai dengan bulan September 2024, dari 18 pemerintah daerah di Sumsel terdapat 16 pemda yang indeks kemandirian fiskal dalam kategori “Belum Mandiri” dan hanya 2 pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian”. Pemda yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian” adalah Pemerintah Kota Palembang memiliki nilai sebesar 0,34 dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai sebesar 0,43.

**Lain-lain pendapatan daerah masih terkontraksi pada triwulan III 2024.** Realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp320,58 miliar atau 70,54% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 0,94% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan III 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi lain-lain pendapatan daerah terkontraksi sebesar (-19,65%) (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh penurunan penerimaan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontraksi penerimaan hibah terbesar terdapat pada penerimaan hibah yang berasal dari pemerintah pusat.

## B.2 Belanja Daerah

**Belanja daerah Sumsel tumbuh positif didorong kinerja realisasi semua jenis belanja dibandingkan tahun sebelumnya.** Hingga berakhirnya triwulan III 2024, realisasi belanja daerah Sumsel terealisasi sebesar Rp26,14 triliun atau telah mencapai 50,41% dari target APBD 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja daerah tumbuh positif 14,70% (yoy), dimana dipengaruhi oleh pertumbuhan dari sisi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

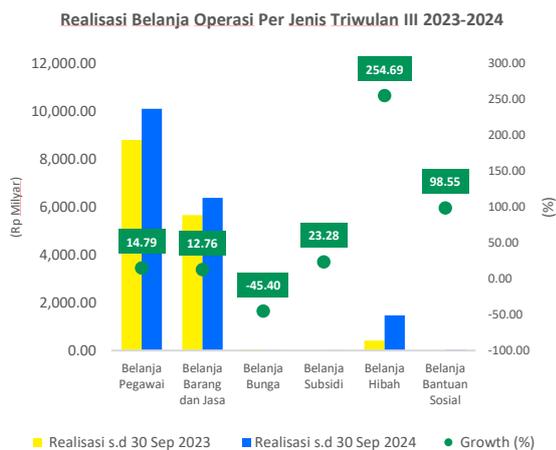
Grafik 2.18. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Kinerja Belanja Operasi tumbuh positif di hampir semua jenis belanja kecuali belanja bunga.** Realisasi belanja operasi sebesar Rp17,44 triliun atau 55,48% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 66,69% dari total realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan III 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja operasi tumbuh 16,74% (yoy) yang dipengaruhi realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.19. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Operasi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

**Dilihat secara lebih rinci per jenis belanja operasi, realisasi belanja pegawai mencatatkan tren yang positif.** Sampai dengan triwulan III 2024, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp10,09 triliun atau 63,75% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai tumbuh positif 14,79% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan, belanja pegawai BLUD dan belanja pegawai BOS. Diindikasikan pengaruh dari pengangkatan PPPK dan penyesuaian kenaikan tarif gaji ASN.

**Belanja barang dan jasa turut tumbuh positif hingga triwulan III 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp6,38 triliun atau 47,86% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja barang dan jasa tumbuh 12,76% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan pada belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, belanja sewa Gedung dan peralatan, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa BLUD dan belanja barang dan jasa dana BOS.

**Belanja bunga juga mengalami kontraksi hingga triwulan III 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja bunga sebesar Rp22,50 miliar atau 66,19% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bunga turun -45,50% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan dan bukan bank dibandingkan tahun sebelumnya.

**Belanja subsidi tumbuh positif hingga triwulan III 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja subsidi sebesar Rp11,50 miliar atau 59,07% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja subsidi tumbuh 23,28 % (yoy) dipengaruhi oleh realisasi belanja subsidi pada triwulan III 2024 yang lebih tinggi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

**Belanja Hibah hingga triwulan III 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja hibah sebesar Rp1,49 triliun atau 68,95% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja hibah tumbuh positif 254,98% dipengaruhi oleh peningkatan belanja hibah kepada pemerintah pusat dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 pada Februari dan persiapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Juga adanya pencatatan terhadap Belanja Hibah dari dana BOS untuk pendidikan dasar.

**Belanja bantuan sosial mencatatkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.** Realisasi belanja bantuan sosial tercatat Rp31,59 miliar atau 42,78% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bantuan sosial tumbuh 98,55% (yoy) dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan.

**Belanja modal masih tumbuh positif di triwulan III 2024.** Realisasi belanja modal sebesar Rp4,05 triliun atau 36,12% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja modal tumbuh positif 12,45% (yoy) dikontribusikan oleh meningkatnya realisasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan seperti jalan dan jembatan serta belanja modal bangunan air dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja realisasi tersebut selaras dengan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada beberapa wilayah di Sumsel.

**Pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga dalam merespon berbagai bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.** Hingga triwulan III 2024, realisasi belanja tidak terduga tercatat Rp10,27 miliar atau 3,21% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja tidak terduga tumbuh positif 242,44% (yoy) sebagai respon untuk pengeluaran tidak terduga dalam penanganan kejadian banjir di wilayah Sumsel seperti Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kab. OKU dan Kab. Musi Banyuasin. Selain itu BTT dipergunakan untuk penyelesaian kelebihan potongan temuan BPK RI oleh Kab.OKU Timur.

**Belanja transfer tetap tumbuh positif hingga triwulan III 2024.** Realisasi belanja transfer sebesar Rp5,74 triliun atau 64,49% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer tumbuh positif 34,82% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan bantuan keuangan atas bagi hasil pajak daerah oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumsel dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Kabupaten kepada desa.

### B.3 Surplus/Defisit APBD

Sampai dengan triwulan III 2024, APBD Sumsel mencatatkan surplus. Realisasi APBD Sumsel tercatat surplus sebesar Rp 6,26 triliun atau tumbuh 122,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemda di Sumsel masih perlu meningkatkan kinerja Belanja Daerahnya sampai dengan akhir tahun karena penyaluran TKD khususnya DAK Fisik dan Insentif Daerah yang baru mulai salur di awal triwulan III 2024.

### B.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah mengalami tren yang meningkat di triwulan III 2024. Realisasi pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp1,85 triliun atau 112,68% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah kontraksi negatif sebesar -30,50% (yoy) dikontribusikan dari penurunan penerimaan pembiayaan dan penurunan. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp2,05 triliun atau terkontraksi -33,80% yang utamanya dikontribusikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp202,18 miliar atau turun -53,91% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan penyertaan modal/investasi pemda dan penurunan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri hingga triwulan III 2024.

### B.5 Proyeksi Realisasi APBD

Realisasi APBD Sumsel triwulan IV 2024 diproyeksikan mengalami pertumbuhan baik dari sisi pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp50,13 triliun atau 99,82% dari target APBD. Sementara itu, realisasi belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp50,82 triliun atau 97,99% dari pagu APBD. Dari sisi proyeksi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah akan mengalami pertumbuhan 20,96% (yoy) dan pada saat yang sama realisasi belanja daerah akan mengalami pertumbuhan 19,80% (yoy) hingga triwulan IV 2024.

Kinerja APBD Sumsel diperkirakan optimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024. Proyeksi pertumbuhan positif sampai dengan akhir tahun diperkirakan dapat lebih besar, karena adanya pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2024 yang akan memberikan dampak kepada penerimaan pajak daerah. Selain itu, adanya beberapa proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah pusat akan mendorong percepatan realisasi belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi di Sumsel akan mempengaruhi terhadap kinerja fiskal daerah di Sumsel s.d akhir tahun 2024.

Tabel 2.11. Proyeksi Realisasi APBD Sumsel

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	Pagu	s.d. TW III		s.d. TW IV	
		Realisasi	%	Proyeksi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>50.220.88</b>	<b>34,075.16</b>	<b>67.85</b>	<b>50,131.13</b>	<b>99.82%</b>
PAD	10,011.25	5,928.18	59.22	9,981.80	99.71%
Pendapatan Transfer	39,755.16	27,826.40	69.99	39,719.13	99.91%
Lain-lain Pendapatan yang sah	454.47	320.58	70.54	430.2	94.66%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>51,864.99</b>	<b>27,809.39</b>	<b>53.62</b>	<b>50,822.63</b>	<b>97.99%</b>
Belanja Operasi	31,430.91	18,014.49	57.31	31,052.96	98.80%
Belanja Modal	11,234.71	4,058.09	36.12	11,188.03	99.58%
Belanja Tidak Terduga	320.21	10.27	3.21	45.07	14.08%
Belanja Transfer	8,879.16	5,726.54	64.49	8,536.57	96.14%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

### C. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resipokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja tranfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp22,49 triliun dimana capaian ini tumbuh 17,25% (yoy). Pendapatan tersebut mayoritas lebih disumbang oleh peran pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp14,21 triliun atau 63,19% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 73,39%, namun pada periode ini, capaian PNBPN pada Tingkat konsolidasian Pemda lebih mendominasi dengan porsi 62,64% dari total PNBPN. Angka PNBPN yaitu pendapatan transfer pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah

pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resipokal antara pendapatan transfer pemda dan belanja transfer pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan peran dana transfer sangat mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah di Sumsel. Pertumbuhan signifikan lainnya terdapat pada pendapatan hibah sebesar 1.3290,20% (yoy) yang didominasi dari Pemda.

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan III tahun 2024 sebesar 38,42 triliun dan tumbuh positif 16,63% (yoy). Dari sisi belanja, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah hingga periode triwulan III 2024. Pemerintah pusat berkontribusi sebesar 34,10%, sementara pemerintah daerah berkontribusi sebesar 65,90%. Dari sisi belanja pemerintah dan transfer, peran daerah telah mampu memberikan kontribusi sebesar 63,90% dan 83,79% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Dari sisi belanja, kinerja APBD memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Hingga triwulan III tahun 2024, defisit konsolidasian sebesar Rp15,92 triliun dimana tumbuh positif 15,77% (yoy). Defisit didominasi oleh kontribusi pemerintah daerah yang mencapai 106,99%. Pembiayaan konsolidasian pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp1,85

triliun dan berkontraksi-30,59% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah daerah pada triwulan III tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Sumsel s.d. Triwulan III 2023-2024 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	2023		2024				Growth 2023-2024
	Konsolidasian	Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
<b>A. PENDAPATAN</b>	<b>19,184.41</b>	<b>22,493.10</b>	<b>14,214.04</b>	<b>8,279.06</b>	<b>63.19%</b>	<b>36.81%</b>	<b>17.25%</b>
I. Perpajakan	14,962.63	16,136.92	11,842.26	4,294.66	73.39%	26.61%	7.85%
II. PNPB	4,170.36	6,348.58	2,371.78	3,976.80	37.36%	62.64%	52.23%
III. Hibah	0.51	7.60	-	7.60	-	100.00%	1390.20%
<b>B. BELANJA</b>	<b>32,940.75</b>	<b>38,419.40</b>	<b>13,100.69</b>	<b>25,318.70</b>	<b>34.10%</b>	<b>65.90%</b>	<b>16.63%</b>
I. Belanja Pemerintah	28,463.11	34,560.91	12,475.23	22,085.68	36.10%	63.90%	21.42%
II. Transfer	4,477.64	3,858.48	625.46	3,233.02	16.21%	83.79%	-13.83%
<b>C. SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-13,756.34</b>	<b>-15,926.30</b>	<b>1,113.35</b>	<b>-17,039.64</b>	<b>-6.99%</b>	<b>106.99%</b>	<b>15.77%</b>
<b>D. PEMBIAYAAN</b>	<b>2,664.90</b>	<b>1,849.65</b>	<b>-</b>	<b>1,849.65</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>-30.59%</b>
I. Penerimaan	3,103.56	2,054.42	-	2,054.42	-	100.00%	-33.80%
II. Pengeluaran	436.65	204.76	-	204.76	-	100.00%	-53.11%
<b>E. SILPA (SIKPA)</b>	<b>-11,091.43</b>	<b>-10,091.21</b>	<b>-22,195.70</b>	<b>8,119.05</b>	<b>219.95%</b>	<b>-80.46%</b>	<b>-9.02%</b>

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

## D. Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah pusat-tingkat wilayah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan hingga Semester I 2024 dibandingkan Semester I 2023 (YoY), terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Tabel 2.13. Ringkasan Neraca LKPP Sumsel Semester I 2023-2024

Uraian	Smstr I 2023 (Rp miliar)	Smstr I 2024 (Rp miliar)	% Growth
<b>Aset</b>			
Aset lancar	5,689.70	9,168.44	61.14%
Investasi Jangka Pendek	73.00	256.90	251.92%
Aset Tetap	132,799.29	133,423.46	0.47%
Properti Investasi	0	17.82	0%
Piutang Jangka Panjang	7.43	7.38	-0.67%
Aset Lainnya	3,260.43	644.60	-80.23%
<b>Total Aset</b>	<b>202,340.89</b>	<b>209,355.45</b>	<b>3.47%</b>
<b>Kewajiban</b>			
Kewajiban Jk. Pendek	885.40	1,007.01	13.74%
Kewajiban Jk. Panjang	0	1,440.76	-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>885.40</b>	<b>2,447.77</b>	<b>176.46%</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>201,455.49</b>	<b>206,907.68</b>	<b>2.71%</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>202,340.89</b>	<b>209,355.45</b>	<b>3.47%</b>

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Tabel diatas menyajikan ringkasan neraca per Semester I 2024 dibandingkan dengan Semester I 2023 (YoY). Posisi keuangan Pemerintah pusat wilayah Sumatera Selatan per Semester I 2024 menunjukkan total Aset sebesar Rp209,35 triliun meningkat 3,47% dibandingkan dengan total aset per Semester I 2023 sebesar Rp202,34 triliun. Kewajiban juga meningkat hingga 176,46% sampai dengan Semester I tahun 2024 sebesar Rp2,44 triliun dibandingkan jumlah kewajiban tahun lalu sebesar Rp0,8 triliun. Ekuitas juga tumbuh positif sebesar 2,71% sampai dengan Semester I tahun 2024 senilai Rp 206,90 triliun

Kenaikan Aset 3,47% hingga Semester I 2024 (YoY) karena beberapa komponen aset tumbuh positif, walaupun terdapat pos Piutang Jangka Panjang menurun sebesar -0,67%. Hal tersebut dikarenakan pengurangan akibat

penyelesaian tagihan atau tuntutan perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

**Aset Lancar tumbuh positif 61,14% dipengaruhi oleh Kas Lainnya dan Setara Kas meningkat signifikan** dari semula Rp1,74 triliun pada tahun lalu menjadi Rp3,31 triliun. Kenaikan Aset Lancar juga dipengaruhi oleh Piutang Pendapatan yang meningkat menjadi Rp2,92 triliun dari semula Rp1,04 triliun.

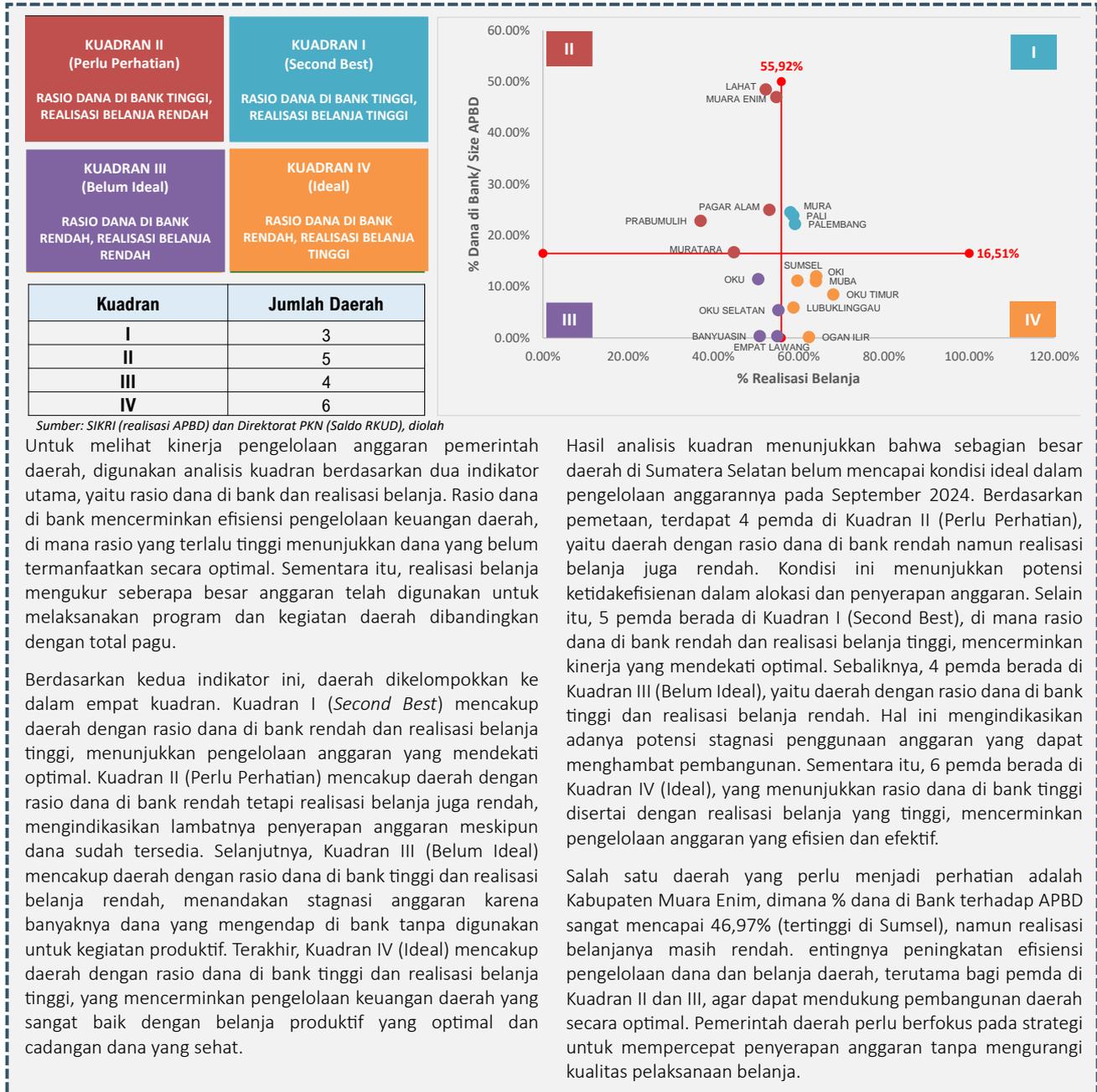
**Aset Tetap juga tumbuh positif sebesar 0,47% dipengaruhi oleh pertumbuhan pada pos Konstruksi Dalam Pekerjaan yang meningkat** di Semester I 2024 sebesar Rp6,87 Triliun dikarenakan proyek strategis yang masih dalam proses pembangunan. Selain itu pos peningkatan aset pada peralatan dan mesin yang meningkat 22,24% (yoy) sebesar Rp15,12 triliun.

**Pertumbuhan Kewajiban Jangka Pendek tumbuh sebesar 13 74 %** dipengaruhi oleh meningkatnya utang kelebihan pembayaran pendapatan dan pendapatan diterima di muka pada Semester I 2024. Di sisi **Kewajiban Jangka Panjang di Semester I 2024 juga mengalami pertumbuhan dipengaruhi oleh adanya kewajiban konsesi jasa** sebesar Rp1,44 triliun. Diindikasikan konsesi jasa tersebut oleh kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta untuk menyediakan layanan infrastruktur kemasayarakat (penyediaan jalan).

**Adapun total Ekuitas sampai dengan Semester I 2024 meningkat** sebesar 2,71% dari semula Rp201,45 triliun menjadi Rp206,90 triliun.

## Box 2

### Kinerja Belanja Daerah dan Rasio Dana di Bank Milik Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan



# BAB III: PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH



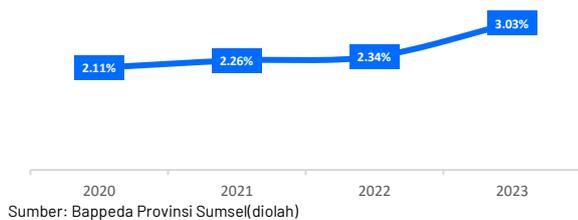
## A. Gambaran Umum UMKM di Sumsel

### A.1 Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat peluang dan mengombinasikan sumber daya untuk menciptakan nilai baru (Zimmerer dan Scarborough, 2005). Rasio kewirausahaan menjadi indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah, yang penting untuk menilai kontribusi wirausahawan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu dalam laporan *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), rasio kewirausahaan mencerminkan *proportion of individuals in a population who are actively involved in starting or running a business* yang secara langsung terkait dengan tingkat inovasi dan daya saing ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, rasio kewirausahaan masih berada di bawah standar negara maju. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), rasio kewirausahaan Indonesia sekitar 4,31%, meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya tetapi masih di bawah rata-rata negara maju yang mencapai 10%-12%. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan terkini, Rasio Kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan daerah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 3,03% atau meningkat 44% jika dibandingkan dengan Tahun 2020.

Grafik 3.1. Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Sumsel



UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam meningkatkan rasio kewirausahaan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan karena UMKM merupakan Kontributor Utama Wirausahawan yang menyumbang sebagian besar jumlah wirausahawan. Selain itu juga karena sebagian besar pelaku UMKM adalah individu atau kelompok kecil yang memulai usaha secara mandiri.

### A.2 UMKM di Sumsel

Data jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Selatan cukup tersedia dari berbagai sumber dengan data yang berbeda-beda. Karena karakteristik usaha dan pelaku usaha UMKM yang dinamis, terus tumbuh dan bergerak. Berdasarkan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada acara *Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia* bulan Mei 2024, per Desember 2023 tercatat terdapat 2.685.063 UMKM di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian dari jumlah tersebut pelaku UMKM yang terdaftar *by name by address* pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan hanya mencapai 680 ribu. Hal ini karena sebagian besar UMKM bersifat mobile atau berdagang di tempat yang tidak tetap.

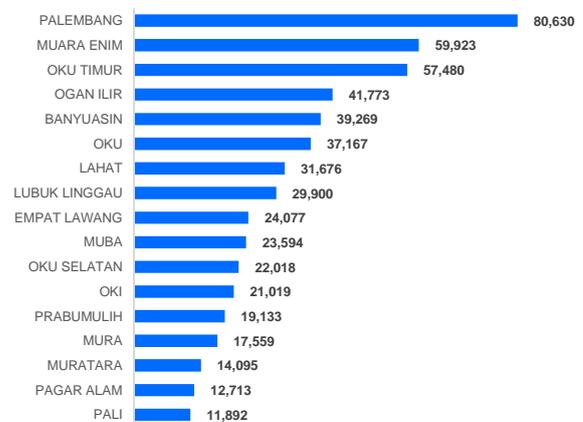
Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 untuk kategori usaha Non Pertanian (Untuk Bidang Pertanian dilakukan dalam Sensus Pertanian tersendiri) sebanyak 543.918 pelaku usaha. Data ini berhasil diinventarisasi bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera

Selatan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel atas rangka pendataan lengkap koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) pada tahun 2022 dan 2023. Sebagaimana instruksi presiden pada Inpres nomor 2 Tahun 2022, bagian kedua (nomor 21) bahwa presiden menginstruksikan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM dan Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyediakan database jumlah, bidang usaha, dan sebaran pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. PL-KUMKM pada tahun 2022 mencakup kegiatan usaha keluarga, menteap, usaha tidak menetap, dan usaha keliling untuk seluruh kategori non pertanian di wilayah OKU, OKI, Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Palembang. Sementara PL-KUMKM pada tahun 2023 mencakup pendataan di wilayah Lahat, OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang, PALI, Muratara, Prabumulih, Pagaralam, dan Lubuk Linggau.

### A.1.2 Sebaran UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sebaran UMKM di Sumatera Selatan menunjukkan pola yang beragam di setiap kabupaten/kota. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki konsentrasi UMKM yang lebih besar, sementara daerah lain menunjukkan potensi pengembangan yang masih dapat dioptimalkan. Kota Palembang memiliki jumlah UMKM tertinggi dengan 80.630 unit, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim (59.923 unit) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (57.480 unit). Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palembang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan jasa, tetapi juga memiliki akses infrastruktur dan fasilitas pendukung yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Sementara itu, Kabupaten Muara Enim dan OKU Timur menunjukkan potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM di luar ibu kota.

Grafik 3.2. Sebaran Jumlah UMKM di Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Sumsel dan Dinkop & UKM Sumsel (diolah)

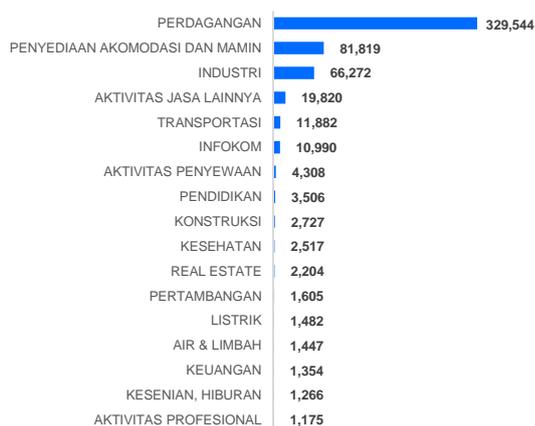
Beberapa kabupaten/kota memiliki jumlah UMKM menengah yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, menunjukkan potensi pertumbuhan di kategori ini masih menghadapi tantangan dalam pengembangan skala usaha. Hal tersebut sangat berkaitan dengan keterbatasan modal dan akses ke pasar. Potensi pertumbuhan ini dapat dioptimalkan melalui strategi pemberdayaan, seperti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta.

### A.1.2 Komposisi UMKM Berdasarkan Sektor Usaha

Beragamnya sektor usaha yang dijalankan oleh UMKM di Sumatera Selatan mencerminkan dinamika ekonomi lokal. Beberapa sektor menjadi motor penggerak utama, sementara

sektor lain memiliki peran yang signifikan tetapi masih perlu didorong untuk memberikan kontribusi lebih besar. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mendominasi, dengan total 329.544 unit atau sekitar 60% dari total UMKM, menunjukkan tingginya keterlibatan di sektor perdagangan. Tingginya dominasi sektor perdagangan menunjukkan bahwa mayoritas UMKM bergerak di bidang yang memerlukan investasi modal relatif kecil, tetapi memiliki perputaran ekonomi yang cepat. Tantangan di sektor ini adalah memastikan stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan peningkatan daya saing melalui digitalisasi.

**Grafik 3.3. Sebaran Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha**



Sumber: BPS Sumsel dan Dinkop & UKM Sumsel (diolah)

**Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (81.819 unit) serta Industri Pengolahan (66.272 unit) juga signifikan, mengindikasikan bahwa sektor-sektor ini penting bagi perekonomian lokal.** Sektor ini mencerminkan peran penting Sumatera Selatan sebagai pusat kuliner dan produksi berbasis lokal. Penyediaan makan minum juga sangat relevan dengan pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Industri pengolahan, meskipun jumlahnya lebih sedikit, berkontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi karena melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk jadi.

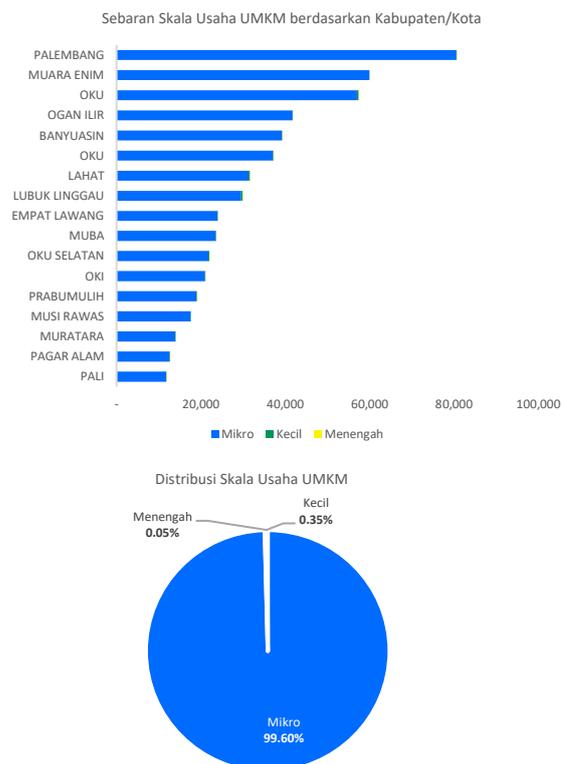
### A.1.3 Distribusi Berdasarkan Skala Usaha

UMKM di Sumatera Selatan didominasi oleh usaha mikro dengan share mencapai 99,60% atau sebanyak 541.746 unit, sedangkan usaha kecil dan menengah masing-masing hanya 0,35% atau 1.932 unit dan 0,05% atau 281 unit. Ketergantungan pada usaha mikro menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum mampu berkembang ke skala yang lebih besar. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses modal, teknologi, dan kapasitas manajerial. Upaya peningkatan skala usaha, seperti pemberian insentif bagi usaha kecil dan menengah, dapat membantu memperbaiki struktur ini.

Dilihat sebarannya berdasarkan wilayah pun, usaha kecil mendominasi di seluruh wilayah. Kota Palembang sebagai pusat ekonomi dan ibu kota Provinsi Sumsel menjadi penyumbang jumlah UMKM usaha kecil terbanyak. UMKM kecil dan menengah relatif lebih terlihat pada sektor Perdagangan, yang dapat menjadi penunjang ekonomi dengan dukungan modal yang lebih besar. Kehadiran usaha kecil dan menengah di perdagangan menunjukkan adanya potensi pengelolaan ekonomi yang lebih profesional. Namun, perluasan usaha kecil dan menengah di sektor lain seperti

industri kreatif dan industry pengolahan juga dapat memberikan diversifikasi yang lebih sehat terhadap struktur ekonomi Sumatera Selatan.

**Grafik 3.4. Sebaran dan Distribusi Skala Usaha UMKM di Sumsel**



Sumber: BPS Sumsel dan Dinkop & UKM Sumsel (diolah)

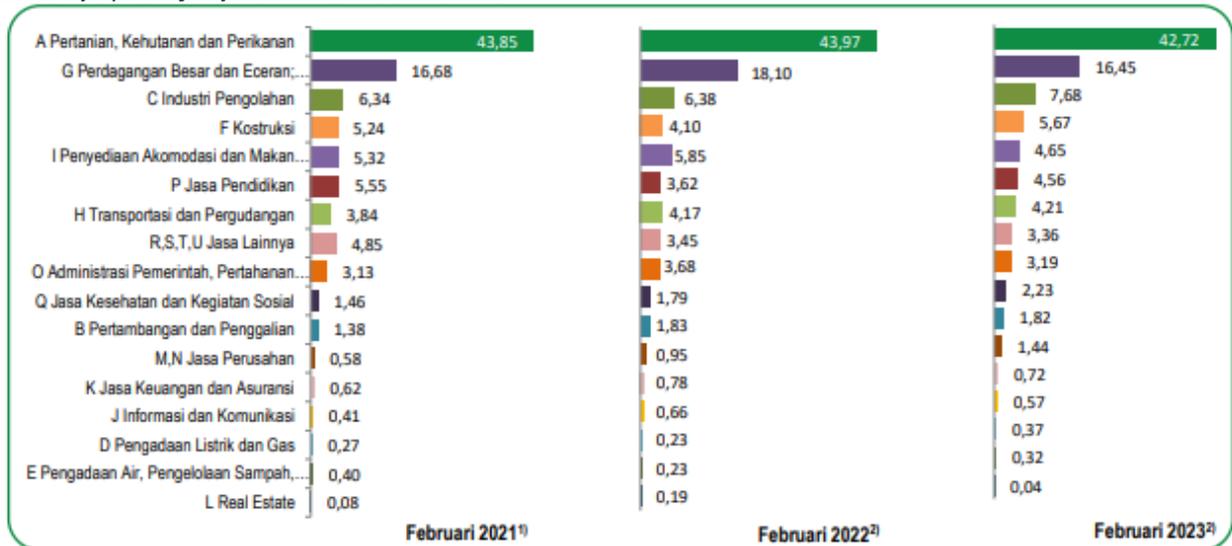
### A.3 Peran UMKM sebagai Penyerap Tenaga Kerja

Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 di Sumsel, tercatat bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mampu menyerap tenaga kerja sekitar 83% dari total tenaga kerja nonpertanian atau 35,92% dari total tenaga kerja (Sakernas 2016). Hingga saat ini belum terdapat data terbaru terkait peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan, data yang tersedia saat ini adalah data proyeksi dari BPS berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional. Sebagai gambaran, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada periode 2021 hingga 2023. Pada Februari 2023, sektor ini menyerap 42,72% tenaga kerja, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan Februari 2022 (43,97%) dan Februari 2021 (43,85%). Penurunan ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi dan efisiensi di sektor ini untuk mempertahankan daya serapnya.

**Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor nonpertanian dengan serapan tenaga kerja tertinggi, mencapai 16,45% pada Februari 2023.** Angka ini mengalami sedikit fluktuasi dari 16,68% (Februari 2021) dan 18,10% (Februari 2022). Fluktuasi ini menunjukkan pengaruh langsung dari pola konsumsi masyarakat dan daya beli terhadap tenaga kerja sektor perdagangan.

**Serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif stabil, dengan 5,67% pada Februari 2023, meningkat dari 5,24% (Februari 2021).** Stabilitas ini menandakan sektor industri pengolahan mulai berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kapasitas produksi lokal.

Gambar 3.1. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha di Sumsel



Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk interim hasil pendataan short form SP 2020

Sumber: BPS Sumsel

Pada Februari 2023, sektor penyediaan akomodasi makan minum menyerap 4,56% tenaga kerja, meningkat dari 4,10% (Februari 2022). Kenaikan ini didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi, terutama dalam sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga. Sektor Jasa Pendidikan menunjukkan serapan tenaga kerja stabil di sekitar 3,62%-3,55% selama periode 2021 hingga 2023. Hal ini menegaskan pentingnya peran pendidikan sebagai penyedia lapangan kerja meskipun kontribusinya masih cukup kecil dibanding sektor lain. Serapan tenaga kerja di sektor jasa kesehatan dan sosial meningkat menjadi 2,23% pada Februari 2023, dibandingkan 1,83% (Februari 2021). Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan sosial pasca-pandemi. Pada sektor transportasi dan pergudangan, sebesar 3,06% tenaga kerja pada Februari 2023, sedikit meningkat dari 2,89% pada Februari 2021. Peningkatan ini menandakan adanya penguatan logistik dan distribusi di wilayah Sumatera Selatan.

#### A.4 Kontribusi UMKM terhadap PDRB Sumsel

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS Provinsi Sumatera Selatan, meskipun UMK dari sisi jumlah lebih banyak dibandingkan dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB). Kontribusi UMK di Sumsel terhadap PDRB cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi UMB terhadap PDRB Sumatera Selatan, kontribusi UMK terhadap PDRB berada pada kisaran dibawah 30%.

Grafik 3.5. Kontribusi UMK dan UMB terhadap PDRB Sumsel (%)

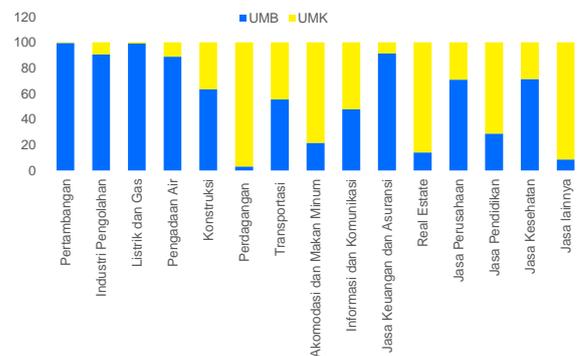


Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Minimnya kontribusi UMK terhadap PDRB Sumatera Selatan, disebabkan karena UMK di Sumatera Selatan tidak berperan besar atau minim sekali bergerak dibidang usaha pada Sektor-sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB.

Pada sektor-sektor yang padat modal seperti Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Gas, Pengadaan Air Minum, Konstruksi, Transportasi, Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, dan Jasa Kesehatan utamanya hanya dapat diakses oleh para pelaku UMB. Namun demikian pada sektor-sektor lain meliputi Perdagangan, Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa lainnya, utamanya didominasi oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Sumsel. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa kontribusi UMB menjadi lebih besar dibandingkan UMK terhadap PDRB Sumsel.

Grafik 3.6. Kontribusi UMK dan UMB Menurut Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

## B. Kendala dan Tantangan Pemberdayaan UMKM

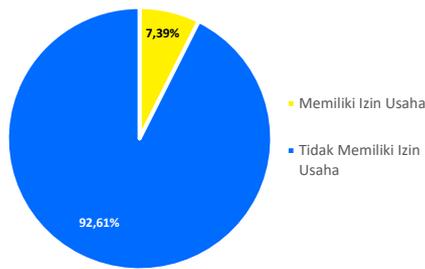
Kontribusi UMKM di Provinsi Sumatera selatan terhadap PDRB masih belum signifikan, meskipun sebaran jumlahnya mendominasi. Permasalahan ini memiliki kesamaan dengan kondisi UMKM di daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa kontribusi UMKM dan koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi memang masih rendah. UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan

tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM di Sumatera Selatan diantaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah. Masih rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil. Sementara disisi aspek pembiayaan, dalam beberapa kali kegiatan Monitoring dan Evaluasi masih ditemukan juga kendala yang berkaitan dengan akses permodalan meskipun pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait lain dalam Forum TPKAD telah berupaya untuk meningkatkan akses UMKM terhadap Keuangan Inklusif.

**Banyak UMKM di Sumsel belum memiliki ijin usaha.** Ijin Usaha merupakan salah satu syarat utama dalam kepentingan formal berusaha diantaranya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber pembiayaan. Berdasarkan data pada PL\_KUMKM 2022 dan 2023 yang dikumpulkan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan hanya sekitar 7,39% dari 543.918 UMKM di Provinsi ini yang telah memiliki Ijin Usaha sedangkan 92,61% sisanya masih belum memiliki ijin usaha.

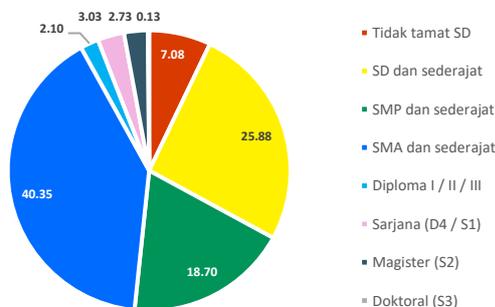
Grafik 3.7. Distribusi UMKM terkait Kepemilikan Ijin Usaha (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

**Mayoritas pendidikan dari para pelaku UMKM masih rendah.** Untuk menaikkan kelas UMKM diperlukan kompetensi pelaku usaha yang mumpuni dengan kemampuan kewirausahaan, pengetahuan dan keterampilan manajemen serta keahlian lain yang mendukung. Sementara data pelaku usaha UMKM di Sumatera Selatan mayoritas masih berpendidikan SD (25,88%), SMP (18,70%), SMA dan sederajat (40,35%).

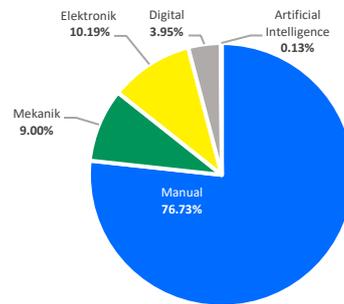
Grafik 3.8. Distribusi Pendidikan Pelaku UMKM di Sumsel (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Tantangan lain yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM untuk pengembangan ekonomi Sumatera Selatan adalah kapasitas dan kompetensi UMKM dalam teknologi usaha dan produksi yang mayoritas masih dilakukan secara manual. Ketika UMKM masih menggunakan teknologi produksi manual yang tidak efisien dan tidak efektif, mereka menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing. Pertama, produktivitas yang rendah. Proses manual membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan produk, sehingga jumlah barang yang dihasilkan rendah dibandingkan dengan permintaan pasar. Selain itu, teknologi manual sering kali menghasilkan produk yang bervariasi dalam kualitas, yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Kedua, biaya produksi yang tinggi. Dengan teknologi manual, kebutuhan tenaga kerja cenderung tinggi, yang meningkatkan biaya operasional. Selain itu kegiatan usaha UMKM akan mengalami pemborosan bahan baku yang dapat menyebabkan penggunaan bahan baku yang lebih besar dari yang diperlukan.

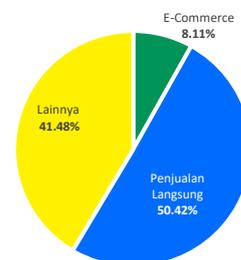
Grafik 3.9. Distribusi UMKM dalam Penggunaan Teknologi Usaha (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

UMKM di Sumatera Selatan utamanya masih menggunakan strategi metode penjualan langsung dan belum memanfaatkan teknologi. Strategi pemasaran merupakan aspek sangat penting dalam pengembangan UMKM, terutama terkait dengan peningkatan omset usaha mereka. Meskipun telah mengalami perkembangan yang dinamis hingga sekarang ini, data BPS Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan bahwa ternyata 50,42% UMKM di Sumatera Selatan masih menggunakan strategi metode penjualan langsung. UMKM yang masih menggunakan metode pemasaran konvensional atau penjualan langsung di era sekarang menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka.

Grafik 3.10. Distribusi UMKM terkait Metode Pemasaran (%)



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS Sumsel, hanya sekitar 8,14% yang telah memperoleh/mengajukan kredit, sementara sisanya 91,86% tidak memperoleh/mengajukan kredit. Dalam berbagai rangkaian FGD maupun monev terhadap pelaksanaan kredit program di Sumsel pun, masih ditemukan kendala mengenai banyak UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran kredit program, ditemukan berbagai permasalahan antara lain: 1) Mindset pelaku usaha UMKM yang masih melihat segala upaya bantuan pembiayaan pemerintah sebagai bentuk bantuan tanpa harus mengembalikan, dan hanya mengharapkan bantuan dengan pola sejenis; 2) Praktik regulasi yang belum sesuai dengan ketentuan seperti perbankan yang masih mewajibkan agunan tambahan untuk pemberian kredit dibawah 100 juta rupiah; 3) Sektor-sektor usaha tertentu tidak dilirik atau mendapatkan perhatian oleh lembaga keuangan penyalur karena dinilai berisiko tinggi, seperti sektor peternakan, perikanan dan lainnya; 4) Masih banyak pelaku usaha UMKM belum memperoleh atau terjangkau kegiatan sosialisasi penguatan inklusi keuangan sehingga belum mendapat info tentang program pemerintah terkait; 5) Ketidakpatuhan pelaku usaha sebagai debitur terhadap regulasi setelah menerima kredit pembiayaan yang diprogramkan pemerintah.

## C. Dukungan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

### C.1 Dukungan Pembiayaan

#### C.1.1 Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Subsidi Bunga KUR dalam APBN, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp298,5 triliun untuk subsidi. Dari jumlah tersebut, subsidi non-energi, yang mencakup subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dialokasikan sebesar Rp13,05 triliun.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp47,78 triliun untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi ini bertujuan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan keringanan bunga pinjaman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

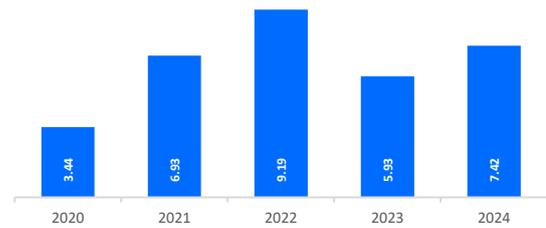
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp38,28 triliun untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi pada tahun 2024 yang mencapai Rp47,8 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh proyeksi penurunan penyaluran KUR pada tahun 2025.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program per 13 November 2024, di Sumatera Selatan KUR telah disalurkan kepada 108.484 Debitur UMKM. Realisasi ini merupakan 87,76% dari target realisasi Rp8,46 triliun atau sekitar Rp7,42 triliun. Realisasi penyaluran KUR di Sumatera Selatan mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Hal ini diduga berkorelasi dengan usaha UMKM yang tetap eksis dan berkembang pada masa pandemi dan pasca pandemi. Namun demikian realisasi KUR mengalami penurunan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil monev penurunan realisasi pada tahun 2023, diantaranya disebabkan oleh perbankan yang menunda penyaluran kredit KUR baru karena menunggu update peraturan terkait pada waktu itu. Hingga pada saat laporan ini

ditulis trend kenaikan realisasi KUR kembali naik hingga mencapai Rp7,42 triliun.

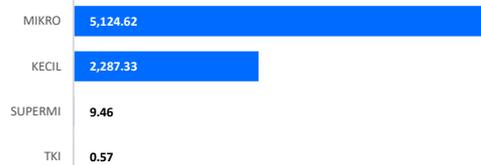
Grafik 3.11. Perkembangan Penyaluran KUR di Sumsel (Rp Triliun)



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan skema penyaluran, debitur terbanyak KUR adalah pada level skema mikro dengan total penyaluran mencapai Rp5,12 triliun disusul skema KUR Kecil Rp2,28 triliun dan Super Mikro yang mencapai Rp9,46 miliar, serta yang terendah pada skema KUR untuk Pekerja Migran (TKI) sebesar Rp0,57 miliar. Sedangkan jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang mencapai Rp4,33 triliun atau sebesar 58,39% dari total penyaluran.

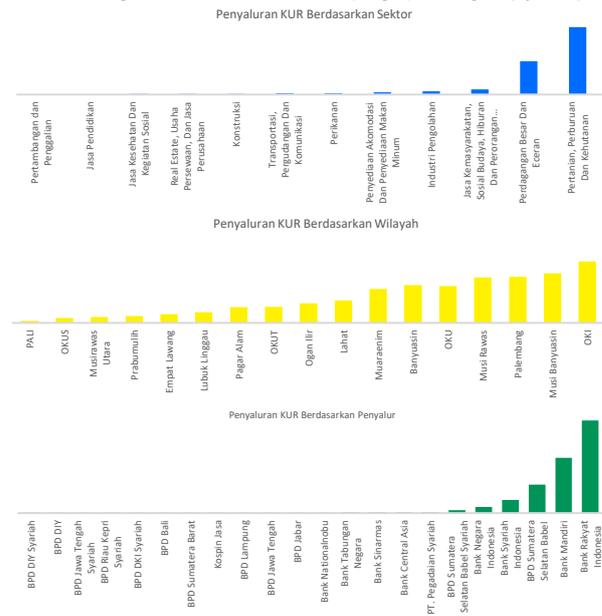
Grafik 3.12. Penyaluran KUR Berdasarkan Skema (Rp Miliar)



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang mencapai Rp4,33 triliun atau sebesar 58,39% dari total penyaluran. Sementara itu, wilayah dengan kinerja penyaluran tertinggi berada di Kabupaten OKI yang menduduki peringkat ini selama 4 tahun berturut-turut. Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan BPD Sumsel Babel merupakan tiga Lembaga Perbankan dengan penyalur KUR tertinggi di Wilayah Sumatera Selatan.

Grafik 3.13. Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor, Wilayah, dan Penyalur (Rp Miliar)



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

### C.1.2 Pembiayaan Ultra Mikro

Untuk memenuhi *gap* dalam menjangkau UMKM yang tidak *bankable* dan berskala ultra mikro. Pemerintah menjalankan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi Wilayah Sumsel s.d. 31 Oktober 2024 telah mencapai Rp338,06 miliar yang tersalur pada 60.976 debitur.

Grafik 3.14. Jumlah Penyaluran & Debitur UMi di Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan lembaga penyalur, Pembiayaan UMi di wilayah Sumatera Selatan disalurkan oleh 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun penyalur paling besar masih diduduki PNM dengan jumlah penyaluran sebesar Rp335,64 miliar atau dengan kata lain penyaluran UMi masih didominasi oleh PNM dengan penyaluran sebesar 99,28% dari total penyaluran di Sumatera Selatan.

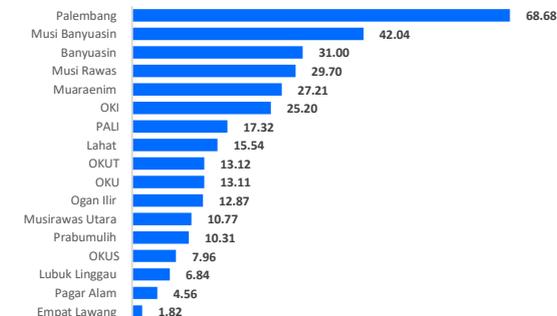
Grafik 3.15. Jumlah Penyaluran UMi Berdasarkan Penyalur (Rp Juta)



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Kota Palembang masih menjadi wilayah dengan kinerja penyaluran pembiayaan UMi tertinggi di Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp68,68 Miliar, terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini dipengaruhi oleh Kota Palembang yang merupakan pusat bisnis dan ekonomi di Sumatera Selatan.

Grafik 3.16. Penyaluran UMi Berdasarkan Wilayah (Rp Miliar)



Sebagai upaya memperluas jangkauan pembiayaan UMi di Sumsel, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengupayakan optimalisasi peran Koperasi di Sumatera Selatan sebagai mitra UMKM. Dalam konteks ini, kemitraan yang dimaksud adalah UMKM sebagai penyalur UMi dan

sebagai pendamping usaha pelaku usaha ultra mikro. Pemerintah Prov.Sumsel telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PIP. Hingga saat ini telah terdapat tiga Koperasi di Wilayah Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai penyalur UMi.

### C.2 Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)

Untuk mendukung program pemberdayaan UMKM di Sumsel, dukungan belanja K/L teralokasi secara total mencapai Rp4,30 miliar pada 2023-2024. Sebesar Rp2,24 miliar di tahun 2023 dan Rp 2,06 miliar di tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui *tagging* program prioritas nasional 01 dan program prioritas 05. Alokasi tersebut dalam 2 tahun terakhir, terdapat pada 4 satker yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, dan Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

Grafik 3.17. Alokasi Belanja K/L per Satker



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Dukungan belanja K/L utamanya dilaksanakan dalam kegiatan fasilitasi dan pembinaan UMKM terkait pengawasan obat dan makanan, peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil, dan menengah. Pada tahun 2024, alokasi belanja K/L untuk pemberdayaan UMKM paling besar diperuntukkan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk fasilitasi dan pembinaan penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah yang mencapai Rp1,84 miliar.

Grafik 3.18. Alokasi Belanja K/L per Kegiatan



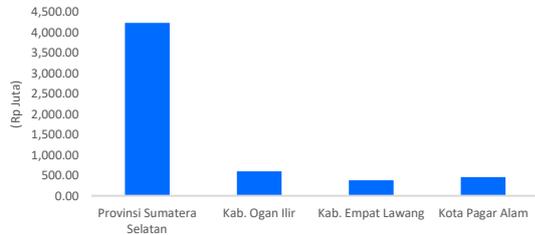
Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

### C.3 Dukungan Transfer ke Daerah

Melalui penyaluran DAK Non Fisik lainnya, pemerintah pusat mendukung APBD di daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK. Tujuan utama dari dana ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, manajemen, akses pasar, dan kemampuan teknis pelaku usaha di sektor tersebut. Program ini biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong perekonomian rakyat dan

menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2024, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK dialokasikan sebesar Rp5,67 miliar di Provinsi Sumatera Selatan. Alokasi terbesar ada di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4,22 miliar dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel dengan lokus kegiatan yang dilaksanakan pada 14 dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel. Sementara 3 Kabupaten/Kota sisanya mendapatkan alokasi tersendiri dengan masing-masing sebesar Rp598,28 juta (Ogan Ilir), Rp381,65 juta (Empat Lawang), Rp460,23 juta (Pagar Alam).

**Grafik 3.18. Alokasi Belanja K/L per Kegiatan**



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan FGD yang dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, alokasi dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMK digunakan untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan hukum. Program ini menargetkan peningkatan kapasitas 913 peserta pelatihan di berbagai bidang seperti kewirausahaan, keterampilan teknis, manajerial, akses pemasaran, serta literasi keuangan. Pendampingan juga menjadi prioritas dengan melibatkan 14 tenaga pendamping yang berperan untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal. Selain itu, layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum (LBPH) dirancang untuk membantu 200 pelaku usaha dalam memahami dan menyelesaikan isu legalitas, termasuk penyusunan dokumen hukum. Fokus utama pelatihan keterampilan teknis (P3KE) seperti menjahit, kerajinan tangan, dan olahan makanan diarahkan untuk menciptakan wirausaha mandiri yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, pendekatan berbasis standar kompetensi nasional (SKKNI) memastikan bahwa peserta pelatihan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing koperasi dan UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, legalitas usaha, dan kapasitas kewirausahaan.

### C.4 Dukungan APBD

**Alokasi pagu APBD untuk pemberdayaan UMKM di Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi dalam tiga tahun terakhir.** Pada tahun 2022, pagu yang ditetapkan sebesar Rp13,58 miliar, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 di mana pagu naik menjadi Rp16,07 miliar. Namun, pada tahun 2024, pagu yang dialokasikan turun drastis menjadi Rp5,37 miliar. Penurunan pagu ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi anggaran, yang mungkin terkait dengan perubahan prioritas atau efisiensi dalam pelaksanaan program. Tren ini menggarisbawahi pentingnya strategi perencanaan anggaran yang lebih fokus pada efisiensi dan dampak program agar alokasi dana dapat dimaksimalkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

**Grafik 3.18. Perkembangan Alokasi APBD untuk Mendukung Pemberdayaan UMKM**



Sumber: Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan data pagu anggaran pemberdayaan UMKM di Sumatera Selatan yang dikelola oleh berbagai OPD, terlihat adanya perubahan prioritas dalam alokasi dana selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, alokasi terbesar untuk pemberdayaan UMKM diberikan kepada Dinas Perdagangan sebesar Rp5,38 miliar, yang mencerminkan fokus pada penguatan sektor perdagangan sebagai tulang punggung kegiatan UMKM. Alokasi signifikan lainnya diberikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3,79 miliar, serta Dinas Koperasi & UKM sebesar Rp1,57 miliar, yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil. Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan tajam pada alokasi untuk Dinas Koperasi & UKM, yang melonjak menjadi Rp4,45 miliar, mencerminkan perhatian yang lebih besar pada pemberdayaan UMKM melalui koperasi. Namun, Dinas Perdagangan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp5,12 miliar, sementara alokasi untuk Dinas Pemuda dan Olahraga tetap relatif stabil di Rp3,69 miliar. Alokasi untuk OPD lain seperti Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah relatif kecil, masing-masing Rp0,30 miliar dan Rp1,35 miliar, menandakan fokus terbatas pada pengembangan aspek pariwisata dan penelitian yang terkait dengan UMKM.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan pagu secara signifikan di hampir semua OPD. Dinas Koperasi & UKM menerima alokasi Rp3,28 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih menjadi salah satu OPD dengan prioritas tinggi untuk pemberdayaan UMKM. Penurunan drastis terlihat pada Dinas Perdagangan, yang hanya menerima Rp0,93 miliar, serta Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Rp0,50 miliar. Alokasi untuk Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah masing-masing menjadi Rp0,07 miliar dan Rp0,06 miliar. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran pemberdayaan UMKM cenderung berfluktuasi, dengan puncak alokasi terlihat pada tahun 2023. Penurunan tajam di tahun 2024 mencerminkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk

memastikan bahwa program pemberdayaan UMKM tetap berjalan efektif meskipun anggaran mengalami pengurangan.

**Dari alokasi tahun 2024 sebesar Rp5,38 miliar, terlihat adanya fokus yang jelas pada upaya menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Alokasi terbesar mencapai Rp2.68 juta, diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.** Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Program lainnya yang mendapatkan alokasi cukup signifikan meliputi kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, dengan anggaran sebesar Rp395 juta, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk UMKM. Selain itu, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum serta Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM memperoleh alokasi sebesar Rp233,61 juta, menandakan pentingnya dukungan terhadap aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Beberapa sub-kegiatan lain, seperti Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi, mendapatkan alokasi Rp500 juta, yang bertujuan untuk mendukung distribusi produk UMKM secara lebih efisien. Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional dan Pameran Dagang Lokal, dengan alokasi masing-masing Rp150 juta dan Rp109,73 juta, mencerminkan dukungan terhadap promosi dan pemasaran produk UMKM di pasar yang lebih luas. Program-program lainnya, seperti Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Rp500 juta) dan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Rp315,50 juta), berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, khususnya wirausahawan muda. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Elektronik, yang mendapatkan alokasi Rp225 juta, menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi UMKM. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2024 ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan UMKM melalui pendekatan komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas, pengembangan pasar, hingga dukungan legal dan administratif. Implementasi yang tepat sasaran akan sangat menentukan dampak dari program-program ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Kesesuaian Kebutuhan dan Kendala Pemberdayaan UMKM**

**UMKM di Sumatera Selatan menghadapi kendala utama dalam optimalisasi pemberdayaan pada sektor unggulan.** Masalah ini meliputi keterbatasan kapasitas modal, minimnya infrastruktur pendukung produksi, dan kelembagaan koperasi yang belum optimal. Program existing yang telah berjalan mencakup peningkatan infrastruktur pendukung produksi dan pengembangan sektor unggulan serta potensi desa. Namun, gap kebutuhan masih terlihat pada minimnya kapasitas pemodal, infrastruktur yang terbatas di beberapa wilayah, serta kurangnya kelembagaan koperasi yang mampu mendukung sektor unggulan secara maksimal. Dibutuhkan peningkatan kapasitas koperasi produksi di sektor unggulan untuk mendorong peran lebih besar bagi UMKM dalam penguatan ekonomi lokal.

**Permasalahan akses pembiayaan menjadi tantangan signifikan bagi UMKM di Sumatera Selatan.** Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi telah tersedia, namun banyak UMKM belum dapat mengakses pembiayaan formal karena kurangnya informasi, edukasi, dan regulasi yang kompleks. Gap kebutuhan terlihat pada belum terjaminnya inklusi pembiayaan dari lembaga keuangan formal, rendahnya edukasi pelaku UMKM terhadap program pembiayaan pemerintah, serta regulasi pembiayaan yang belum terintegrasi dengan baik. Solusi yang diperlukan adalah penyederhanaan regulasi, perluasan akses inklusif pembiayaan formal, dan sosialisasi program kepada pelaku usaha kecil.

**Teknologi usaha dan pengelolaan UMKM yang belum optimal menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha.** Program existing yang telah dilaksanakan mencakup pelatihan pemasaran digital, manajemen pengelolaan modern, dan desain produk berbasis teknologi. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi gap dalam penguasaan teknologi produksi dan pemasaran, serta kesulitan mengadopsi teknologi digital. Dibutuhkan intensifikasi pelatihan teknologi digital, khususnya dalam proses produksi dan pemasaran modern, agar UMKM mampu bersaing di era digitalisasi.

**Kompetensi SDM pelaku UMKM di Sumatera Selatan masih memerlukan peningkatan. Program existing, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha, telah berjalan namun cakupannya belum memadai.** Gap kebutuhan terlihat pada terbatasnya akses pelatihan berbasis kebutuhan, terutama terkait keterampilan teknis dan manajerial. Untuk itu, diperlukan perluasan program pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi terkini, agar pelaku UMKM dapat lebih adaptif dan kompetitif.

**Keterbatasan akses pasar produk UMKM, khususnya pada platform digital, menghambat pertumbuhan usaha kecil. Program existing yang mendukung pemasaran digital dan promosi produk telah tersedia, namun implementasinya belum menjangkau semua pelaku UMKM.** Gap kebutuhan terlihat pada rendahnya penetrasi produk UMKM di pasar digital dan kurangnya promosi yang terintegrasi. Solusi yang dibutuhkan adalah penguatan program digitalisasi pemasaran, promosi terpadu, dan pelibatan lembaga pendamping untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas. Melalui penguatan program existing dan penutupan gap kebutuhan yang ada, diharapkan UMKM di Sumatera Selatan dapat berkembang menjadi lebih tangguh, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional. Pendekatan holistik ini perlu menjadi prioritas dalam agenda pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

# BAB IV: ANALISIS TEMATIK



## Implementasi Strategi *Penguatan Local Taxing Power*

**Penguatan *local taxing power*** menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif. Dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), daerah didorong untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian, dihadapkan pada tantangan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kinerja PAD Sumsel, khususnya dari PDRD, perlu ditingkatkan agar dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan yang handal dan berkesinambungan. Analisis ini disusun untuk mengevaluasi implementasi strategi penguatan *local taxing power* di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebijakan UU HKPD dan PP KUPDRD. Fokus utama kajian ini adalah pada perkembangan penyelesaian regulasi terkait PDRD, reviu strategi optimalisasi PAD, dan analisis kemandirian fiskal daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna mendukung kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.

### A. Perkembangan Penyelesaian Peraturan Daerah tentang PDRD di Sumsel

Pada tahun 2024, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerbitkan peraturan daerah tentang PDRD dan bersiap dalam pelaksanaan Opsen. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 94 UU HKPD yang mengatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, serta tarif pajak dan retribusi di seluruh daerah harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Pasal 187 UU HKPD menyebutkan bahwa Perda PDRD berdasarkan UU sebelumnya (UU No. 28 Tahun 2009) tetap berlaku maksimal dua tahun setelah UU HKPD diundangkan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyelesaikan penyusunan Perda PDRD paling lambat pada 5 Januari 2024. Selain itu, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kab/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah Kab/kota tersebut berada dan paling lambat pada 5 Januari 2025. Oleh karena itu, penyelesaian penyusunan Perda PDRD beserta dengan Perkada dan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi krusial guna mengantisipasi *potential loss* PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Di Provinsi Sumatera Selatan, capaian penyelesaian Perda PDRD menunjukkan *progress* yang signifikan. Dari total 18 pemerintah daerah, semuanya telah menetapkan Perda PDRD tepat waktu sebelum tanggal 5 Januari 2024. Sesuai dengan Pasal 99 UU HKPD, Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu untuk dievaluasi. Dari 18 Pemda, 17 Pemda telah menyampaikan Perda PDRD secara formal kepada DJPK Kementerian Keuangan, sedangkan 1 Pemda yaitu Kab. Lahat

belum menyampaikan Perda PDRD ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya, telah dilakukan evaluasi terhadap 11 Perda di Sumsel, sedangkan sisanya, masih menunggu penyelesaian evaluasi Perda PDRD dari Pemda terkait. Progress ini menunjukkan komitmen sebagian besar pemerintah daerah untuk memenuhi tenggat waktu dan menyesuaikan regulasi PDRD sesuai ketentuan UU HKPD.

Tabel 4.1. Perkembangan Penyelesaian Perda dan Perkada PDRD di Sumsel

Pemda	Penetapan Perda	Penyampaian Perda ke DJPK	Evaluasi Perda oleh DJPK	Perkada Turunan Perda
Provinsi Sumsel	✓	✓	✓	
Kota Palembang	✓	✓	✗	
Kab. Muara Enim	✓	✓	✓	
Kab. Musi Banyuasin	✓	✓	✓	
Kab. Musi Rawas	✓	✓	✓	
Kab. OKI	✓	✓	✓	
Kota Lubuk Linggau	✓	✓	✓	Proses Registrasi pada Biro Hukum
Kab. Ogan Ilir	✓	✓	✗	
Kab. Muratara	✓	✓	✓	Pemprov Sumsel
Kab. Empat Lawang	✓	✓	✓	
Kab. OKU Timur	✓	✓	✓	
Kota Pagaralam	✓	✓	✗	
Kab. OKU	✓	✓	✗	
Kab. OKU Selatan	✓	✓	✓	
Kota Prabumulih	✓	✓	✗	
Kab. Banyuasin	✓	✓	✗	
Kab. PALI	✓	✓	✓	Tahap Pembahasan
Kab. Lahat	✓	✗	✗	

Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

Pada sisi lain, perkembangan penyelesaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai perangkat turunan dari Perda PDRD menunjukkan capaian yang masih beragam. Semua pemerintah daerah di Sumatera Selatan sedang dalam proses penyusunan Perkada terkait implementasi PDRD, seperti tata cara pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sebagian besar pemda telah selesai tahap pembahasan dan kini dalam proses registrasi Perkada pada Biro Hukum Pemprov Sumsel. Namun, pada Kabupaten Lahat dan Kabupaten PALI Perkada masih dalam tahap pembahasan dan belum pada tahap pengajuan proses registrasi Perkada ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III 2024. Data ini memperkuat pentingnya percepatan penyelesaian regulasi oleh daerah-daerah yang masih tertinggal sebab keterlambatan dalam penyusunan Perkada dapat berdampak signifikan pada implementasi kebijakan fiskal daerah, terutama terkait pelaksanaan opsen pajak yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2025.

### B. Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Pengaturan dalam Perda PDRD di Sumsel

Evaluasi atas Perda terkait PDRD merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bertugas menguji kesesuaian Perda PDRD terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). Hasil evaluasi ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti guna

memastikan implementasi yang efektif serta mencegah potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perda PDRD di 17 pemerintah daerah di Sumatera Selatan, ditemukan 10 kategori permasalahan utama yang memerlukan tindak lanjut.**

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah inkonsistensi penggunaan istilah dalam peraturan, di mana beberapa daerah seperti Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, dan Ogan Komering Ulu masih menggunakan istilah yang tidak konsisten dengan ketentuan yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa daerah seperti Prabumulih, Palembang, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Selatan mencantumkan pelayanan administratif, seperti karcis dan surat keterangan, sebagai objek retribusi, yang bertentangan dengan aturan nasional. Permasalahan lain yang signifikan adalah pemungutan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tidak sesuai dengan ketentuan pusat, yang ditemukan di daerah seperti Prabumulih, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan.

**Tabel 4.2. Kategori Permasalahan Utama dari Hasil Evaluasi Perda PDRD di Sumsel**

Permasalahan	Rekomendasi	Pemda Terkait
Penggunaan istilah yang tidak konsisten dalam peraturan.	Menyeragamkan istilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, Ogan Komering Ulu
Pelayanan administrasi, seperti karcis dan surat keterangan, termasuk objek retribusi.	Menghapus pelayanan administrasi dari objek retribusi jasa umum.	Prabumulih, Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan
Pemungutan Opsen BBNKB tidak sesuai dengan ketentuan.	Menghapus ketentuan tidak relevan dan menyesuaikan pemungutan Opsen BBNKB sesuai dengan aturan terbaru.	Prabumulih, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan
Tarif layanan kesehatan BLUD belum tercantum dalam Perda.	Menambahkan tarif layanan kesehatan BLUD dalam lampiran Perda.	Prabumulih, Pagar Alam, Musi Banyuasin, Musi Rawas
Pengaturan NJOP pada pajak daerah belum jelas.	Menyederhanakan dan menghapus ketentuan yang tidak sesuai terkait NJOP.	Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Banyuasin
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) belum ditetapkan secara definitif.	Menetapkan SHST dalam Perda dengan nilai tertentu per meter persegi.	Prabumulih, Ogan Komering Ulu Timur, Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir
Visum dan biaya kesehatan belum diatur secara rinci dalam layanan kesehatan.	Mengatur bahwa visum atas permintaan APH dapat dibebankan kepada negara.	Palembang, Prabumulih, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas Utara
Perbedaan tarif layanan kesehatan belum jelas.	Menetapkan tarif berdasarkan jenis layanan dan sarana yang digunakan.	Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Lubuk Linggau, Penukal Abab Lematang Ilir
Pengenaan retribusi untuk tempat	Mengatur retribusi berdasarkan penyediaan fasilitas, bukan jumlah ternak.	Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Banyuasin,

pelelangan tidak sesuai.		Banyuasin, Ogan Komering Ilir
Ketidaksesuaian pengaturan dasar pengenaan pajak dengan aturan.	Memperbarui dasar pengenaan pajak agar sesuai dengan ketentuan terbaru.	Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan

Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

Selain itu, sejumlah daerah belum mencantumkan tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara rinci dalam Perda, seperti Prabumulih, Pagar Alam, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Permasalahan terkait pengaturan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga ditemukan di Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Banyuasin, yang belum sesuai dengan peraturan nasional. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) belum ditetapkan secara definitif di beberapa daerah, termasuk Prabumulih, Ogan Komering Ulu Timur, Pagar Alam, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Selain itu, beberapa daerah seperti Palembang, Prabumulih, Ogan Komering Ulu Timur, dan Musi Rawas Utara belum mengatur mekanisme visum dan biaya kesehatan untuk layanan atas permintaan aparat penegak hukum.

Isu lain yang ditemukan melibatkan perbedaan tarif layanan kesehatan yang belum disesuaikan berdasarkan jenis dokter atau fasilitas yang digunakan, seperti di Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Lubuk Linggau, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Di sisi lain, pengelompokan retribusi untuk tempat pemakaman belum sesuai dengan ketentuan di beberapa daerah seperti Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu. Terakhir, ketidaksesuaian dalam pengaturan Perda juga ditemukan di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Pagar Alam, dan Ogan Komering Ulu Selatan, yang masih mencantumkan ketentuan yang sudah tidak relevan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah telah diarahkan untuk segera menyesuaikan Perda mereka dan menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang relevan untuk mengatur tata cara pelaksanaan. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Lahat, yang hingga kini belum menyelesaikan Perda-nya, perlu segera mempercepat proses tersebut guna memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan UU HKPD dan PP KUPDRD. Penyesuaian ini penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan pajak daerah, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan penerimaan daerah yang optimal.

### C. Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power*

Persiapan implementasi opsen Pajak merupakan bagian penting dari penguatan *local taxing power*, dan Sumsel telah menunjukkan progress yang cukup signifikan dalam beberapa aspek utama. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh DJPK kepada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, penetapan payung hukum untuk sinergi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah dilakukan oleh Sumsel. Payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 telah mengatur bagaimana tata cara pemungutan, pembagian hasil opsen, serta pengawasan pelaksanaannya. Penetapan payung hukum ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan opsen di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Sumsel juga telah melaksanakan koordinasi intensif terkait *role sharing* antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Mekanisme ini dirancang untuk membagi tanggung jawab secara proporsional, di mana pemerintah provinsi bertindak sebagai pengelola utama, sementara kabupaten/kota berperan dalam mendukung pengawasan dan penegakan pemungutan pajak. Koordinasi ini juga mencakup penguatan integrasi data antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak.

Dukungan teknis melalui kerja sama dengan perbankan telah menghasilkan mekanisme pembayaran berbasis *split payment*. Mekanisme ini memungkinkan pembagian hasil opsen pajak secara otomatis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui sistem perbankan. Implementasi sistem *split payment* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kebocoran pendapatan, dan memastikan transparansi dalam alokasi hasil opsen pajak.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi komponen penting dalam kesiapan implementasi opsen pajak. PKS ini mencakup pengaturan terkait sinergi pemungutan opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBL). Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah menandatangani PKS ini sebagai bentuk komitmen bersama, menunjukkan progres yang baik dalam memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan.

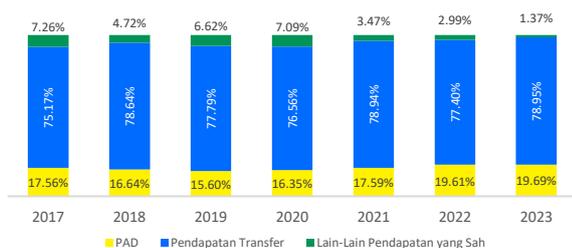
Meskipun progres implementasi menunjukkan hasil yang signifikan, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terutama dalam hal kesiapan administrasi dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, penyelesaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan peningkatan kapasitas teknis bagi petugas pajak menjadi langkah lanjutan yang harus diprioritaskan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dalam pembayaran PKB dan BBNKB. Dengan kolaborasi yang solid dan pelaksanaan strategi yang terarah, opsen pajak di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

## D. Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Sumsel

### D.1 Struktur Pajak Daerah

Dalam struktur pendapatan daerah Sumsel, pendapatan transfer masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 78,95% pada tahun 2023. Pajak asli daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar kedua, yaitu 19,69%. Sementara lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi hanya 1,37%.

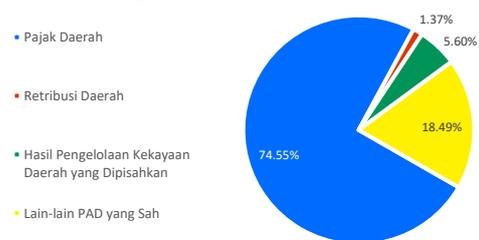
Grafik 4.1. Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Sumsel



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Dari perkembangannya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2017-2023), kontribusi pendapatan transfer relatif sama dari tahun ke tahun, sementara PAD menunjukkan tren peningkatan, tertinggi di tahun 2023 yang berkontribusi mencapai 19,69%. Sedangkan kontribusi Lain-lain pendapatan yang sah mengalami tren penurunan sejak tahun 2020. Dilihat dari struktur PAD, Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 74,55% pada tahun 2023, diikuti Lain-Lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 18,49%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,60%, dan Retribusi Daerah menjadi penyumbang terkecil yang hanya sebesar 1,37%.

Grafik 4.2. Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Sumsel



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan jenis pajak daerah, sebagian besar disumbang oleh pajak yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Kelima jenis pajak tersebut berkontribusi 69,90% dari total pajak daerah. Sementara pajak yang menjadi kewenangan Kab/Kota memberikan kontribusi 30,10% dari total pajak daerah, dengan Pajak Penerangan Jalan sebagai kontributor terbesar.

Tabel 4.3. Kontribusi per Jenis Pajak Daerah Tahun 2023

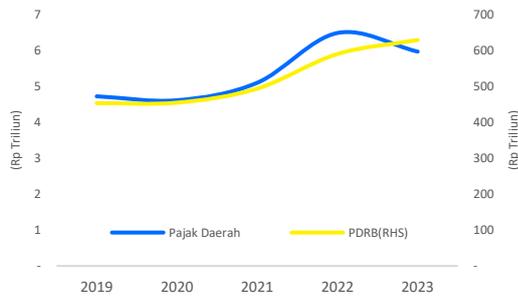
No	Jenis Pajak Daerah	% Kontribusi	Kewenangan
1	PBBKB	25,05%	Provinsi
2	PKB	18,15%	Provinsi
3	BBNKB	17,45%	Provinsi
4	Rokok	9,05%	Provinsi
5	Penerangan Jalan	8,70%	Kabupaten/Kota
6	PBB P2	6,02%	Kabupaten/Kota
7	BPHTB	5,57%	Kabupaten/Kota
8	Restoran	4,91%	Kabupaten/Kota
9	MLBL	1,67%	Kabupaten/Kota
10	Hotel	1,21%	Kabupaten/Kota
11	Hiburan	0,73%	Kabupaten/Kota
12	Reklame	0,58%	Kabupaten/Kota
13	Parkir	0,52%	Kabupaten/Kota
14	Air Permukaan	0,19%	Provinsi
15	Air Tanah	0,17%	Kabupaten/Kota
16	Sarang Burung Walet	0,02%	Kabupaten/Kota

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.2 Reviu Kinerja Pajak Daerah Konsolidasian

Aktivitas Perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan perkembangan yang baik dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel tercatat mencapai Rp629,10 triliun, meningkat 38,75% jika dibandingkan dengan PDRB 5 tahun lalu yang sebesar Rp453,40 triliun. Selaras dengan perkembangan ekonomi tersebut, penerimaan pajak daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak daerah Sumsel tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,97 triliun, tumbuh 26,36% jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu yang sebesar Rp4,72 triliun.

Grafik 4.3. Perkembangan Pajak Daerah dan PDRB Sumsel



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.2.1 Kinerja Realisasi

Dilihat dari persentase realisasinya, kinerja pemungutan penerimaan pajak daerah wilayah Sumsel dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tergolong cukup baik. Pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah Sumsel berhasil melampaui target yang ditetapkan. Di tahun 2019, 2021, dan 2023 realisasi tercatat lebih dari 90%. Namun di tahun 2023 realisasi penerimaan pajak daerah Sumsel turun jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Tabel 4.4. Pagu dan Realisasi Pajak Daerah Sumsel

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2017	4,05	4,00	98,72%
2018	4,32	4,48	103,77%
2019	4,99	4,72	94,66%
2020	5,56	4,61	82,98%
2021	5,47	5,10	93,25%
2022	5,87	6,49	110,43%
2023	6,53	5,97	91,41%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.2.2 Local Tax Ratio

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan suatu daerah dalam menghimpun penerimaan pajak daerah dibandingkan terhadap perekonomiannya adalah Local Tax Ratio (LTR). Dalam tulisan ini, LTR dihitung dengan membandingkan antara total pajak daerah dibagi dengan PDRB (ADHB). LTR Sumsel pada tahun 2023 berada di angka 0,95%, terendah dalam 5 tahun terakhir. LTR Sumsel tergolong masih rendah dan berada dibawah rata-rata LTR nasional yang sebesar 1,26%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah yang masih perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Grafik 4.4. Perkembangan Local Tax Ratio Sumsel (%)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.2.3 Local Tax Buoyancy

Tax Bouyancy merupakan indikator yang mengukur efisiensi dan responsivitas pengumpulan pajak terhadap perekonomian. Tax Bouyancy Pajak Daerah Sumsel dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan PDRB tahun berkenaan. Tax Bouyancy >1 menandakan kinerja penerimaan pajak daerah melampaui kinerja ekonomi, sebaliknya < 1 menandakan kinerja pajak yang tidak sebanding dengan performa ekonomi.

Pada tahun 2023, Tax Bouyancy Sumsel berada di angka -1,26.

Angka Tax Bouyancy tersebut berarti kinerja secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Sumsel tidak sebanding dengan kinerja ekonominya, atau -1,34 kali lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah yang masih perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Grafik 4.5. Perkembangan Local Tax Buoyancy Sumsel (%)



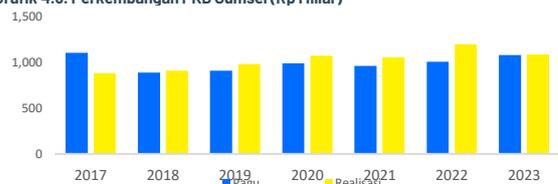
Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

## D.3 Reviu Kinerja Pemungutan Per Jenis Pajak

### D.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai kontributor terbesar pada total pajak daerah di Sumsel, kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 7 tahun (2017-2023). Sejak tahun 2019, Sumsel merealisasikan PKB lebih dari 100% dan telah mengalami pertumbuhan 10,62%, dengan realisasi sebesar Rp1,08 triliun di tahun 2023.

Grafik 4.6. Perkembangan PKB Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Namun demikian, kinerja pemungutan PKB di Sumsel masih dapat untuk dioptimalkan. Berdasarkan data kendaraan bermotor yang terdaftar di Sumsel, baru 42,68% yang berstatus aktif membayar PKB, dari total 3,45 juta kendaraan. Dari jenis PKB Progresif, masih terdapat 14,78% kendaraan yang belum aktif membayar.

Tabel 4.5. Data Kendaraan Bermotor Sumsel

Kab/Kota	Non Aktif	Aktif
Palembang	536.548	654.005
MUBA	170.332	84.525
Banyuasin	152.847	112.867
OKI	151.562	64.525
Ogan Ilir	68.427	47.041
OKU	113.955	63.722
OKU Selatan	34.676	26.266
OKU Timur	130.420	61.308
Muara Enim	162.143	94.846
Prabumulih	106.061	47.134
Lahat	86.883	75.356
Pagar Alam	28.658	19.637
Musi Rawas	99.165	42.243
Lubuk Linggau	85.397	49.356
Empat Lawang	6.936	10.169
Muratarra	19.220	6.267
PALI	28.345	16.120
Total	1.981.575	1.475.387

Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

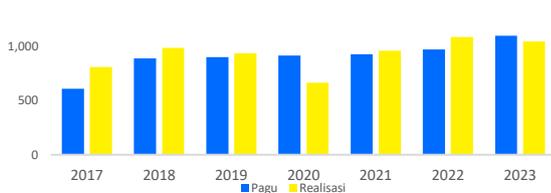
Jika dilihat per Kab/Kota, terlihat bahwa kendaraan non aktif terbanyak berada di Kota Palembang, dengan total kendaraan sebanyak 536,55 ribu atau 27,08% dari total kendaraan non aktif di Sumsel. Sementara untuk yang terendah berada di

Kab. Empat Lawang yang sebanyak 6,93 ribu kendaraan non aktif.

### D.3.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sumsel menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, pungutan BBNKB Sumsel mengalami pertumbuhan sebesar 11,63%, dengan nilai sebesar Rp1,04 triliun di tahun 2023. Kinerja pemungutan BBNKB sangat bergantung dengan pertumbuhan dari kendaraan yang baru terdaftar. Berdasarkan data dari tahun 2020 – 2022, terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 37,18% (2021) dan 14,11% (2022).

Grafik 4.7. Perkembangan BBNKB Sumsel (Rp Miliar)

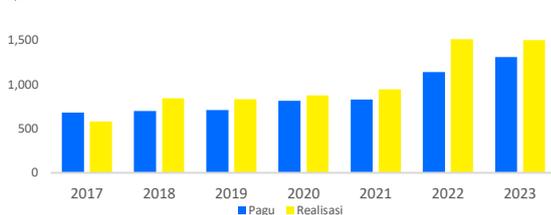


Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Kinerja realisasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sumsel dalam 7 tahun (2017-2023) menunjukkan tren peningkatan dan mampu terealisasi melebihi target. Pada tahun 2023, pungutan PBBKB Sumsel mencapai Rp1,49 triliun, meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2021 maupun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perluasan objek pajak baru yaitu berupa bahan bakar cair yang digunakan untuk generator dan diesel.

Grafik 4.8. Perkembangan PBBKB Sumsel (Rp Miliar)

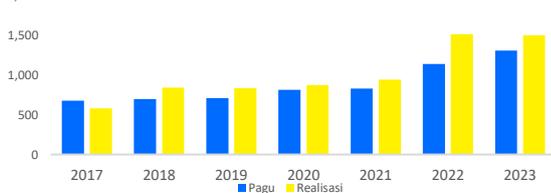


Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.4 Pajak Rokok

Pada tahun 2023, pajak rokok Sumsel mencapai Rp540,10 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 38,56% jika dibandingkan kondisi di tahun 2019. Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Bea dan Cukai. Pemerintah Prov. Sumsel hanya menerima transfer dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk.

Grafik 4.9. Perkembangan Pajak Rokok Sumsel (Rp Miliar)



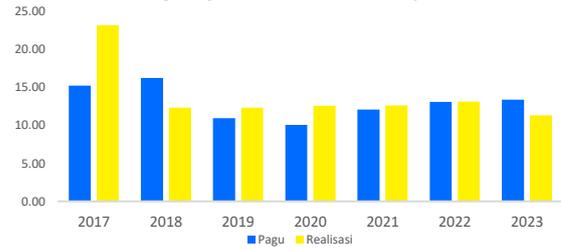
Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.5 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang memberikan kontributor terkecil pada total pajak yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam periode 2017-2023, kinerja

pemungutan Pajak Air Permukaan Sumsel mampu mencapai target yang ditetapkan, kecuali tahun 2023. Di tahun 2023, jumlah pungutan mencapai Rp11,34 miliar, tumbuh negatif -7,96% dalam kurun waktu 5 tahun.

Grafik 4.10. Perkembangan Pajak Air Permukaan Sumsel (Rp Miliar)

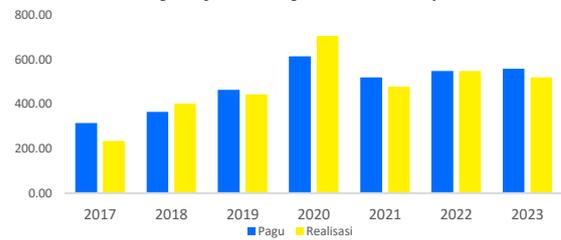


Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.6 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memberikan kontribusi terbesar pada pajak kewenangan Kab/Kota. Pada tahun 2022, Pajak Penerangan Jalan wilayah Sumsel sebesar Rp547,54 miliar, tumbuh 36,27% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 4.11. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan wilayah Sumsel cukup baik dengan mampu merealisasikan target lebih dari 90%. Realisasi pemungutan mengalami peningkatan di tahun 2020 ketika pemerintah membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah saat terjadinya pandemi Covid-19. Dilihat per Kab/Kota di tahun 2023, hampir semua menunjukkan kinerja pemungutan yang baik, namun Kabupaten Empat Lawang menunjukkan kinerja pemungutan yang perlu mendapatkan perhatian, karena hanya mampu merealisasi pajaknya 43,41% dari target. Kota Palembang menjadi yang tertinggi dalam realisasi Pajak Penerangan Jalan, sementara yang terendah berada pada Kab. Muratara.

Tabel 4.6. Pajak Penerangan Jalan Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	25,00	19,85	79,40%
Muba	33,00	35,45	107,43%
Musi Rawas	13,00	14,56	111,97%
Muara Enim	26,74	32,64	122,03%
OKI	26,38	24,95	94,57%
OKU	27,90	13,14	47,09%
Palembang	250,00	211,46	84,58%
Prabumulih	9,25	17,29	186,92%
Pagar Alam	4,50	5,06	112,38%
Lubuk Linggau	14,50	16,01	110,43%
Banyuasin	47,50	52,71	110,96%
Ogan Ilir	21,25	22,85	107,53%
OKU Timur	26,57	26,28	98,91%
OKU Selatan	6,30	7,89	125,22%
Empat Lawang	13,00	5,64	43,41%
PALI	7,94	8,90	112,03%

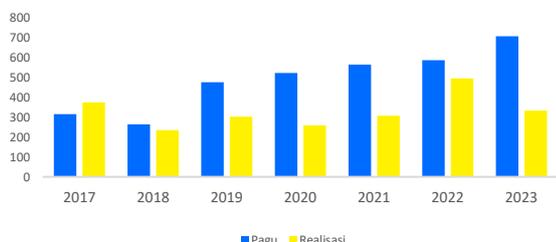
Muratarata	5,30	4,58	86,36%
Total	558,14	519,25	93,03%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.7 BPHTB

Secara umum, kinerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Sumsel masih perlu untuk dioptimalkan. Jika dilihat dari perkembangan realisasi selama periode 2017-2023, kinerja pemungutan BPHTB masih rendah, kecuali di tahun 2017 yang melampaui target.

Grafik 4.12. Perkembangan BPHTB Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, pungutan BPHTB wilayah Sumsel mencapai Rp332,26 miliar. Dibandingkan dengan kondisi 2019, BPHTB Sumsel telah mengalami pertumbuhan sebesar 9,80%. BPHTB terbesar disumbang oleh Kota Palembang dengan jumlah pungutan sebesar Rp191,54 miliar atau 57,63% dari total BPHTB Sumsel. Sementara yang terendah berada di Empat Lawang yang sebesar Rp929,17 juta.

Tabel 4.7. BPHTB Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	26,49	9,02	34,07%
Muba	18,00	10,81	60,06%
Musi Rawas	153,04	1,93	1,26%
Muara Enim	10,96	21,66	197,59%
OKI	25,79	5,52	21,39%
OKU	6,80	2,90	42,59%
Palembang	314,00	191,54	61,00%
Prabumulih	3,00	7,55	251,59%
Pagar Alam	1,20	1,29	107,80%
Lubuk Linggau	11,10	7,26	65,40%
Banyuasin	69,82	52,63	75,38%
Ogan Ilir	57,13	7,32	12,82%
OKU Timur	1,50	6,69	446,16%
OKU Selatan	0,80	1,28	160,34%
Empat Lawang	1,25	0,93	74,33%
PALI	1,68	2,83	168,30%
Muratarata	4,18	1,20	28,71%
Total	706,73	332,36	47,03%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

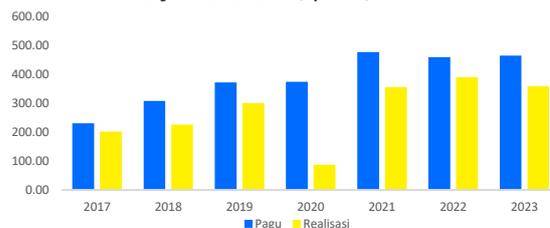
Ditinjau per Kab/Kota, hanya 6 Kab/Kota yang menunjukkan kinerja pemungutan yang baik atau mencapai target yang ditetapkan. Sementara 11 Kab/Kota masih belum mencapai target dan bahkan terdapat 6 Kab/Kota yang realisasinya dibawah 50%.

### D.3.8 PBB P2

Kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) wilayah Sumsel tergolong masih rendah karena persentase realisasinya yang masih dibawah 90%. Pada tahun 2023 pungutan PBBP2 Sumsel sebesar Rp359,08 miliar,

tumbuh 19,56% jika dibandingkan kondisi 5 tahun sebelumnya.

Grafik 4.13. Perkembangan PBB P2 Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Dilihat per Kab/Kota, pungutan terbesar berada di Kota Palembang, yaitu sebesar Rp234,75 miliar, sementara yang terendah berada di Kabupaten Muratarata yang sebesar Rp950,30 juta. Namun jika dilihat dari kinerja pemungutannya, hanya Kab. Lahat, Kota Prabumulih, dan Kab. Banyuasin yang mampu mencapai target. Dan terdapat 2 Kab yang capaian realisasinya dibawah 50%.

Tabel 4.8. PBB P2 Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

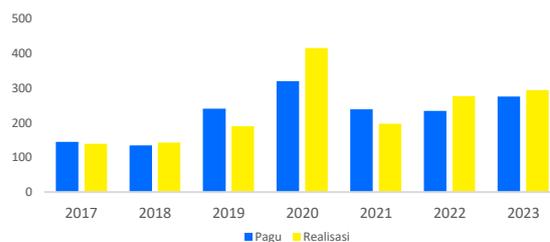
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	3,68	4,63	125,89%
Muba	23,00	19,68	85,57%
Musi Rawas	8,00	6,44	80,52%
Muara Enim	12,57	9,29	73,91%
OKI	20,03	18,57	92,71%
OKU	9,00	0,59	6,58%
Palembang	304,00	234,75	77,22%
Prabumulih	3,48	4,11	118,22%
Pagar Alam	1,50	1,12	74,71%
Lubuk Linggau	8,50	4,44	52,29%
Banyuasin	33,00	34,26	103,81%
Ogan Ilir	19,70	10,66	54,09%
OKU Timur	7,60	4,86	63,97%
OKU Selatan	3,03	2,24	74,10%
Empat Lawang	3,50	0,99	28,31%
PALI	2,56	1,49	58,18%
Muratarata	1,35	0,95	70,39%
Total	464,50	359,08	77,31%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.9 Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di wilayah Sumsel menunjukkan kinerja yang baik. Dalam periode 2019-2023, realisasi Pajak Restoran berfluktuatif namun berhasil mencapai target di tahun 2020, 2022, dan 2023. Pungutan Pajak Restoran pada tahun 2023 mencapai Rp293,21 miliar, tumbuh 54,63% dibandingkan kondisi tahun 2019.

Grafik 4.14. Perkembangan Pajak Restoran Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Ditinjau per Kab/Kota, mayoritas Pajak Restoran berada di Kota Palembang, yaitu sebesar Rp200,65 miliar atau 68,43% dari total. Sementara Kab. OKI menjadi daerah yang terendah

dalam pungutan Pajak Restoran yaitu hanya sebesar Rp1,02 miliar. Terkait dengan kinerja pemungutan, sebagian besar kab/kota telah menunjukkan kinerja pemungutan yang baik, 13 Kab/Kota mampu merealisasikan target diatas 90%. Namun terdapat satu daerah yang realisasi pungutannya sangat rendah, yaitu 3 Kab/kota yang realisasinya di bawah 50%.

**Tabel 4.9. Pajak Restoran Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)**

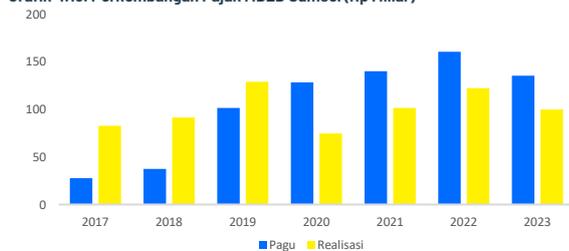
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	5,00	6,29	125,85%
Muba	13,51	15,05	111,36%
Musi Rawas	3,00	1,13	37,71%
Muara Enim	11,13	20,25	181,93%
OKI	1,16	1,02	88,41%
OKU	5,00	1,90	37,93%
Palembang	195,00	200,65	102,90%
Prabumulih	3,00	5,42	180,82%
Pagar Alam	1,00	1,42	141,67%
Lubuk Linggau	6,66	9,58	143,76%
Banyuasin	14,60	16,89	115,71%
Ogan Ilir	2,85	2,78	97,34%
OKU Timur	1,93	2,47	128,18%
OKU Selatan	3,00	3,43	114,26%
Empat Lawang	5,00	1,20	24,07%
PALI	1,26	1,48	117,77%
Muratara	1,75	2,23	127,55%
Total	274,86	293,21	106,67%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.10 Pajak MBLB

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi cukup besar di wilayah Kab/Kota. Pada tahun 2023, Pajak MBLB wilayah Sumsel sebesar Rp99,75 miliar, tumbuh -22,59% jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019.

**Grafik 4.15. Perkembangan Pajak MBLB Sumsel (Rp Miliar)**



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Sementara itu, kinerja pemungutan Pajak MBLB wilayah Sumsel perlu untuk kembali dioptimalkan karena sejak tahun 2020, kinerja pemungutan selalu dibawah target. Realisasi Pajak MBLB Sumsel tidak mencapai 80%.

**Tabel 4.10. Pajak MBLB Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)**

Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	18,00	13,65	75,82%
Muba	1,50	1,84	122,96%
Musi Rawas	7,00	4,32	61,74%
Muara Enim	13,94	21,95	157,51%
OKI	3,65	1,10	30,08%
OKU	22,00	6,21	28,23%
Palembang	2,00	0,99	49,45%
Prabumulih	1,08	3,67	339,46%
Pagar Alam	0,80	1,26	156,89%

Lubuk Linggau	2,87	2,89	100,61%
Banyuasin	10,00	3,88	38,79%
Ogan Ilir	10,00	13,25	132,47%
OKU Timur	7,00	7,14	101,97%
OKU Selatan	5,60	2,75	49,05%
Empat Lawang	16,00	1,07	6,68%
PALI	10,02	8,88	88,63%
Muratara	4,02	4,92	122,31%
Total	135,48	99,75	73,63%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, pungutan Pajak MBLB terbesar berada di Kab. Muara Enim dengan realisasi sebesar Rp21,95 miliar dan terendah pada Kota Palembang yang sebesar Rp988,94 juta. Kinerja pemungutan tertinggi pada Kab. Muara Enim dan yang terendah adalah Kab. Empat Lawang.

### D.3.11 Pajak Hotel

Sejak dilanda pandemi Covid-19, pemungutan Pajak Hotel di wilayah Sumsel terus membaik meskipun masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Pajak Hotel wilayah Sumsel pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp72,05 miliar, tumbuh negatif sebesar -23,71% dibandingkan kondisi di tahun 2019.

**Grafik 4.16. Perkembangan Pajak Hotel Sumsel (Rp Miliar)**



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, Pungutan Pajak Hotel terbesar berada di Kota Palembang yaitu sebesar Rp55,32 miliar dan yang terendah pada Kab. Muratara yang tidak memiliki pungutan. Hanya 6 Kab/Kota yang kinerja pemungutannya mampu mencapai, bahkan melampaui target.

**Tabel 4.11. Pajak Hotel Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)**

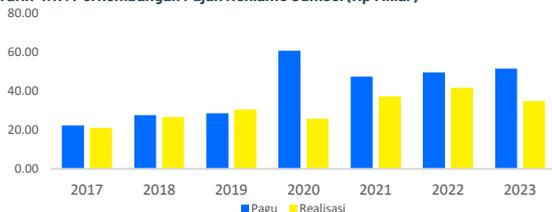
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	1,65	0,80	48,56%
Muba	1,03	1,17	114,29%
Musi Rawas	0,01	0,00	24,00%
Muara Enim	2,10	3,25	154,67%
OKI	0,27	0,20	74,63%
OKU	1,70	0,36	21,30%
Palembang	75,00	55,32	73,76%
Prabumulih	0,68	1,10	161,41%
Pagar Alam	0,75	0,48	64,47%
Lubuk Linggau	2,71	3,82	141,27%
Banyuasin	4,00	4,59	114,63%
Ogan Ilir	1,50	0,31	20,54%
OKU Timur	0,29	0,39	135,34%
OKU Selatan	0,50	0,19	38,79%
Empat Lawang	0,16	0,01	8,25%
PALI	0,13	0,05	38,21%
Muratara	-	-	-
Total	92,47	72,05	77,93%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.12 Pajak Reklame

Pajak Reklame di wilayah Sumsel menunjukkan tren peningkatan. Dalam periode 2019-2023, Pajak Reklame telah mengalami pertumbuhan sebesar 14,16%, dari Rp30,50 miliar (2019) menjadi Rp34,82 miliar (2023).

Grafik 4.17. Perkembangan Pajak Reklame Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pungutan Pajak Reklame terbesar berada di Kota Palembang yaitu sebesar Rp19,85 miliar, sementara yang terendah pada Kab. Muratara yang sebesar Rp111,27 juta.

Tabel 4.12. Pajak Reklame Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

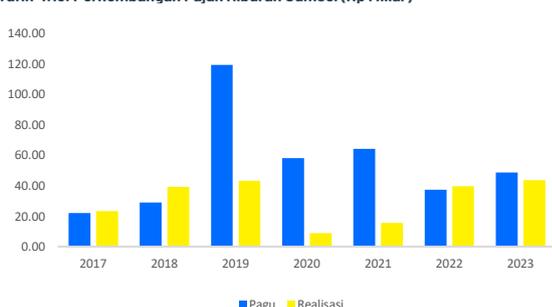
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	1,05	1,34	127,72%
Muba	1,50	1,35	90,12%
Musi Rawas	0,30	0,18	59,97%
Muara Enim	0,58	0,95	163,74%
OKI	0,91	0,48	52,61%
OKU	1,70	0,40	23,41%
Palembang	32,00	19,85	62,02%
Prabumulih	0,89	0,87	98,12%
Pagar Alam	0,20	0,28	138,56%
Lubuk Linggau	3,92	3,51	89,78%
Banyuasin	1,15	1,52	132,32%
Ogan Ilir	0,75	1,17	155,55%
OKU Timur	2,00	1,96	97,84%
OKU Selatan	0,70	0,55	78,18%
Empat Lawang	3,50	0,16	4,66%
PALI	0,19	0,14	77,00%
Muratara	0,13	0,11	89,02%
Total	51,46	34,82	67,67%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.13 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan di wilayah Sumsel termasuk pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Pungutan Pajak Hiburan sempat turun signifikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp8,84 miliar dari yang sebelumnya sebesar Rp43,22 miliar di tahun 2019. Namun demikian, pungutan Pajak Hiburan wilayah Sumsel mulai membaik meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Grafik 4.18. Perkembangan Pajak Hiburan Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, Pajak Hiburan wilayah Sumsel tercatat sebesar Rp43,68 miliar, tumbuh 1,05% jika dibandingkan kondisi tahun 2019. Pungutan tertinggi berada di Kota Palembang yang sebesar Rp34,64 miliar dan yang terendah di Kab. PALI yang hanya Rp4,9 juta. Selanjutnya, untuk kinerja pemungutan tertinggi di Kota Prabumulih yang merealisasikan Pajak Hiburan sebesar 383,65%, sementara yang terendah di Kab. Empat Lawang yang hanya sebesar 1,60%.

Tabel 4.13. Pajak Hiburan Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

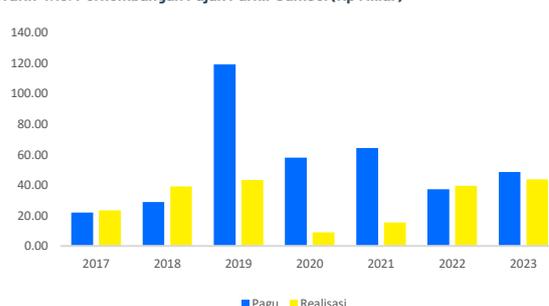
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	1,20	1,10	91,67%
Muba	0,14	0,05	39,25%
Musi Rawas	0,00	0,01	190,02%
Muara Enim	0,29	0,88	300,64%
OKI	0,02	0,03	157,35%
OKU	2,50	0,32	12,66%
Palembang	37,50	34,64	92,36%
Prabumulih	0,23	0,88	383,65%
Pagar Alam	0,03	0,04	109,19%
Lubuk Linggau	2,87	2,50	87,08%
Banyuasin	3,00	3,14	104,76%
Ogan Ilir	0,03	0,01	35,20%
OKU Timur	0,03	0,07	220,75%
OKU Selatan	0,03	0,01	25,52%
Empat Lawang	0,70	0,01	1,60%
PALI	0,01	0,00	93,33%
Muratara	0,01	0,01	100,00%
Total	48,57	43,68	89,92%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.14 Pajak Parkir

Pajak Parkir di wilayah Sumsel juga termasuk pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Pungutan Pajak Parkir sempat Rp0 di tahun 2020. Namun demikian, pungutan Pajak Parkir wilayah Sumsel terus membaik meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Grafik 4.19. Perkembangan Pajak Parkir Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, Pajak Parkir wilayah Sumsel tercatat sebesar Rp30,95 miliar, tumbuh negatif -18,65% jika dibandingkan kondisi tahun 2019. Pungutan tertinggi berada di Kota Palembang yang sebesar Rp25,28 miliar dan yang terendah di Kab. OKU Timur dan Empat Lawang yang Rp0. Selanjutnya, untuk kinerja pemungutan tertinggi di Kota Lubuk Linggau yang merealisasikan sebesar 161,98%.

Tabel 4.14. Pajak Parkir Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	0,45	0,46	103,16%
Muba	0,20	0,53	262,83%
Musi Rawas	0,30	0,20	65,88%

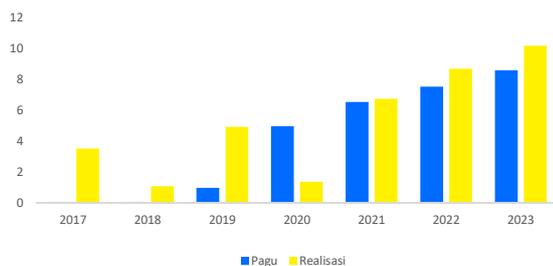
Muara Enim	-	0,04	-
OKI	0,24	0,24	98,03%
OKU	0,35	0,13	37,24%
Palembang	30,00	25,28	84,25%
Prabumulih	0,28	0,36	126,96%
Pagar Alam	0,28	0,35	126,30%
Lubuk Linggau	0,90	1,46	161,98%
Banyuasin	1,40	1,56	111,51%
Ogan Ilir	0,43	0,14	31,95%
OKU Timur	-	-	-
OKU Selatan	0,20	0,14	70,66%
Empat Lawang	-	-	-
PALI	0,04	0,05	128,16%
Muratara	0,10	0,04	42,59%
Total	35,16	30,95	88,04%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.15 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah wilayah Sumsel menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023, kecuali tahun 2020 ketika pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, Pajak Air Tanah Sumsel tercatat sebesar Rp10,16 miliar, tumbuh 106,66% dibandingkan kondisi tahun 2019.

Grafik 4.20. Perkembangan Pajak Air Tanah Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Dilihat per Kab/Kota, pungutan Pajak Air Tanah terbesar berada pada Kab. Banyuasin yaitu Rp6,71 miliar dan yang terendah di Kab. Lahat yang pungutannya Rp0.

Tabel 4.15. Pajak Air Tanah Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

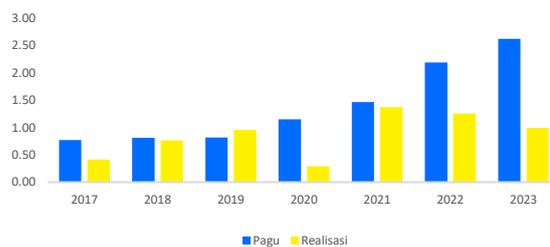
Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	-	-	-
Muba	0.20	0.36	178.75%
Musi Rawas	0.30	0.43	141.90%
Muara Enim	0.45	0.81	180.98%
OKI	0.08	0.11	137.60%
OKU	0.00	0.00	614.15%
Palembang	0.06	0.06	100.73%
Prabumulih	0.09	0.11	124.62%
Pagar Alam	0.01	0.01	109.33%
Lubuk Linggau	0.27	0.31	116.25%
Banyuasin	5.60	6.71	119.84%
Ogan Ilir	1.03	0.86	83.68%
OKU Timur	0.25	0.18	72.39%
OKU Selatan	0.00	0.00	100.08%
Empat Lawang	0.10	0.01	6.47%
PALI	0.05	0.03	58.09%
Muratara	0.10	0.18	176.22%
Total	8.58	10.16	118.41%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.3.16 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang memberikan kontribusi terkecil pada pajak yang menjadi wewenang Kab/Kota di wilayah Sumsel.

Grafik 4.21. Perkembangan Pajak Sarang Burung Walet Sumsel (Rp Miliar)



Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

Pada tahun 2023, Pajak Sarang Burung Walet tercatat sebesar Rp0,99 miliar, tumbuh 3,48% dibandingkan tahun 2019. Pungutan terbesar berada pada Kab. Musi Banyuasin yang sebesar Rp231,86juta dan terendah pada Kota Pagar Alam yang tidak memiliki pungutan.

Tabel 4.16. Pajak Sarang Burung Walet Kab/Kota Sumsel Tahun 2023 (Rp Miliar)

Kab/Kota	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Lahat	0,15	0,07	44,07%
Muba	0,35	0,23	66,25%
Musi Rawas	0,35	0,07	18,65%
Muara Enim	0,06	0,03	46,02%
OKI	0,11	0,02	20,36%
OKU	0,14	0,03	21,59%
Palembang	0,18	0,10	54,82%
Prabumulih	0,04	0,03	86,11%
Pagar Alam	-	-	-
Lubuk Linggau	0,26	0,22	87,43%
Banyuasin	0,18	0,09	50,99%
Ogan Ilir	0,01	0,00	42,75%
OKU Timur	0,01	0,00	12,27%
OKU Selatan	0,03	0,03	103,60%
Empat Lawang	0,75	0,06	7,44%
PALI	0,01	0,01	145,30%
Muratara	0,01	0,00	9,00%
Total	2,62	0,99	37,80%

Sumber: Dit. APK DJPb Kemenkeu (diolah)

### D.4 Tantangan dalam Pemungutan Pajak Daerah Sumsel

Secara umum, kinerja pemungutan pajak daerah di Sumsel cukup baik dengan rata-rata realisasi lebih dari 90% dalam kurun waktu 7 tahun (2017-2023). Namun demikian, jika dilihat dari local tax ratio, Sumsel berada diangka 0,95%. Local tax ratio Sumsel tersebut masih dibawah angka ideal menurut Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, Kementerian Keuangan yaitu 3%. Selanjutnya jika dilihat kinerja per jenis pajak dan per kab/kota, terlihat bahwa masih terdapat jenis pajak ataupun kab/kota yang kinerja pemungutannya masih perlu untuk dioptimalkan.

Dari hasil telaah dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemda wilayah Sumsel dalam upaya optimalisasi pajak daerah. Pertama, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pemda, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi

tantangan utama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Merujuk pada data yang disajikan pada tabel 4.5, terlihat bahwa masih banyak kendaraan yang tidak aktif dalam membayar pajak, yaitu mencapai 57,32% dari total kendaraan yang terdaftar di Sumsel. Di level Kab/Kota, hampir semua jenis pajak juga menghadapi tantangan yang sama. Di Kota Palembang yang menjadi daerah dengan penerimaan pajak tertinggi, tingkat kepatuhan wajib pada beberapa jenis pajak daerah masih perlu untuk ditingkatkan, seperti pajak hotel baru mencapai 65,78%, pajak restoran 57,79%, pajak hiburan 60,42%.

Kedua, aktivitas perekonomian dan pembangunan yang belum merata. Tinggi rendahnya penerimaan Pajak Daerah suatu wilayah sangat bergantung dengan bagaimana aktivitas perekonomian masyarakat dan perkembangan pembangunan dari wilayah tersebut. Daerah dengan aktivitas perekonomian masyarakat yang tinggi akan memiliki penerimaan pajak daerah yang tinggi terutama pada jenis pajak daerah yang bersifat konsumtif. Selain itu, daerah yang perkembangan pembangunan wilayahnya maju juga akan meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Di Sumsel, aktivitas perekonomian masyarakat Sumsel terpusat pada Kota Palembang, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumsel. Selain itu, kota Palembang juga menjadi daerah yang memiliki perkembangan pembangunan wilayah yang paling maju dibandingkan Kab/Kota lainnya. Kota Palembang menjadi penyumbang terbesar PDRB Sumsel. Tingginya aktivitas perekonomian tersebut selaras dengan fakta bahwa Kota Palembang merupakan daerah dengan penerimaan pajak daerah terbesar di Sumsel.

Ketiga, SDM yang belum memadai. Salah satu faktor kunci keberhasilan suatu Pemda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pemda, hampir semua Kab/Kota menghadapi kondisi SDM yang belum memadai. Sebagai contoh di Kota Palembang, masih kesulitan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang Pemeriksa dan Juru Sita

# BAB V: KESIMPULAN & REKOMENDASI



Kesimpulan	Rekomendasi
<b>Ekonomi dan Kesejahteraan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi Sumsel pada triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dan di atas rata-rata nasional. Namun terdapat isu yang perlu untuk menjadi perhatian yaitu laju inflasi yang jauh dibawah rentang target tahunan;</li> <li>2. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah;</li> <li>3. Semua sektor tumbuh positif dengan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan pertanian sebagai pendorong utama;</li> <li>4. Dari sisi kesejahteraan, meskipun terdapat penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kedalaman kemiskinan, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidakmerataan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diversifikasi Ekonomi:</b> Mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, terutama di sektor industri pengolahan dan pertanian yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Dukungan kebijakan dan insentif investasi perlu difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ini.</li> <li>2. <b>Peningkatan Daya Beli Masyarakat:</b> Melakukan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses ke sumber daya keuangan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga.</li> <li>3. <b>Pengurangan Ketimpangan:</b> Pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan dan memperbaiki distribusi pendapatan agar penurunan kemiskinan dapat diikuti dengan perbaikan dalam kedalaman kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.</li> <li>4. <b>Penguatan Infrastruktur dan Proyek Strategis:</b> Melanjutkan dan mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi.</li> </ol>
<b>Fiskal Regional</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja APBN wilayah Sumsel masih dalam tren yang positif baik sisi pendapatan dan belanja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, realisasi belanja barang dan modal pemerintah yang masih dibawah target perlu untuk diakselerasi.</li> <li>2. Belanja negara diproyeksi meningkat tajam di triwulan IV karena penumpukan belanja barang dan modal yang baru akan direalisasikan mendekati akhir tahun.</li> <li>3. Penurunan volume ekspor CPO Sumsel dipengaruhi oleh meningkatnya transfer antar wilayah produk CPO disebabkan banyak perusahaan di Sumsel merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan di daerah lain.</li> <li>4. Penurunan harga patokan ekspor CPO karena penurunan permintaan global juga menjadi faktor menurunnya kinerja bea keluar di Sumsel dan berimplikasi pada capaiannya yang masih rendah. Bea keluar di Sumsel diproyeksi tidak dapat mencapai target hingga akhir tahun 2024.</li> <li>5. Kendala pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya menjadi faktor penghambat dari sisi pelaksanaan APBD, namun juga menjadi penahan akselerasi penyaluran Transfer ke Daerah di Sumsel khususnya untuk DAU dan DBH.</li> <li>6. Keterbatasan kapasitas SDM di kantor kelurahan menjadi penyebab terjadinya gagal salur DAU Pendanaan Kelurahan karena kantor kelurahan kesulitan dalam merealisasikan dana tersebut serta adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum.</li> <li>7. Kinerja APBD Sumsel masih terjaga positif sampai dengan triwulan III 2024 hal tersebut diindikasikan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Pendapatan daerah didorong oleh meningkatnya alokasi penyaluran TKD dan Pajak Daerah. Belanja daerah didorong oleh pembangunan infrastruktur, persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak dan Belanja Hibah;</li> <li>8. Pertumbuhan Pajak Daerah ditopang oleh penerimaan Pajak PBB P2 dan Pajak Konsumsi (PBJT). Adanya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kepada kenaikan jenis pajak tersebut.</li> <li>9. Pendapatan transfer mendominasi pendapatan daerah di pemda Sumsel. Berdasarkan indeks kemandirian fiskal 18 pemda di Sumsel, terdapat 2 Pemda yang berstatus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Akselerasi Realisasi Belanja Barang dan Modal Pemerintah:</b> Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian kontrak dan proses pengadaan barang/jasa, terutama untuk proyek strategis yang mendukung infrastruktur dasar dan konektivitas. Koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus diperkuat, termasuk memanfaatkan teknologi untuk mempercepat administrasi proses pengadaan.</li> <li>2. <b>Peningkatan pengawasan:</b> KPPN sebagai mitra satker dalam penyaluran dana APBN perlu melakukan pengawasan secara intensif melalui monitoring rencana penarikan dana satker di triwulan IV serta aktif berkoordinasi dengan satker dengan mengacu pada ketentuan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.</li> <li>3. <b>Diversifikasi Ekspor dan Penguatan Rantai Nilai Lokal:</b> Sumsel perlu mendorong diversifikasi produk turunan CPO yang bernilai tambah lebih tinggi. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan induk untuk memprioritaskan ekspor melalui wilayah Sumsel dapat meningkatkan penerimaan bea keluar di masa depan.</li> <li>4. <b>Penguatan SIPD:</b> Diperlukan peningkatan keandalan SIPD melalui pelatihan teknis kepada pengguna di pemda serta penguatan infrastruktur teknologi informasi. Pendampingan intensif dari pemerintah pusat perlu dilakukan untuk mempercepat perbaikan sistem ini.</li> <li>5. <b>Peningkatan Kapasitas SDM di Kantor Kelurahan:</b> Kantor kelurahan perlu mendapatkan pelatihan teknis pengelolaan dana kelurahan, termasuk penguatan tata kelola keuangan dan mitigasi risiko hukum. Pendampingan dari pemerintah daerah dan lembaga pendukung lainnya perlu dilakukan untuk mencegah gagal salur DAU Pendanaan Kelurahan di masa mendatang.</li> <li>6. <b>Optimalisasi Pendapatan Daerah:</b> Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Konsumsi (PBJT). Kampanye kesadaran pajak dan inovasi dalam sistem pembayaran pajak berbasis teknologi juga perlu diperluas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.</li> <li>7. <b>Mendorong Kemandirian Fiskal:</b> Bagi pemda yang masih memiliki indeks kemandirian fiskal rendah, perlu ada strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Langkah ini meliputi pengembangan sektor ekonomi lokal, efisiensi belanja, dan pengelolaan aset daerah yang lebih optimal.</li> </ol>

Kesimpulan	Rekomendasi
<p>“Menuju Kemandirian” yaitu Provinsi Sumsel dan Kota Palembang.</p> <p>10. Kinerja belanja daerah s.d akhir tahun diproyeksikan positif. Melihat realisasi s.d triwulan III 2024 semua jenis belanja daerah menunjukkan pertumbuhan positif.</p>	<p>8. <b>Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja Daerah:</b> Belanja daerah harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dukungan untuk pemilu/pilkada serentak. Pemda perlu mengadopsi prinsip <i>spending better</i> dengan fokus pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.</p> <p>9. <b>Kerja Sama Antar Level Pemerintahan:</b> Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penyaluran dana transfer, menyelesaikan kendala administratif, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target.</p> <p>10. <b>Penguatan Kepatuhan Internal pada Pemda.</b> Untuk mendukung percepatan realisasi belanja daerah di akhir tahun anggaran, Pemda dapat menggandeng APIP untuk mengawal proses bisnis pencairan dana APBD. Dengan adanya peran APIP tersebut, pencairan belanja akan semakin terkendali dan sesuai dengan ketentuan.</p>
<b>Pemberdayaan UMKM</b>	
<p>UMKM di Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lokal, tetapi tantangan besar masih dihadapi dalam meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap PDRB. Beberapa kendala utama yang dihadapi yaitu keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi, kurangnya kompetensi SDM, dan hambatan dalam penetrasi pasar, terutama pasar digital. Program <i>existing</i> seperti KUR, pelatihan pemasaran digital, dan dukungan infrastruktur produksi sudah berjalan, tetapi kesenjangan kebutuhan masih terjadi. Selain itu, penurunan pagu APBD untuk pemberdayaan UMKM pada tahun 2024 juga menekankan perlunya efisiensi dan penyesuaian prioritas dalam pelaksanaan program.</p>	<p>1. <b>Optimalisasi Infrastruktur dan Modal Di Sektor Unggulan:</b> Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur pendukung produksi di sektor unggulan serta memperluas akses modal melalui kemitraan dengan lembaga keuangan. Kelembagaan UMKM perlu diperkuat dengan menambah jumlah pelaku usaha produksi yang beroperasi di sektor strategis.</p> <p>2. <b>Perluasan Inklusi Keuangan:</b> Regulasi pembiayaan seperti KUR dan UMi harus disederhanakan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Edukasi kepada pelaku UMKM tentang program pembiayaan juga perlu diperluas melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.</p> <p>3. <b>Digitalisasi Teknologi dan Pemasaran:</b> Pelatihan berbasis teknologi digital harus diperluas untuk mendukung adopsi teknologi dalam proses produksi dan pemasaran. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk masuk ke platform e-commerce dengan memberikan subsidi atau insentif bagi digitalisasi usaha.</p> <p>4. <b>Penguatan Kompetensi SDM:</b> Pelatihan berbasis kebutuhan, terutama untuk pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, harus menjadi prioritas. Program pelatihan harus dirancang untuk mencakup sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti industri kreatif dan jasa.</p> <p>5. <b>Diversifikasi Pasar dan Promosi:</b> Dukungan promosi produk UMKM harus diperluas, termasuk pelibatan UMKM dalam pameran dagang internasional dan promosi digital. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan sektor swasta untuk menciptakan kemitraan strategis dalam pemasaran produk.</p> <p>6. <b>Pengelolaan Data UMKM yang Terintegrasi:</b> Pemerintah perlu memastikan data UMKM yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan program. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendataan dan pengelolaan UMKM.</p>
<b>Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power</b>	
<p>1. Sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tepat waktu, meskipun masih ada satu kabupaten yang belum menyampaikan Perda untuk evaluasi. Namun, perkembangan penyelesaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih beragam, dengan beberapa daerah belum menyelesaikan tahap pembahasan hingga akhir Triwulan III 2024.</p> <p>2. <i>Local Tax Ratio</i> (LTR) Sumatera Selatan pada 2023 berada di angka 0,95%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 1,26% dan target ideal 3%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PDRB masih rendah. Selain itu, <i>Local Tax Buoyancy</i> (LTB) juga negatif,</p>	<p>1. <b>Penyelesaian Peraturan Kepala Daerah:</b> Pemerintah Provinsi Sumsel perlu memastikan semua kabupaten/kota menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pajak daerah sebelum akhir tahun 2024 menjadi prioritas penting. Dengan dukungan pendampingan teknis dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan seluruh regulasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga menghindari <i>potential loss</i> dan mendukung implementasi opsen pajak pada 2025.</p> <p>2. <b>Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak:</b> Pemerintah perlu melakukan edukasi pajak secara masif kepada masyarakat.</p> <p>3. <b>Optimalisasi Pemungutan Pajak:</b> Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi seperti big data untuk mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum tergali.</p>

Kesimpulan	Rekomendasi
<p>menandakan pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Sumsel.</p> <p>3. Beberapa langkah strategis dalam implementasi <i>Local Taxing Power</i> telah dilakukan, seperti penerapan sistem pembayaran <i>split payment</i> untuk opsen, peningkatan koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk sinergi pemungutan pajak. Namun, implementasi penuh kebijakan opsen pajak masih menghadapi kendala teknis di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>4. Secara umum, kinerja pemungutan pajak daerah di Sumsel cukup baik, dengan rata-rata realisasi lebih dari 90% dalam tujuh tahun terakhir. Namun demikian, beberapa jenis pajak seperti Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel masih perlu dioptimalkan. Selain itu, terdapat ketimpangan penerimaan pajak antar wilayah, di mana Kota Palembang mendominasi kontribusi pajak, sementara beberapa kabupaten seperti Empat Lawang dan Muratara menunjukkan kinerja yang rendah;</p> <p>5. Tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, ketimpangan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang terkonsentrasi di Palembang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan. Kondisi ini menuntut upaya optimalisasi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan.</p>	<p>4. <b>Pemerataan Aktivitas Ekonomi dan Pembangunan:</b> Lakukan investasi infrastruktur di daerah-daerah dengan kontribusi pajak rendah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, seperti pembangunan jalan, pasar, dan pusat kegiatan usaha.</p> <p>5. <b>Pengembangan Kapasitas SDM:</b> pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pajak daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan pajak dan pelayanan publik.</p>



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi Sumatera Selatan  
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I  
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135  
Telp. (0711) 356534

 [djb.kemenkeu.go.id/kanwill/sumsel/id/](http://djb.kemenkeu.go.id/kanwill/sumsel/id/)

 @KanwilDJPbSumsel

 @DJPbSumsel

 @KanwilDJPbSumsel

